

# Pendidikan Islam

dalam Sistem Pendidikan Nasional

di **Indonesia**

Edisi Revisi



Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, M.A.



Edisi Revisi

**PENDIDIKAN ISLAM**  
**DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**  
**DI INDONESIA**



Edisi Revisi

# PENDIDIKAN ISLAM

## DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DI INDONESIA

**Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, M.A.**

Sanksi Pelanggaran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1987 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 1997, bahwa:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).





**PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN  
NASIONAL DI INDONESIA**

**Edisi Revisi**  
Copyright © 2004

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

ISBN 978-602-9413-33-5 297. 73

13.5 x 20.5 cm

x, 208 hlm

Cetakan ke-4, Juli 2014

Cetakan ke-3, Juni 2012

Cetakan ke-2, Januari 2007

Cetakan ke-1, Oktober 2004

**Kencana. 2004.0065**

**Penulis**

Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, M.A.

**Desain Cover**

Suwito

**Penata Letak**

Y. Rendy

**Percetakan**

Kharisma Putra Utama

**Penerbit**

K E N C A N A

**PRENADAMEDIA GROUP**

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp. (021) 478-64657 Faks. (021) 475-4134

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT atas seluruh anugerah dan nikmat yang telah diberikan-Nya, karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah buku ini dapat diterbitkan. Salawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Dari waktu ke waktu telah terjadi perkembangan dan dinamikanya. Banyak pemikiran-pemikiran yang berkembang di seputar pendidikan Islam di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam dunia pendidikan, ada yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan ada pula kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Berkenaan dengan itu, lahirlah sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah (PP) mengenai pendidikan, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang selanjutnya diterbitkan pula Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 sebagai pernyataan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950. Berikutnya, pada tahun 1961 lahir Undang-Undang No 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Undang-Undang No. 14 Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional. Pada tahun 1989 lahir pula Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 diikuti dengan seperangkat peraturan pemerintah di bidang pendidikan, yang merupakan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan baik tentang pendidikan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



dasar, menengah dan tinggi, maupun pendidikan luar biasa dan pendidikan luar sekolah.

Untuk lebih menjawab kebutuhan masa depan bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan serta untuk menjawab tuntutan era globalisasi, maka lahirlah undang-undang pendidikan yang menggantikan Undang-Undang Pendidikan No. 2 Tahun 1989, yakni Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, dan seperangkat peraturan pemerintah tentang hal tersebut. Pada undang-undang tersebut dicantumkan secara eksplisit dan implisit tentang kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang ini terlihat ada tiga hal kaitannya dengan pendidikan Islam. *Pertama*, kaitan pendidikan Islam dengan UU No. 20 Tahun 2003 sebagai mata pelajaran. Yaitu, diajarkannya mata pelajaran agama Islam di lembaga-lembaga pendidikan—sekolah dan madrasah dan perguruan tinggi. *Kedua*, kaitan pendidikan Islam dengan UU No. 20 Tahun 2003 sebagai lembaga, yakni dicantumkannya nama-nama lembaga pendidikan Islam dalam undang-undang tersebut, seperti madrasah, Raudatul Atfal, pesantren, diniyah, majelis taklim. *Ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai (*value*), ditemukan sejumlah nilai-nilai Islami dalam batang tubuh Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Hal ini semua memperkuat posisi dan kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Berdasarkan uraian-uraian terdahulu dapatlah disimpulkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan nasional, dan merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional. Berkenaan dengan itu, maka dalam buku ini disajikan beberapa pemba-

hasan yang terkait dengan pendidikan Islam dan hubungannya dengan sistem pendidikan nasional. Kajian-kajian tersebut menyangkut tentang pesantren, sekolah, madrasah, dan pendidikan tinggi. Selain dari itu, diungkapkan pula beberapa pemikiran yang berkembang di seputar pendidikan Islam di Indonesia. Uraian-uraian dalam buku ini sangat relevan dengan kajian yang diperlukan bagi mahasiswa Fakultas Tarbiyah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (IAIN, STAIN, UIN) serta Perguruan Tinggi Islam Swasta baik pada tataran pendidikan tingkat sarjana maupun pascasarjana dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.

Tulisan yang dituangkan dalam buku ini adalah berasal dari sajian yang diungkapkan dalam berbagai seminar, diskusi, penataran. Tentu saja sebuah buku yang berasal dari esai-esai yang diperuntukkan bagi suatu kajian tertentu tidak dapat menghindari diri ditemukannya pengulangan, untuk itu penulis menghaturkan maaf. Buku ini juga merupakan revisi dari buku *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional* yang telah diterbitkan Prenada Media Group pada tahun 2004 dan 2007. Revisi ini diperlukan karena sesuai dengan tuntutan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Selanjutnya, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terbitnya buku ini, terutama kepada penerbit Prenada Media Group yang telah





berkenan mencetak buku ini. Diharapkan dengan terbitnya buku ini menambah khazanah literatur pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai tulisan yang diharapkan untuk dapat dikembangkan terus-menerus, maka masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Medan, 28 Mei 2012

**Haidar P. Daulay**

## DAFTAR ISI

<b>BAGIAN 1</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
<b>BAGIAN 2</b>	
<b>PESANTREN, SEKOLAH, DAN MADRASAH</b>	<b>17</b>
Bab 1 Historis dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah.....	18
Bab 2 Peranan Pesantren dalam Menciptakan Masyarakat Madani ....	63
Bab 3 Pemberdayaan Pendidikan Agama di Sekolah .....	73
Bab 4 Profesionalisme Guru Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan .	81
<b>BAGIAN 3</b>	
<b>PENDIDIKAN TINGGI ISLAM</b>	<b>95</b>
Bab 1 Historis dan Eksistensi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia .....	96
Bab 2 IAIN di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan dari Sudut Pendidikan Islam .....	121
Bab 3 Perguruan Tinggi Agama Islam Di Masa Depan (Peluang dan Tantangan)	136





## **BAGIAN 4**

### **PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM 143**

Bab 1 Integrasi Ilmu  
dalam Pandangan Islam.....144

Bab 2 Dinamika Pendidikan Islam di Era  
Globalisasi (Tinjauan Inovasi Kurikulum,  
Pendidik, dan Lembaga Pendidikan).....164

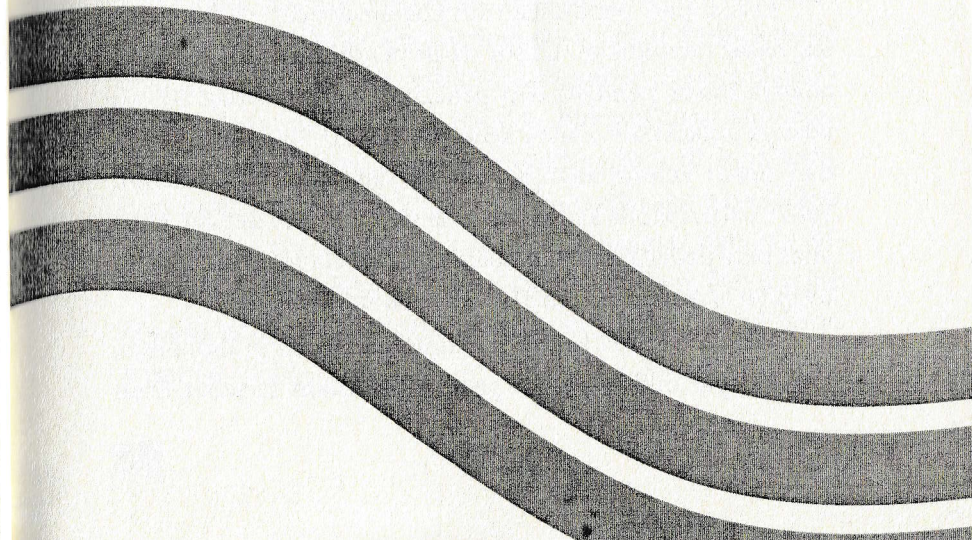
Bab 3 Membangun Karakter Bangsa Melalui  
Pemberdayaan Pendidikan Agama .....184

**DAFTAR BACAAN 201**

**TENTANG PENULIS 207**

# **Bagian 1**

## **PENDAHULUAN**





## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia. Menurut catatan sejarah masuknya Islam ke Indonesia dengan damai, berbeda dengan daerah-daerah lain, kedatangan Islam dilalui lewat peperangan, seperti Mesir, Irak, Parsi, dan beberapa daerah lainnya. Peranan para pedagang dan mubaligh sangat besar sekali andilnya dalam proses islamisasi di Indonesia. Salah satu jalur proses Islamisasi itu adalah pendidikan.

Hakikat pendidikan itu adalah pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan. Dengan demikian, pendidikan Islam adalah proses pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan Islam. Para pedagang atau mubaligh adalah orang yang melakukan aktivitas pendidikan. Apa argumen yang dikemukakan bahwa kegiatan para pedagang atau mubaligh tersebut digolongkan kepada aktivitas pendidikan? Untuk itu dilihat dari sudut esensi pendidikan.

Esensi dari pendidikan itu adalah dengan melihat unsur dasar pendidikan. Unsur dasar pendidikan itu ada lima, adanya unsur pemberi dan penerima. Unsur ketiga adalah adanya tujuan baik. Unsur keempat cara atau jalan yang baik, dan unsur kelima adanya konteks yang positif (Muhadjir, 1987: 1-6). Apabila kelima kriteria itu dikaitkan dengan aktivitas para pedagang dan mubaligh, maka aktivitas mereka itu telah termasuk ke dalam aktivitas pendidikan.

Melihat kepada kegiatan pendidikan Islam di Indonesia, maka dapat dilihat bahwa pendidikan Islam tersebut telah

banyak memainkan peranannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, selain dari itu telah terjadi pula dinamika perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu yang sangat strategis dalam dinamika itu adalah masuknya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

Makna yang terkandung di dalamnya bahwa pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, yang dibagi kepada tiga hal. *Pertama*, pendidikan Islam sebagai lembaga; *kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan *ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai (*value*).

Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuinya keberadaan pendidikan agama sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Berikutnya pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.

### A. TINJAUAN HISTORIS

Kajian historis tentang pendidikan Islam di Indonesia sejak awal masuknya Islam ke Indonesia dapat dibagi kepada tiga fase. *Fase pertama*, sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam sejak awal masuknya Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. *Fase kedua*, sejak masuknya ide-ide pembaruan pendidikan Islam di Indonesia sampai zaman kemerdekaan dan *fase ketiga* sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang yakni sejak diundangkannya undang-undang tentang sistem pendidikan nasional, yaitu:





1. UU No. 4 Tahun 1950 Undang-Undang tentang Dasar-dasar Pengajaran.
2. UU No. 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950.
3. UU No. 2 Tahun 1989 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. UU No. 20 Tahun 2003 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

*Fase pertama* adalah fase awal dimulai dengan munculnya pendidikan informal, yang dipentingkan pada tahap awal adalah pengenalan nilai-nilai Islami, selanjutnya baru muncul lembaga-lembaga pendidikan Islam yang diawali dengan munculnya masjid, pesantren, meunasah, rangkang, dayah, dan surau. Ciri yang paling menonjol dalam fase ini adalah: *Pertama*, materi pelajaran terkonsentrasi kepada pengembangan dan pendalaman ilmu-ilmu agama, seperti tauhid, fikih, tasawuf, akhlak, tafsir, hadis dan lain-lain yang sejenis dengan itu, pembelajarannya terkonsentrasi kepada pembahasan kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab. *Kedua*, metodenya adalah *sorogan*, *wetonan*, hafalan dan muzakarah (musyawarah). *Ketiga*, sistemnya nonklasikal, yakni dengan memakai sistem *halaqah*. Outputnya akan menjadi ulama, kiai, ustadz, guru agama, dan juga menduduki jabatan-jabatan penting keagamaan dari tingkat yang paling tinggi seperti mufti sampai ke tingkat pengurusan soal-soal yang berkenaan dengan fardu kifayah ketika seseorang meninggal dunia.

*Fase kedua* adalah fase ketika masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia. Sejak abad ke-19 Masehi telah berkumandang ide-ide pembaruan pemikiran Islam

ke seluruh dunia Islam, dimulai dari gerakan pembaruan di Mesir, Turki, Saudi Arabia, dan juga Indonesia. Khusus dalam gerakan pembaruan pendidikan ada beberapa nama yang terkenal, di antaranya Muhammad Ali Pasha, Muhammad Abduh dengan murid-muridnya di Mesir, Sultan Mahmud II di Turki, Said Ahmad Khan di India, Abdullah Ahmad di Indonesia. Inti dari gerakan pembaruan itu adalah berupaya untuk mengadopsi pemikiran-pemikiran modern yang berkembang di dunia pendidikan.

Khusus pembaruan pendidikan Islam di Indonesia dilatarbelakangi oleh dua faktor penting. *Pertama*, faktor intern, yakni kondisi masyarakat Muslim Indonesia yang terjajah dan terbelakang dalam dunia pendidikan mendorong semangat beberapa orang pemuka-pemuka masyarakat Indonesia untuk memulai gerakan pembaruan pendidikan tersebut. *Kedua*, faktor ekstern, yakni sekembalinya pelajar dan mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu agama di Timur Tengah, dan setelah mereka kembali ke Indonesia mereka memulai gerakan-gerakan pembaruan tersebut. Di antara tokoh yang berpengaruh menggerakkan pembaruan tersebut adalah Syekh Muhammad Jamil Jambek, Haji Karim Amrullah, Haji Abdullah Ahmad, Ibrahim Musa Parabek di Sumatra Barat. Di Jawa muncul tokoh H. Ahmad Dahlan, dengan gerakan Muhammadiyah, H. Hasan dengan gerakan Persis (Persatuan Islam), Haji Abdul Halim dengan gerakan Perserikatan Ulama, K.H. Hasyim Asy'ary dengan Organisasi Nahdatul Ulama (Daulay, 2009: 41).

Menurut Steenbrink ada empat faktor yang mendorong munculnya pembaruan pendidikan Islam di Indonesia:

1. Sejak tahun 1900 telah banyak pemikiran untuk kembali



ke Al-Qur'an dan Sunah yang dijadikan titik tolak menilai kebiasaan agama dan kebudayaan yang ada.

2. Dorongan kedua, sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda.
3. Dorongan ketiga, adanya usaha-usaha dari umat Islam untuk memperkuat organisasinya dalam bidang sosial dan ekonomi.
4. Banyak yang tidak puas dengan metode pendidikan tradisional di dalam mempelajari Al-Qur'an dan studi agama (Steenbrink, 1986: 46-47).

Ada empat sasaran pokok yang diperbarui: *Pertama*, materi pelajaran: materi pelajaran yang diajarkan sebelum lahirnya ide-ide pembaruan adalah terpusat kepada pelajaran agama yang terkonsentrasi kepada kitab-kitab klasik seperti yang telah diuraikan terdahulu. Setelah zaman pembaruan pendidikan Islam, materi pembelajaran itu tidak lagi hanya sekadar pendalaman ilmu-ilmu agama tetapi juga diajarkan ilmu pengetahuan umum, seperti aljabar, ilmu ukur, ilmu alam, kimia, ilmu hayat, ekonomi, tata negara, bahasa Inggris/Belanda, dan lain-lain. *Kedua*, pembaruan metode, tidak lagi hanya tertumpu kepada metode *sorogan*, *wetonan*, dan *muza-karah*, tetapi telah dikembangkan kepada metode pembelajaran lainnya. *Ketiga*, sistemnya klasikal, peserta didik telah dibagi kepada kelas-kelas berdasarkan urutan tahun masuk dan lamanya belajar. *Keempat*, manajemen pendidikan, diterapkannya prinsip-prinsip dasar manajemen pendidikan.

Salah satu lembaga pendidikan yang lahir sebagai hasil dari pembaruan itu adalah madrasah. Perkataan madrasah di Indonesia baru populer setelah awal abad ke-20, padahal

madrasah di dunia Islam telah berkembang pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi. Madrasah di Indonesia adalah merupakan perpaduan di antara pesantren dan sekolah. Ada unsur-unsur yang diambil madrasah dari pesantren ada pula dari sekolah. Unsur-unsur yang diambil dari pesantren itu adalah ilmu agama dan jiwa beragama, sedangkan unsur yang diambil dari sekolah adalah ilmu pengetahuan umum, sistem, metode, serta manajemen pendidikan.

Perkembangan berikutnya adalah *fase ketiga*, diawali dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun 1954, kemudian dilanjutkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang diikuti dengan lahirnya sejumlah Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan (PP 27, 28, 29, 30 Tahun 1990, PP 72, 73 Tahun 1991 dan PP 38, 39 Tahun 1992), seterusnya diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 dengan seperangkat peraturan pemerintah seperti PP No. 14 Tahun 2005.

Ada beberapa pasal dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut yang mengatur pendidikan Islam terutama sangat jelas pada UU No. 20 Tahun 2003. Di dalam aturan tersebut setidaknya ada tiga hal yang terkait dengan pendidikan Islam. *Pertama*, kelembagaan, diakuinya keberadaan lembaga pendidikan madrasah, Pesantren Diniyah Raudhatul Atfal sebagai lembaga yang diakui, dan diakui keberadaan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah. *Kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, yakni diakuinya keberadaan pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah dan madrasah-madrasah. *Ketiga*, nilai (*value*) terdapat seperangkat nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional.





## B. SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan memiliki nilai yang strategi dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan itu juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa tersebut. Sebab lewat pendidikanlah akan diwariskan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa tersebut, karena itu pendidikan tidak hanya berfungsi untuk *how to know*, *how to do*, dan *how to live together*, tetapi yang sangat penting adalah *how to be*, bagaimana agar *how to be* terwujud maka diperlukan transfer budaya dan kultur.

Oleh karena demikian pentingnya masalah yang berkenaan dengan pendidikan, maka perlu diatur suatu aturan yang baku mengenai pendidikan tersebut, yang dipayungi dalam sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Bangsa Indonesia di awal kemerdekaannya sungguh sangat serius untuk membenahi pendidikan. Ada beberapa catatan sejarah dari kronologisnya menunjukkan keseriusan dan kesungguhan para pendiri negara ini untuk membenahi pendidikan. Catatan tersebut sebagai berikut:

1. Tahun 1946, membentuk panitia penyelidik pendidikan dan pengajar.
2. Tahun 1947, Kongres Pendidikan I di Solo.
3. Tahun 1948, membentuk panitia pembentukan Rancangan Undang-Undang Pendidikan.
4. Tahun 1949, Kongres Pendidikan II di Yogyakarta.

5. Tahun 1950, lahirnya UU No. 4 Tahun 1950 Undang-Undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUDP).
6. Tahun 1954, lahirnya UU No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya UU No. 4 Tahun 1950.
7. Tahun 1961, lahirnya Undang-Undang tentang Perguruan Tinggi.
8. Tahun 1965, lahirnya Majelis Pendidikan Nasional.
9. Tahun 1989, lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN).
10. Tahun 1990, lahirnya PP No. 27, 28, 29, 30 Tahun 1990.
11. Tahun 1991, lahirnya PP No. 72, 73 Tahun 1991.
12. Tahun 1992, lahirnya PP No. 38, 39.
13. Tahun 1999, lahirnya PP No. 60 dan 61.
14. Tahun 2003, lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.
15. Tahun 2005, lahirnya UU No. 14 Tahun 2005 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen.
16. Tahun 2005, lahirnya Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
17. Tahun 2007, lahirnya Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

## C. KEDUDUKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan Islam diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional, yang dibagi kepada tiga hal. *Pertama*,



pendidikan Islam sebagai lembaga; *kedua*, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran; dan *ketiga*, pendidikan Islam sebagai nilai (*value*).

Pendidikan Islam sebagai lembaga diakuiinya keberadaan lembaga pendidikan Islam secara eksplisit. Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran diakuiinya pendidikan agama sebagai salah satu pelajaran yang wajib diberikan pada tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Berikutnya pendidikan Islam sebagai nilai, yakni ditemukannya nilai-nilai Islami dalam sistem pendidikan nasional.

Kajian historis tentang pendidikan Islam di Indonesia telah diungkapkan terdahulu yang meliputi tiga fase. Setiap fase mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri. *Fase pertama*, merupakan awal serta mencari bentuk pendidikan Islam. *Fase kedua*, munculnya dinamika pembaruan, yakni timbulnya perubahan-perubahan dalam bidang lembaga, kurikulum, metode, serta manajemen. *Fase ketiga*, fase pembangunan pendidikan Islam yang diintegrasikan dengan sistem pendidikan nasional.

Sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu: semesta dalam arti terbuka bagi seluruh rakyat dan berlaku di seluruh wilayah negara; menyeluruh dalam arti mencakup semua jalur, jenjang, jenis pendidikan; dan terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dan seluruh usaha pembangunan nasional.

Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia ber-

kembang menjadi manusia yang berkualitas, sehingga mampu dan proaktif menjawab tentang perubahan zaman.

Dengan visi tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mempunyai perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Mempersiapkan kesiapan masukan dan kualitas masukan serta kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (Penjelasan UU No. 20 Tahun 2003).

Strategi pembangunan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia.
2. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi.
3. Proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis.
4. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan.



5. Peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Penyediaan sarana belajar yang mendidik.
7. Pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata.
9. Pelaksanaan wajib belajar.
10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan.
11. Pemberdayaan peran masyarakat.
12. Pusat pemberdayaan dan pengembangan masyarakat.
13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional (Penjelasan UU No. 20 Tahun 2003).

Untuk meletakkan duduknya pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional perlu diklasifikasikan kepada tiga hal:

## 1. Pendidikan Islam sebagai Lembaga

### a. Lembaga Pendidikan Formal.

1. Pendidikan dasar (Pasal 17) menyebutkan:  
Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
2. Pendidikan menengah (Pasal 18) menyebutkan:  
Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Ke-

juruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

3. Pendidikan tinggi (Pasal 20) menyebutkan:  
Pendidikan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
4. Lembaga pendidikan nonformal (Pasal 26).  
Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis.
5. Lembaga pendidikan informal (Pasal 27).  
Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
6. Pendidikan usia dini (Pasal 28).  
Pendidikan usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
7. Pendidikan keagamaan (Pasal 30).
  - a. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli agama.
  - c. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.



- d. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- e. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

## 2. Pendidikan Islam sebagai Mata Pelajaran

Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan:

- a. Peningkatan iman dan takwa.
- b. Peningkatan akhlak mulia.
- c. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.
- d. Keragaman potensi daerah dan lingkungan.
- e. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
- f. Tuntutan dunia kerja.
- g. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- h. Agama.
- i. Dinamika perkembangan global.
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan (Pasal 36 ayat 3).

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. Pendidikan agama.
- b. Pendidikan kewarganegaraan.

- c. Bahasa.
- d. Matematika.
- e. Ilmu pengetahuan alam.
- f. Ilmu pengetahuan sosial.
- g. Seni dan budaya.
- h. Pendidikan jasmani dan olahraga.
- i. Keterampilan/kejuruan.
- j. Muatan lokal.

Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a. Pendidikan agama.
- b. Pendidikan kewarganegaraan.
- c. Bahasa.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ini juga disebutkan bahwa pendidikan agama adalah hak peserta didik, berbunyi: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama" (Pasal 12 (1) a). Dalam bagian penjelasan diterangkan pula bahwa pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat 3.

## 3. Nilai-nilai Islami dalam UU No. 20 Tahun 2003

Inti dari hakikat nilai-nilai Islam itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk (sesuai konsep *rahmatan lil 'alamin*), demokratis, egalitarian,





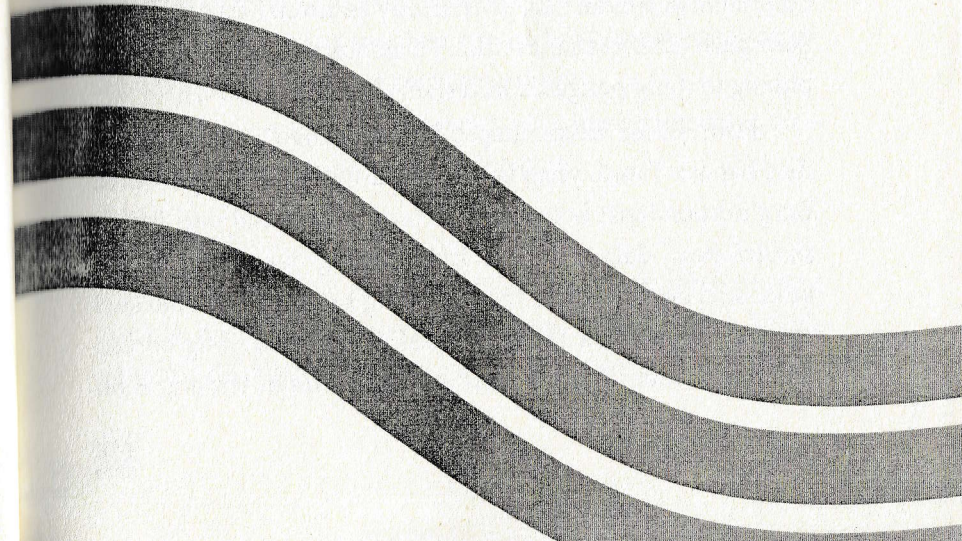
dan humanis. Di antara nilai-nilai tersebut adalah:

- a. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
- b. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- c. Pendidikan nasional bersifat demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif.
- d. Memberikan perhatian kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- e. Menekankan pentingnya pendidikan keluarga merupakan salah satu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan seumur hidup.
- f. Pendidikan merupakan kewajiban bersama antara orangtua, masyarakat, dan pemerintah.
- g. Memberikan hak kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

## Bagian 2

### PESANTREN, SEKOLAH, DAN MADRASAH

- Historis dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah
- Peranan Pesantren dalam Membentuk Masyarakat Madani
- Pemberdayaan Pendidikan Agama di Sekolah
- Profesionalisme Guru Madrasah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan





## BAB 1

# HISTORIS DAN EKSISTENSI PESANTREN, SEKOLAH, DAN MADRASAH

## A. PESANTREN

### 1. Pengertian, Unsur-unsur, dan Ciri-ciri

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan *pe* dan akhiran *an* yang berarti tempat tinggal santri (Dhofier, 1984: 18). Dengan nada yang sama Soegarda Poerbakawatja menjelaskan pesantren asal katanya adalah santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam (Poerbakawatja, 1976: 233). Manfred Ziemek juga menyebutkan bahwa asal etimologi dari pesantren adalah *pe-santri-an*, berarti "tempat santri". Santri atau murid (umumnya sangat berbeda-beda) mendapat pelajaran dari pemimpin pesantren (kiai) dan oleh para guru (ulama atau ustadz). Pelajaran mencakup berbagai bidang tentang pengetahuan Islam (Ziemek, 1986: 16).

Prof. Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji. Adapun C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *shastri* yang dalam bahasa India, orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastri* berasal dari *shastra* yang berarti buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu

pengetahuan (Dhofier, 1984: 18). Adanya kaitan antara istilah santri yang digunakan setelah datangnya agama Islam, dengan istilah yang digunakan sebelum datangnya Islam ke Indonesia adalah bisa saja terjadi. Sebab seperti yang dimaklumi bahwa sebelum Islam masuk ke Indonesia masyarakat Indonesia telah menganut beraneka ragam agama dan kepercayaan, termasuk di antaranya agama Hindu. Dengan demikian, bisa saja terjadi istilah santri itu telah dikenal di kalangan masyarakat Indonesia sebelum Islam masuk. Ada juga yang menyamakan tempat pendidikan itu dengan Buddha dari segi bentuk asrama (Ziemek, 1986: 16).

Apa sebetulnya persyaratan-persyaratan pokok suatu lembaga pendidikan baru dapat digolongkan sebagai pesantren. Untuk itu perlu dilihat apabila telah mencukupi elemen-elemen pokok pesantren. Elemen-elemen pokok pesantren itu adalah: pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab klasik dan kiai (Dhofier, 1984: 44). Ada juga yang menyebutkan unsur-unsur pokok pesantren itu hanya tiga, yaitu: (1) kiai yang mendidik dan mengajar; (2) santri yang belajar; (3) masjid tempat mengaji (Saridjo, 1982: 9). Namun, bila dilihat kenyataan yang sesungguhnya bahwa persyaratan elemen-elemen yang lima macam itu lebih mengena sebagai unsur-unsur pokok dari suatu pesantren.

Kelima unsur pokok tersebut bila diuraikan secara global dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### a. Pondok

Istilah pondok berasal dari bahasa Arab *funduq* yang berarti hotel, penginapan (Munawir, 1984: 1154). Istilah pondok diartikan juga dengan asrama. Dengan demikian,





pondok mengandung makna sebagai tempat tinggal. Sebuah pesantren mesti memiliki asrama tempat tinggal santri dan kiai. Di tempat tersebut selalu terjadi komunikasi antara santri dan kiai.

Di pondok seorang santri patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang diadakan, ada kegiatan pada waktu tertentu yang mesti dilaksanakan oleh santri. Ada waktu belajar, shalat, makan, tidur, istirahat, dan sebagainya, bahkan ada juga waktu untuk ronda dan jaga malam.

Ada beberapa alasan pokok sebab pentingnya pondok dalam satu pesantren, yaitu: *Pertama*, banyaknya santri-santri yang berdatangan dari daerah yang jauh untuk menuntut ilmu kepada seorang kiai yang sudah termasyhur keahliannya. *Kedua*, pesantren-pesantren tersebut terletak di desa-desa di mana tidak tersedia perumahan untuk menampung santri yang berdatangan dari luar daerah. *Ketiga*, ada sikap timbal balik antara kiai dan santri, di mana para santri menganggap kiai adalah seolah-olah orangtuanya sendiri (Dhofier, 1984: 46-47).

## b. Masjid

Masjid diartikan secara harfiah adalah tempat sujud, karena di tempat ini setidaknya-tidaknya seorang Muslim lima kali sehari semalam melaksanakan shalat. Fungsi masjid tidak saja untuk shalat, tetapi juga mempunyai fungsi lain seperti pendidikan dan lain sebagainya. Di zaman Rasulullah masjid berfungsi sebagai tempat ibadah dan urusan-urusan sosial kemasyarakatan serta pendidikan.

Suatu pesantren mutlak mesti memiliki masjid, sebab di situlah akan dilangsungkan proses pendidikan dalam bentuk

komunikasi belajar mengajar antara kiai dan santri. Masjid sebagai pusat pendidikan Islam telah berlangsung sejak masa Rasulullah, dilanjutkan oleh khulafa al-rasyidin, dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, Fathimiyah, dan dinasti-dinasti lain. Tradisi itu tetap dipegang oleh para kiai pemimpin pesantren untuk menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan.

## c. Santri

Santri adalah siswa yang belajar di pesantren, santri ini dapat digolongkan kepada dua kelompok:

- 1) Santri mukim, yaitu santri yang berdatangan dari tempat-tempat yang jauh yang tidak memungkinkan dia untuk pulang ke rumahnya, maka dia mondok (tinggal) di pesantren. Sebagai santri mukim mereka memiliki kewajiban-kewajiban tertentu.
- 2) Santri kalong, yaitu siswa-siswa yang berasal dari daerah sekitar yang memungkinkan mereka pulang ke tempat kediaman masing-masing. Santri kalong ini mengikuti pelajaran dengan cara pulang pergi antara rumahnya dan pesantren.

Di dunia pesantren biasa saja dilakukan seorang santri pindah dari satu pesantren ke pesantren lain, setelah seorang santri merasa sudah cukup lama di satu pesantren maka dia pindah ke pesantren lainnya. Biasanya kepindahan itu untuk menambah dan mendalami suatu ilmu yang menjadi keahlian dari seorang kiai yang didatangi itu.

Pada pesantren yang masih tergolong tradisional, lamanya santri bermukim di tempat itu bukan ditentukan oleh ukuran tahun atau kelas, melainkan diukur dari kitab yang





dibaca. Seperti yang diungkapkan terdahulu bahwa kitab-kitab itu ada yang bersifat dasar, menengah, dan kitab-kitab besar. Kitab-kitab itu juga semakin tinggi semakin sulit memahami isinya, oleh karena itu dituntut penguasaan kitab-kitab dasar dan menengah sebelum memasuki kitab-kitab besar.

#### d. Kiai

Kiai adalah tokoh sentral dalam suatu pesantren, maju mundurnya suatu pesantren ditentukan oleh wibawa dan karisma sang kiai.

Menurut asal usulnya, perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gejala yang saling berbeda:

- 1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, umpamanya “kiai garuda kencana” dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di keraton Yogyakarta.
- 2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya.
- 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya (Dhofier, 1984: 55).

Kiai dalam pembahasan ini adalah mengacu kepada pengertian yang ketiga, kendatipun bahwa gelar kiai saat sekarang ini tidak lagi hanya diperuntukkan bagi yang memiliki pesantren. Sudah banyak juga gelar kiai digunakan terhadap ulama yang tidak memiliki pesantren. Istilah ulama kadang kala digunakan juga istilah lain seperti: Buya di Su-

matera Utara, Tengku di Aceh, Ajengan di Jawa Barat, dan Kiai di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

#### e. Pengajian Kitab-kitab Islam Klasik

Kitab-kitab Islam klasik yang lebih populer dengan sebutan “kitab kuning”. Kitab-kitab ini ditulis oleh para ulama Islam pada zaman pertengahan. Kepintaran dan kemahiran seorang santri diukur dari kemampuannya membaca serta mensyarahkan (menjelaskan) isi kitab-kitab tersebut. Untuk tahu membaca sebuah kitab dengan benar, seorang santri dituntut untuk mahir dalam ilmu-ilmu bantu, seperti *nahwu*, *syaraf*, *balaghah*, *ma’ani*, *bayan*, dan lain sebagainya.

Kriteria kemampuan membaca dan mensyarahkan kitab bukan hanya merupakan kriteria diterima atau tidaknya seseorang sebagai ulama atau kiai pada zaman dahulu saja, melainkan juga sampai saat sekarang. Salah satu persyaratan seseorang telah memenuhi kriteria sebagai kiai atau ulama adalah kemampuannya membaca serta menjelaskan isi kitab-kitab tersebut.

Karena sedemikian tinggi posisi kitab-kitab Islam klasik tersebut, maka setiap pesantren selalu mengadakan pengajian “kitab-kitab kuning”. Kendatipun saat sekarang telah banyak pesantren yang memasukkan pelajaran umum, namun pengajian kitab-kitab klasik tetap diadakan.

Kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan kepada delapan kelompok, yaitu: Nahwu/sharaf, fikih, ushul fikih, Hadis, tafsir, tauhid, tasawuf dan etika, serta cabang-cabang ilmu lainnya seperti tarikh dan balaghah (Dhofier, 1984: 50).





Pada umumnya kitab-kitab itu dapat pula digolongkan dari tingkatannya, yakni ada tingkatan dasar, menengah dan ada kitab-kitab besar.

## 2. Pola-pola Pesantren

Pembagian pola pesantren berdasarkan kurikulumnya dapat dipolakan menjadi lima pola, yaitu:

Pola I, materi pelajaran yang dikemukakan di pesantren ini adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Metode penyampaian adalah *wetonan* dan *sorogan*, tidak memakai sistem klasikal. Santri dinilai dan diukur berdasarkan kitab yang mereka baca. Mata pelajaran umum tidak diajarkan, tidak mementingkan ijazah sebagai alat untuk mencari kerja. Yang paling dipentingkan adalah penguasaan ilmu-ilmu agama semata-mata melalui kitab-kitab klasik.

Pola II, pola ini hampir sama dengan Pola I di atas, hanya saja pada Pola II proses belajar mengajar dilaksanakan secara klasikal dan nonklasikal, juga dididikkan keterampilan dan pendidikan berorganisasi. Pada tingkat tertentu di berikan sedikit pengetahuan umum. Santri dibagi jenjang pendidikan mulai dari tingkat ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah. Metode: *wetonan*, *sorogan*, hafalan, dan musyawarah.

POLA III, pada pola ini materi pelajaran telah dilengkapi dengan mata pelajaran umum, dan ditambah pula dengan memberikan aneka macam pendidikan lainnya, seperti keterampilan, kepramukaan, olahraga, kesenian dan pendidikan berorganisasi, dan sebagian telah melaksanakan program pengembangan masyarakat.

POLA IV, pola ini menitik beratkan pelajaran keterampilan di samping pelajaran agama. Keterampilan ditujukan untuk bekal kehidupan bagi seorang santri setelah tamat dari pesantren ini. Keterampilan yang diajarkan adalah pertanian, pertukangan, peternakan.

POLA V, pada pola ini materi yang diajarkan di pesantren sebagai berikut:

- a. Pengajaran kitab-kitab klasik.
- b. Madrasah, di pesantren ini diadakan pendidikan model madrasah, selain mengajarkan mata pelajaran agama, juga mengajarkan mata pelajaran umum. Kurikulum madrasah pondok dapat dibagi kepada dua bagian: *pertama*, kurikulum yang dibuat oleh pondok sendiri; dan *kedua*, kurikulum pemerintah dengan memodifikasi materi pelajaran agama.
- c. Keterampilan ini juga diajarkan berbagai kegiatan keterampilan.
- d. Sekolah umum, di pesantren ini dilengkapi dengan sekolah umum. Sekolah umum yang ada di pesantren, materi pelajaran umum seluruhnya berpedoman kepada kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Adapun materi pelajaran agama disusun oleh pondok sendiri. Di luar kurikulum pendidikan agama yang diajarkan di sekolah, pada waktu-waktu yang sudah terjadwal santri menerima pendidikan agama lewat membaca kitab-kitab klasik.
- e. Perguruan tinggi, pada beberapa pesantren yang tergolong pesantren besar telah membuka universitas atau perguruan tinggi.



## Pola pesantren berdasarkan bangunan fisik:

POLA I	Keterangan
Masjid Rumah Kiai.	Pesantren ini masih bersifat sederhana, di mana kiai menggunakan masjid atau rumahnya sendiri untuk tempat mengajar. Dalam pola ini santri hanya datang dari daerah pesantren itu sendiri, namun mereka telah mempelajari ilmu agama secara kontinu dan sistematis. Metode pengajaran: <i>Wetonan</i> dan <i>Sorogan</i> .
POLA II	Keterangan
Masjid Rumah Kiai Pondok.	Dalam pola ini pesantren telah memiliki pondok atau asrama yang disediakan bagi para santri yang datang dari daerah. Metode pengajaran: ( <i>wetonan</i> dan <i>sorogan</i> ).
POLA III	Keterangan
Masjid Rumah Kiai Pondok Madrasah.	Pesantren ini telah memakai sistem klasikal, di mana santri yang mondok mendapat pendidikan di madrasah. Ada kalanya murid madrasah itu datang dari daerah sekitar pesantren itu sendiri. Di samping sistem klasikal juga pengajaran sistem <i>wetonan</i> dilakukan juga oleh kiai.
POLA IV	Keterangan
Masjid Rumah Kiai, Pondok, Madrasah, Tempat keterampilan.	Dalam pola ini di samping memiliki madrasah juga memiliki tempat-tempat keterampilan. Misalnya: peternakan, pertanian, kerajinan rakyat, toko koperasi, dan sebagainya.
POLA V	Keterangan
Masjid Rumah Kiai Pondok, Madrasah tempat keterampilan, Universitas gedung pertemuan, tempat olahraga, sekolah umum.	Dalam pola ini pesantren yang sudah berkembang dan bisa digolongkan pesantren mandiri. Pesantren seperti ini telah memiliki: Perpustakaan, dapur umum, ruang makan, kantor administrasi, toko, rumah penginapan tamu, ruang <i>operation room</i> , dan sebagainya. Di samping itu pesantren ini mengelola SMP, SMA, dan kejuruan lainnya.

(Prasodjo, 1982: 83-84).

## 3. Ciri-ciri Umum Pendidikan Pesantren

Sesuai dengan latar belakang sejarah pesantren, dapat dilihat tujuan utama didirikannya suatu pesantren adalah untuk mendalami ilmu-ilmu agama (tauhid, fikih, ushul fikih, tafsir, Hadis, akhlak, tasawuf, Bahasa Arab, dan lain-lain). Diharapkan seorang santri yang keluar dari pesantren telah memahami beraneka ragam mata pelajaran agama dengan kemampuan merujuk kepada kitab-kitab klasik.

Sangat dianjurkan juga, seorang santri calon kiai di samping menguasai ilmu-ilmu agama secara menyeluruh maka secara khusus dia juga memiliki keahlian dalam mata pelajaran tertentu. Jadi, semacam spesialisasi. Karena adanya spesialisasi kiai-kiai tertentu, maka hal ini juga berpengaruh kepada spesifik pesantren yang diasuh oleh kiai tersebut.

Oleh karena adanya spesifik dari beraneka pesantren tersebut, maka biasanya seorang santri yang telah menyelesaikan pelajarannya pada salah satu pesantren, pindah ke pesantren lain untuk melanjutkan pelajaran dalam mata pelajaran yang menjadi spesifik dari pesantren yang didatanginya itu.

Karena tuntutan pokok yang mesti dikuasai oleh santri adalah ilmu-ilmu agama Islam, maka tidak boleh tidak para santri mesti memahami ilmu-ilmu agama Islam itu dari sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Sunah yang telah dijabarkan oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab klasik berbahasa Arab dengan segala cabang-cabangnya merupakan unsur pokok dalam suatu pesantren.

Untuk mengajarkan kitab-kitab klasik tersebut, seorang kiai menempuh metode: *wetonan*, *sorogan*, dan hafalan. We-



*tonan* atau *bandongan* adalah metode kuliah di mana para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai. Kiai membacakan kitab yang dipelajari saat itu, santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan. *Sorogan* adalah metode kuliah dengan cara santri menghadap guru seorang demi seorang dengan membawa kitab yang akan dipelajari. Kitab-kitab yang dipelajari itu diklasifikasikan berdasarkan tingkatan-tingkatan. Ada tingkat awal, menengah, dan atas. Seorang santri pemula terlebih dahulu dia mempelajari kitab-kitab awal, barulah kemudian diperkenankan mempelajari kitab-kitab pada tingkat berikutnya, dan demikianlah seterusnya.

Karena itu pulalah, pesantren tradisional tidak mengenal sistem kelas. Kemampuan siswa tidak dilihat dari kelas berapanya, tetapi dilihat dari kitab apa yang telah dibacanya. Orang-orang pesantren telah dapat mendudukan derajat ilmu seorang santri, atas dasar tingkatan kitab yang telah dibacanya.

Di samping metode *wetonan* dan *sorogan* yang disebutkan terdahulu, maka metode hafal pun menempati kedudukan yang penting di dunia pesantren. Pelajaran-pelajaran tertentu dengan materi-materi tertentu diwajibkan untuk dihafal. Misalnya dalam pelajaran Al-Qur'an dan Hadis, ada sejumlah ayat-ayat yang wajib dihafal oleh santri begitu juga hadis. Demikian juga dalam bidang pelajaran lainnya: fikih, bahasa Arab, tafsir, tasawuf, akhlak dan lain-lain. Hafalan-hafalan tersebut biasanya berbentuk nazam (*sy'a'ir*). Misalnya kaidah-kaidah nahwu seperti *Alfiyah ibnu Malik*, merupakan bagian yang mesti dihafal oleh santri, begitu juga nazam dari pelajaran lainnya.



Selain dari itu dilaksanakan pula bentuk musyawarah, yakni mendiskusikan pelajaran yang sudah dan yang akan dipelajari. Musyawarah bertujuan untuk memahami materi pelajaran yang telah diberikan oleh ustadz atau *musytahiq*.

Bagi pesantren yang tergolong pesantren *khalafi*, maka metode *sorogan* dan *wetonan* bukan satu-satunya metode pengajaran, mereka telah menggunakan metode-metode pengajaran, sebagaimana yang digunakan pada sekolah-sekolah umum. Suasana kehidupan belajar dan mengajar berlangsung sepanjang hari, dan malam berada dalam proses belajar. Demikian pula kiai berada dalam suasana mengajar. Hubungan antara kiai dan santri sama halnya hubungan antara orangtua dan anak.

Penanaman akhlak sangat dipentingkan di dunia pesantren. Akhlak kepada sesama teman, kepada masyarakat sekitar, terlebih-lebih kepada kiai. Terhadap sesama teman dijaga betul sehingga tidak timbul sengketa, dan ukhuwah islamiyah selalu dijaga. Terhadap masyarakat sekitar perlu dijaga, agar citra pesantren tidak luntur di mata masyarakat. Akhlak terhadap kiai sangat diutamakan, sebab durhaka kepada kiai bisa ber-akibat tidak berkahnya ilmu. Jadi, dalam kehidupan pesantren, penghormatan kepada kiai menempati posisi penting. Nasihat-nasihat, petuah-petuah kiai selalu diperhatikan.

Hubungan antara santri dan kiai tidak hanya berlaku selama santri berada dalam lingkungan pesantren, hubungan tersebut berlanjut kendatipun santri tidak lagi berada secara formal di pesantren. Pada waktu-waktu tertentu bekas santri mendatangi kiai (*sowan*). Selain daripada itu, hubungan santri dengan kiai tidak hanya menyangkut dalam hal yang





mengenal apa yang disebut dengan ilmu umum dan begitu juga sistem penyampaian belum bersifat klasikal, melainkan masih memakai sistem *wetonan* dan *sorogan*.

Masuknya peradaban Barat ke Indonesia melalui kaum penjajah Belanda banyak memengaruhi corak dan pandangan bangsa Indonesia termasuk dalam dunia pendidikan, sehingga dengan demikian timbul upaya-upaya pembaruan dalam dunia pendidikan Islam. Sistem klasikal mulai diterapkan dan mata pelajaran umum mulai diajarkan. Akan tetapi persentase lembaga pendidikan Islam yang melaksanakan ide-ide pembaruan pendidikan ini masih sangat sedikit, terbatas dalam kelompok-kelompok apa yang disebut oleh Deliar Noer sebagai kelompok ulama pembaru di Sumatera Barat.

Ide-ide yang timbul dari ulama pembaru itu muncullah sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang telah menerapkan prinsip-prinsip baru, yang berbeda dengan pendidikan tradisional sebelumnya lahirilah Sekolah Adabiyah di Padang, Surau Jembatan Besi di Padang Panjang, Sumatera Thawalib juga di Padang Panjang.

Perbedaan sekolah-sekolah yang disebutkan di atas dengan sekolah-sekolah tradisional adalah: *pertama*, sekolah-sekolah ini telah memakai sistem klasikal. Murid-murid tidak lagi melingkar (*halaqah*) di sekitar guru sebagaimana sekolah tradisional. *Kedua*, sebagian dari sekolah ini yaitu Sekolah Adabiyah telah memasukkan mata pelajaran umum, jadi tidak lagi hanya melulu mata pelajaran agama. Adapun Surau Jembatan Besi telah menekankan pengajaran kepada ilmu-ilmu alat berupa kemampuan untuk menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Tekanan kepada pelajaran

ilmu alat ini diharapkan siswanya dapat mempelajari sendiri serta menggali sendiri kitab-kitab yang diperlukan, sehingga dengan demikian siswa dapat mengenal Islam dari sumber aslinya Al-Qur'an dan Al-Hadis (Noer, 1980: 52-53).

Adapun Sumatera Thawalib menerapkan soal-soal ke-masyarakatan, sehingga di tempat ini berdiri persekutuan (persaiyoan), dikenal dengan nama perkumpulan sabun. Perkumpulan ini berusaha memenuhi keperluan sehari-hari para pelajar. Di samping itu, cara mengajar modern pun diperkenalkan di sekolah ini oleh Haji Jalaluddin Thaib (Noer, 1980: 55).

Berbeda halnya dengan pesantren-pesantren di tempat lain, misalnya di Jawa, pada sekitar awal abad ke-20 sampai permulaan kemerdekaan Republik Indonesia, pada umumnya pesantren masih bersifat tradisional, baik menyangkut sarana, sistem penyampaian, maupun materi pelajaran.

Gambaran pesantren di Jawa seperti yang dikemukakan di atas bukan berlaku untuk seluruh pesantren, ada juga di antaranya yang telah memasukkan ide-ide pembaruan, seperti halnya pesantren Tebuireng, pimpinan K.H. Hasyim Asy'ari. Di pesantren ini atas inisiatif K.H. Muh. Ilyas, keponakan K.H. Hasyim Asy'ari, dan K.H. Abdul Wahid Hasyim, putra beliau sendiri, telah berupaya mengadakan pembaruan.

Di pesantren ini atas persetujuan KH. Hasyim Asy'ari telah dimasukkan mata pelajaran umum seperti membaca dan menulis huruf latin, ilmu bumi, sejarah dan bahasa Melayu diizinkan masuk ke pesantren (Steenbrink, 1986: 69-70).

Oleh karena kebanyakan pesantren masih bersifat konservatif, maka di tahun 1930-an timbul polemik antara yang





pro dan kontra, di antara cendekiawan Indonesia yang berpendidikan Barat. Di antara yang pro termasuk di dalamnya Dr. Sutomo, beliau melihat bahwa pesantren adalah sebagai wadah integrasi kultural, tidak saja dalam arti integrasi nilai di antara para santri dan berbagai latar belakangnya, tetapi juga integrasi antara santri dan masyarakat sekitar (Rahardjo, 1985: x). Selain dari itu pula Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional sebagai salah seorang tokoh yang menyokong sistem pendidikan pesantren.

Dari kalangan cendekiawan yang berpendidikan Barat yang kontra adalah Sutan Takdir Ali Syahbana. Takdir melihat yang penting baginya adalah tersebarnya ilmu pengetahuan modern sampai ke desa-desa dan itu akan berarti robohnya tradisi lama, terpecahnya persatuan yang statis dan pasif, lenyapnya konservatisme. Takdir hanya setuju kalau pesantren berfungsi seperti itu, katanya:

"Saya hanya dapat setuju dengan sistem pesantren seperti dipropagandakan itu, apabila maksudnya teristimewa dengan jalan semudah-mudahnya dan secepat-cepatnya membasmi buta huruf dan membawa pengetahuan ke desa. Sebabnya, oleh kepandaian membaca dan menulis dan pengetahuan modern, akan terbukalah mata orang di desa. Terbuka mata berarti robohnya tradisi yang lama, robohnya pujaan kepada kiai, hidupnya individu manusia seorang-orang tetapi terpecahnya persatuan yang statis, yang pasif, lenyapnya konservatisme." (Rahardjo, 1985: xi)

Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman, terutama setelah Indonesia merdeka, telah timbul perubahan-perubahan dalam dunia pesantren. Telah banyak di antara pesantren yang telah menyesuaikan diri dengan kemajuan

zaman tersebut, kendatipun di sana sini masih ditemukan juga pesantren yang masih bersifat konservatif.

Timbulnya polarisasi pesantren atas lima klasifikasi yang telah diuraikan terdahulu, menunjukkan bahwa telah terjadi dinamika dalam dunia pesantren terutama setelah masa kemerdekaan. Walaupun telah terjadi dinamika dalam dunia pesantren, pesantren berada pada fungsi aslinya, yakni sebagai lembaga pendidikan guna mencetak tenaga ahli keagamaan Islam. Sebagai suatu lembaga pendidikan yang hidup di tengah-tengah arus modernisasi, maka agar eksistensinya tetap bisa dipertahankan maka ada baiknya dikutip pendapat Nurcholish Madjid.

Pesantren diwajibkan oleh tuntutan-tuntutan hidup anak didiknya kelak dalam kaitannya dengan perkembangan zaman, untuk membekali mereka dengan kemampuan-kemampuan nyata yang dapat melalui pendidikan atau pengajaran pengetahuan umum secara memadai. Di bagian ini pun sebagaimana layaknya yang terjadi sekarang harus tersedia kemungkinan mengadakan pilihan-pilihan jurusan bagi anak didik sesuai dengan potensi buat mereka. Jadi tujuan pendidikan pesantren kiranya berada di sekitar terbentuknya manusia yang memiliki kesadaran setinggi-tingginya akan bimbingan agama Islam. *Weltanschauung* yang bersifat menyeluruh, dan diperlengkapi dengan kemampuan setinggi-tingginya untuk mengadakan responsi terhadap tantangan-tantangan dan tuntutan-tuntutan hidup, dalam konteks ruang dan waktu yang ada di Indonesia dan dunia abad sekarang (Madjid, 1985: 15).



## B. SEKOLAH

### 1. Pengertian

W.J.S. Poerwadarminto dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* menerangkan arti sekolah:

- Bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar.
- Waktu atau pertemuan ketika murid-murid diberi pelajaran.
- Usaha menuntut kepandaian (ilmu pengetahuan) (*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1990: 796).

Dalam buku-buku mengenai teori pendidikan dijelaskan bahwa sekolah merupakan salah satu dari tripusat pendidikan di samping rumah tangga dan masyarakat. Walaupun ketiganya dikelompokkan kepada lingkungan atau meliputi pendidikan, namun dari segi-segi teknis pelaksanaan pendidikan terdapat perbedaan antara satu dan yang lainnya.

Sekolah menitikberatkan kepada pendidikan formal, di sekolah prosedur pendidikan telah diatur sedemikian rupa, ada guru, ada siswa, ada jadwal pelajaran yang berpedoman kepada kurikulum dan silabus, ada jam-jam tertentu waktu belajar serta dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendidikan serta perlengkapan-perengkapan dan peraturan-peraturan lainnya.

Lingkungan masyarakat, menitikberatkan pendidikan kepada pendidikan nonformal, sedangkan lingkungan rumah tangga lebih berorientasi kepada pendidikan informal.

Sekolah pada hakikatnya adalah bertujuan untuk membantu orangtua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik dan menambahkan budi pekerti yang baik, juga diberikan pen-

didikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar dapat diberikan oleh rumah (Sutari, 1986: 142).

Dengan demikian, sebenarnya pendidikan di sekolah adalah bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. Di samping itu, kehidupan di sekolah merupakan jembatan bagi anak untuk menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat.

Sekolah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah lembaga pendidikan yang menekankan inti pelajaran kepada pelajaran umum, bukan mata pelajaran agama sebagaimana di pesantren dan madrasah. Dijadikan sekolah sebagai objek pembahasan karena di sekolah diajarkan pendidikan agama, maka dikaitkanlah sekolah sebagai salah satu dari lembaga pendidikan Islam.

### 2. Pendidikan Agama di Sekolah Umum

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, sikap hidup religius ini telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala. Bekas-bekas peninggalan sejarah menunjukkan bukti nyata terhadap sikap tersebut.

Pada tanggal 1 Juni 1945, di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, Soekarno yang kemudian menjadi presiden pertama Republik Indonesia, mengatakan bahwa betapa pentingnya setiap bangsa Indonesia bertuhan, dan mengajak setiap bangsa Indonesia mengamalkan agamanya masing-masing. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, ditetapkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila.





Sila pertama itu merupakan perwujudan dari sikap hidup yang religius tersebut. Salah satu pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar itu pulalah maka di dalam batang tubuh UUD 1945 diatur hal yang berkenaan dengan Ketuhanan, yakni pada Pasal 29 ayat 1 dan 2.

Ayat 1: Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ayat 2: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaan itu.

Untuk merealisasi sikap hidup yang agamais dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pemerintah pada tanggal 3 Januari 1946 membentuk Kementerian Agama. Tugas utama dari Kementerian Agama adalah mengurus soal-soal yang berkenaan dengan kehidupan beragama bagi seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu di antaranya masalah pendidikan agama.

Ruang lingkup pendidikan agama yang dikelola oleh Kementerian Agama tidak hanya terbatas pada sekolah-sekolah agama—pesantren dan madrasah—tetapi juga menyangkut sekolah-sekolah umum. Upaya-upaya untuk melaksanakan pendidikan agama di sekolah umum telah dimulai sejak adanya rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP), di antara usul badan tersebut kepada Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan adalah termasuk masalah pengajaran agama, madrasah, dan pesantren.

Mengenai ini usul badan pekerja sebagai berikut:

Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang teratur saksama, hingga cukup mendapat perhatian yang semestinya, dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak mengikuti kepercayaan yang dipilihnya. Tentang cara melakukan ini baiklah kementerian mengadakan perundingan dengan badan pekerja. Madrasah dan pesantren-pesantren yang pada hakikatnya adalah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang sudah berurat berakar dalam masyarakat Indonesia umumnya hendaklah pula mendapat perhatian dan bantuan yang nyata dengan berupa tuntutan dan bantuan material dari pemerintah (Poerbakawatja, 1970: 38).

Usul badan pekerja itu baru dapat dilaksanakan pada masa Menteri PP dan K dipegang oleh Mr. Suwandi (2 Oktober 1946–27 Juni 1947), dengan jalan membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara. Hasil kerja Panitia Penyelidik Pengajaran yang menyangkut agama sebagai berikut:

- a. Pelajaran agama dalam semua sekolah diberikan pada jam pelajaran sekolah.
- b. Para guru dibayar oleh pemerintah.
- c. Pada sekolah rakyat, pendidikan ini diberikan mulai kelas IV.
- d. Pendidikan itu dilaksanakan seminggu sekali pada jam tertentu.
- e. Para guru diangkat oleh Departemen Agama.
- f. Para guru agama diharuskan juga cakap dalam pendidikan umum.





- g. Pemerintah menyediakan buku untuk pendidikan agama.
- h. Diadakan latihan bagi para guru agama.
- i. Kualitas pesantren dan madrasah harus diperbaiki.
- j. Pengajaran bahasa Arab tidak dibutuhkan (Poerbakawatja, 1970: 41).

Peraturan resmi mengenai pendidikan agama di sekolah umum dimulai dengan dikeluarkannya peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri PPK:

Djakarta 2 Desember 1946 No. 1142/Bag. A (Pengajaran)

Yogyakarta 2 Desember 1946 No. 1285/K-7 (Agama)

Dan kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 dan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 Bab XII Pasal 20 tentang pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri, berbunyi:

- 1) Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
- 2) Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.

Untuk merealisasi bunyi ayat 2 di atas maka dikeluarkanlah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama:

No. 1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan)

No. K.I/651. Tanggal 20 Januari 1951 (Agama)

Peraturan ini terdiri dari 11 pasal, yang intinya adalah:

Pendidikan Agama diberikan di sekolah rendah dan sekolah lanjutan. Di sekolah rendah pendidikan agama dimulai di kelas empat sebanyak dua jam dalam satu minggu. Adapun di lingkungan istimewa pendidikan agama dapat dimulai pada kelas satu dan lama belajarnya tidak boleh lebih dari empat jam seminggu. Di sekolah lanjutan tingkat pertama dan atas, baik di sekolah-sekolah umum maupun sekolah-sekolah vak diberikan pendidikan agama dua jam tiap-tiap minggu. Pendidikan agama yang diberikan sesuai dengan agama murid dan jumlah murid yang mengikuti pelajaran agama dalam satu kelas sekurang-kurangnya 10 orang untuk agama tertentu. Selama berlangsung pendidikan agama, murid yang beragama lain boleh meninggalkan kelas. Guru-guru agama diangkat oleh Menteri Agama dan begitu juga pembiayaan menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Bahan pelajaran ditetapkan oleh Kementerian Agama setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (Poerbakawatja, 1976: 370-378).

Peraturan bersama yang dikeluarkan tanggal 20 Januari 1951 ini sekaligus berfungsi mencabut Penetapan Bersama Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama tanggal 2 Desember 1946.

Sebagai bahan lanjutan dari peraturan bersama ini, maka pada tanggal 16 Juli 1951 dikeluarkan lagi peraturan bersama dengan nomor surat masing-masing:

No. 17678/Kab. Tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan)

No. K/1/1980 Tanggal 16 Juli 1951 (Agama)



Isi dari peraturan bersama ini adalah: memperbaiki peraturan bersama yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 1951:

No.1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan)

No. K.I/651. Tanggal 20 Januari 1951 (Agama)

Pada prinsipnya, kedua peraturan tersebut, yaitu peraturan yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 1951, dengan peraturan berikutnya tanggal 16 Juli 1951 adalah sama hanya terdapat perbaikan pada poin khusus tanpa ada perubahan yang prinsipel.

Peraturan Bersama tanggal 16 Juli 1951 diiringi dengan keluarnya Instruksi Pelaksana Bersama, tanggal 14 Oktober 1951 dengan nomor surat masing-masing:

No.36923/Kab. Tanggal 14 Oktober 1952 (Pendidikan)

No.K/I/15773. Tanggal 14 Oktober 1952 (Agama)

Instruksi bersama itu memuat 10 pasal meliputi hal yang berkenaan dengan: guru agama, persiapan pengajaran agama di Sekolah Rakyat dan Sekolah Lanjutan, formulir, lingkungan istimewa, pengawasan, tempat latihan beribadat, nilai pengajaran agama, kerja sama dan pengajaran agama di sekolah Partikulir (Sastromidjojo, 1952: 39-41).

Setelah gagalnya gerakan G-30-S-PKI melakukan pemberontakan pada tahun 1965, pemerintah dan rakyat Indonesia semakin menunjukkan perhatian yang besar terhadap pendidikan agama, sebab disadari dengan bermentalkan agama yang kuatlah bangsa Indonesia akan terhindar dari paham komunis. Untuk merealisasi cita-cita tersebut maka sidang umum MPRS tahun 1966 No. XXVII/MPRS/1966,

Pasal I menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar sampai universitas-universitas negeri.

Di samping itu TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966, Pasal 4 tentang isi pendidikan semakin memperkuat pendidikan agama, yakni pada poin (a) yang berbunyi: Mempertinggi mental-moral-budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.

Penetapan-penetapan ini semuanya semakin menguatkan status dan kedudukan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.

Ketetapan MPRS ini diikuti dengan lahirnya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Oktober 1967, di mana ditetapkan bahwa kelas I dan II sekolah dasar diberikan mata pelajaran agama dua jam perminggu, kelas III, tiga jam perminggu, dan kelas IV, empat jam seminggu. Hal ini berlaku juga bagi SMP dan SMA. Adapun di perguruan tinggi diberikan dua jam perminggu (Steenbrink, 1986: 94).

Kedudukan pendidikan agama semakin kuat setelah ditetapkannya tujuan pendidikan nasional dalam UU No. 2 Tahun 1989 (undang-undang tentang sistem pendidikan nasional).

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta tanggung





jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Bab II Pasal 4 UUS-PN No 2 Tahun 1989).

Dalam undang-undang tersebut juga dicantumkan tentang kedudukan pendidikan agama, yaitu: Bab IX Pasal 39, ayat 2, tentang isi kurikulum. Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:

- a. Pendidikan Pancasila.
- b. Pendidikan Agama.
- c. Pendidikan Kewarganegaraan.

Setelah diberlakukan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang baru, yakni UU No. 20 Tahun 2003, kedudukan pendidikan agama di sekolah semakin kukuh dengan dicantumkannya bahwa pendidikan agama adalah sebagai salah satu hak peserta didik, yang tertera pada Bab V, Pasal 12 (1) a, yang berbunyi: "Setiap peserta didik dalam satuan pendidikan berhak: a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama." (UU No. 20 Tahun 2003 Bab V, Pasal 12)

Seterusnya dalam Pasal 37 (1) kurikulum pendidikan dasar dan menengah, salah satu pelajaran yang wajib diajarkan adalah pendidikan agama, begitu juga pada kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama (UU No. 20 Tahun 2003, Bab X Pasal 37).

Berdasarkan ketentuan di atas jelaslah betapa penting dan strateginya kedudukan pendidikan agama di Indonesia.

## C. MADRASAH

### 1. Pengertian Madrasah

Perkataan Madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah tempat belajar (Ibrahim Anis, 1972: 280). Padanan Madrasah dalam bahasa Indonesia adalah sekolah lebih dikhususkan lagi sekolah-sekolah agama Islam (Ensiklopedi Indonesia, 1983: 2078). Dalam *Shorter Encyclopaedia of Islam*, diartikan: "*Name of an Institution where the Islamic science are studied*" (Gibb, 1961: 300). Artinya: Nama dari suatu lembaga di mana ilmu-ilmu keislaman diajarkan.

Dengan keterangan tersebut dapat dipahami bahwa madrasah tersebut adalah penekanannya sebagai suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Perkataan madrasah di tanah Arab ditujukan untuk semua sekolah secara umum, akan tetapi di Indonesia ditujukan buat sekolah-sekolah yang mempelajari ajaran-ajaran Islam. Madrasah pada prinsipnya adalah kelanjutan dari sistem pesantren.

Di dunia pesantren terkenal adanya elemen-elemen pokok dari suatu pesantren, yaitu: pondok, masjid, pengajian kitab-kitab klasik, santri, dan kiai. Kelima macam elemen itu merupakan pilar-pilar dari suatu pesantren. Pada sistem madrasah tidak mesti ada pondok, masjid, dan pengajian kitab-kitab klasik. Elemen-elemen yang diutamakan di madrasah: adanya lokal tempat belajar, guru, siswa, dan rencana pelajaran, pimpinan.

Berdasarkan ungkapan di atas dapat dipahami bahwa sistem madrasah mirip dengan sistem sekolah umum di Indonesia. Para siswa tidak mesti tinggal mondok di kompleks madrasah, siswa cukup datang ke madrasah pada jam-jam





berlangsung pelajaran pada pagi hari atau sore hari. Demikian juga halnya tidak mesti ada masjid di lingkungan madrasah, walaupun siswa bermaksud melaksanakan shalat, mereka melaksanakannya di musala. Pengajian kitab-kitab klasikpun tidak diadakan di madrasah. Pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan telah tercantum dalam daftar pelajaran yang diuraikan dari kurikulumnya.

Ditinjau dari segi tingkatannya, madrasah dibagi kepada:

- a. Tingkat ibtidaiyah (tingkat dasar).
- b. Tingkat tsanawiyah (tingkat menengah).
- c. Tingkat aliyah (tingkat menengah Atas).

## 2. Perkembangan Madrasah

Lembaga-lembaga pendidikan yang terkenal di dunia Islam pada zaman klasik adalah kuttap, masjid, dan madrasah. Ada juga yang membaginya kepada: maktab/kuttap, aljami', majelis ilmu atau majelis adab dan madrasah atau kuliah (Al-Ahwani, 63).

Kuttap adalah lembaga pendidikan tingkat rendah, tempat belajar, membaca, dan menulis Al-Qur'an. Al-jami' maknanya di sini adalah masjid. Masjid telah berfungsi sebagai tempat pendidikan semenjak zaman Rasulullah. Masjid Nabi di Madinah mempunyai aneka ragam fungsi, salah satu di antaranya adalah tempat pendidikan. Masa-masa selanjutnya fungsi masjid sebagai tempat pendidikan terus dipelihara, sehingga berdirilah sejumlah masjid di dunia Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pendidikan.

Majelis ilmu atau majelis adab merupakan tempat pertemuan yang dipimpin langsung oleh khalifah. Majelis ini telah tumbuh sejak zaman Umayyah dan berkembang pada zaman Abbasiyah.

Lembaga berikutnya adalah madrasah, madrasah adalah lembaga pendidikan yang tumbuh setelah masjid. Salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhnya madrasah adalah karena masjid telah penuh dengan tempat belajar dan hal ini sangat mengganggu aktivitas pelaksanaan ibadah shalat. Di samping itu, pengetahuan pun telah banyak pula berkembang disebabkan perubahan zaman dan kemajuan peradaban manusia. Karena itu ada di antara mata pelajaran itu untuk mempelajarinya diperlukan tanya jawab, perdebatan, dan pertukaran pikiran (Syalaby, 1976: 84).

Ada beberapa perbedaan pokok antara masjid dan madrasah di kala itu, yakni di dalam madrasah adanya *Iwan* yang dalam istilah sekarang disebut ruang kuliah, di samping itu bagi setiap madrasah adanya asrama-asrama untuk tempat tinggal pelajar. Pada madrasah, para gurunya diangkat secara resmi oleh pengelola madrasah, sedangkan jumlah muridnya lebih terbatas bila dibandingkan dengan masjid. Adapun di masjid murid-murid tidak terbatas, dan para guru yang mengajar di masjid tanpa diangkat secara resmi oleh siapa pun.

Di antara madrasah-madrasah yang termasyhur di dunia Islam adalah: Madrasah Nizamiyah didirikan pada tahun 457 H (1065 M), Madrasah Nuruddin Zinki, Madrasah Al-Mustanshiriyyah didirikan di Bagdad tahun 631 H (1234 M), Madrasah Nuriyah didirikan di Damaskus tahun 563 H (1167 M), dan sejumlah madrasah-madrasah lainnya.



Pada madrasah-madrasah tersebut diajarkan ilmu-ilmu 'aqliyah, *naqliyah*, *lisaniyah*, ilmu-ilmu 'aqliyah adalah ilmu yang bersumber dan bertolak dari asas pemikiran dan penelitian manusia seperti: ilmu pasti, kedokteran, filsafat dan sebagainya, sedangkan ilmu-ilmu *naqliyah* adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis seperti: tafsir, Hadis, fikih, tauhid, dan tasawuf. Adapun ilmu-ilmu *lisaniyah* ialah ilmu yang diucapkan oleh lisan (lidah), dengan kata lain ilmu-ilmu bahasa seperti nahwu, sharaf, mantiq, balaghah, dan 'arud.

Madrasah-madrasah ini berkembang baik di belahan timur seperti Irak, Iran, Siria, Palestina, Saudi Arabia, Mesir, maupun di belahan dunia Barat seperti Spanyol (Andalusia).

Tumbuh dan berkembangnya madrasah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide pembaruan di kalangan umat Islam. Di permulaan abad ke-20 timbul beberapa perubahan bagi umat Islam Indonesia dengan masuknya ide-ide pembaruan seperti yang telah diuraikan terdahulu.

Di antara ulama yang berjasa dalam menggagas tumbuhnya madrasah di Indonesia, antara lain Syekh Abdullah Ahmad, pendiri Madrasah Adabiyah di Padang pada tahun 1909. Pada tahun 1915 madrasah ini menjadi HIS Adabiyah yang tetap mengajarkan agama (Sumardi, 1978: 49).

Syekh M. Thaib Umar pada tahun 1910 mendirikan Madrasah School di Batu Sangkar. Tiga tahun kemudian madrasah ini ditutup, dan baru pada tahun 1918 dibuka kembali oleh Mahmud Yunus dan pada tahun 1923 madrasah

ini berganti nama dengan Diniyah School. Pada tahun yang sama Rangkyo Rahmah El Yunusiyah mendirikan Madrasah diniyah Putri di Padang Panjang, sebelumnya yaitu pada tahun 1915 Zainuddin Labai al-Yunusi mendirikan madrasah diniyah di Padang Panjang (Sumardi, 1980: 49). Madrasah diniyah inilah yang kemudian berkembang di Indonesia, baik merupakan bagian dari pesantren atau surau, maupun berdiri di luarnya.

Di kalangan organisasi Islam pun giat pula melaksanakan pembaruan dalam bidang pendidikan, tercatat di antaranya yang termasyhur adalah Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta oleh K.H. Ahamad Dahlan pada tanggal 18 November 1912.

Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tahun 1869 dengan nama Muhammad Darwis, anak dari Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman. Ia pergi ke Mekkah pada tahun 1890, di sana ia belajar lebih kurang setahun dan pada tahun 1903 ia mengunjungi kembali tanah suci dan menetap di sana lebih kurang dua tahun lamanya. Dahlan telah menghayati cita-cita pembaruan sekembalinya dari hajinya yang pertama (Noer, 1980: 85).

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang banyak bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, salah satu bidang garapannya yang banyak mendapat perhatian adalah bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan Muhammadiyah memakai sistem persekolahan modern waktu itu, dan dalam bidang ini mendapat kemajuan yang pesat, dapat dikemukakan di sini bahwa pada tahun 1925 di sekitar 13 tahun setelah berdirinya, Muhammadiyah telah mempunyai delapan Hollands Inlandse School, sebuah sekolah guru





di Yogyakarta. Selama 32 tahun sekolah dasar lima tahun, Sebuah Schakel School, 14 madrasah, seluruhnya 119 orang guru dan 4000 murid.

Pada tahun 1938 terdapat 852 cabang-cabang serta 898 kelompok (yang belum berstatus cabang), seluruhnya dengan 250.000 anggota. Ia pun memiliki 834 masjid dan langgar, 31 perpustakaan umum dan 1.774 sekolah (Noer, 1980: 95).

Organisasi lainnya adalah al-Irsyad didirikan di Jakarta pada tahun 1913. Lembaga ini mengasuh sekolah-sekolah umum dan agama, memiliki Madrasah Awaliyah (tiga tahun), Madrasah Ibtidaiyah (empat tahun), Madrasah Tajhiziyah (dua tahun), Madrasah Mu'allimin (empat tahun), dan Madrasah Takhassus (dua tahun).

Di Majalengka, Jawa Barat, berdiri organisasi Perhimpunan Umat Islam (PUI) didirikan oleh K.H.A. Halim pada tahun 1917. H.A. Halim lahir di Cebereng Majalengka pada tahun 1887, orangtuanya berasal dari keluarga yang taat beragama. Halim pergi ke Mekkah untuk melanjutkan pelajarannya pada usia 22 tahun.

Pada tahun 1932 dalam suatu kongres perserikatan ulama di Majalengka, Halim mengusulkan agar didirikan sebuah lembaga pendidikan, yang akan mengajarkan ilmu-ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, dan juga dilengkapi dengan pekerjaan tangan, perdagangan, dan pertanian, sesuai dengan bakat masing-masing (Noer, 1980: 82).

Untuk merealisasi keputusan kongres tersebut, maka didirikanlah suatu lembaga pendidikan yang bernama Santri Asrama, dibagi tiga bagian, tingkat permulaan, dasar dan lanjutan. Mata pelajaran yang diajarkan di sini di samping mata pelajaran agama dan umum juga diajarkan keterampilan se-

perti pertanian, pekerjaan tangan (besi dan kayu). Dari sini jelaslah ide Halim yang tidak menghendaki seorang Muslim mengejar akhirat saja dengan mengabaikan dunia.

Di Sumatera Barat pada tahun 1928 berdiri PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), dipelopori oleh Sulaiman Ar-Rasuli pemilik surau di Candung. Diperkirakan pada tahun 1942 sudah terdapat 300 sekolah PERTI dengan 45.000 orang murid (Steenbrink, 1986: 64-65).

Di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan, atas prakarsa guru-guru dan pelajar Maktab Islamiyah Tapanuli pada tahun 1930 didirikanlah organisasi Al-Jami'atul Washliyah. Organisasi ini pun banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Tiga orang yang merupakan pendorong paling penting dalam perkumpulan ini, yaitu: Abdur Rahman Syihab, Udin Syamsuddin, dan Arsyad Thalib Lubis.

Pada permulaan tahun 1933 dibentuk sebuah komisi yang bertugas mengadakan inspeksi ke semua madrasah Jami'atul Washliyah setiap enam bulan sekali, dan pada tahun 1934 disusun peraturan umum untuk inspeksi madrasah (Steenbrink, 1986: 81).

Seperti halnya Muhammadiyah, organisasi ini juga mendirikan dua sistem pendidikan, di satu pihak mendirikan sekolah-sekolah memakai sistem pendidikan gubernemen, di samping mengajarkan mata pelajaran umum juga mengajarkan mata pelajaran agama. Selain itu didirikan juga madrasah yang menitikberatkan mata pelajaran agama dapat di klasifikasikan: tajhiziyah (dua tahun), ibtidaiyah (empat tahun), tsanawiyah (dua tahun), Madrasah Qismul Ali (tiga tahun), Madrasah Takhassus (dua tahun).



Organisasi berikutnya yang juga besar peranannya dalam bidang pendidikan Islam di Sumatera Utara ialah Al-Ittihadiyah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1932. Sebagaimana halnya dengan organisasi Islam lainnya, Al-Ittihadiyah juga bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan. Sejumlah sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar, menengah pertama, dan atas banyak tersebar di Kota Madya Medan, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, dan kabupaten-kabupaten lainnya.

Nahdatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 oleh K.H. Hasyim Asy'ari juga banyak mendirikan madrasah dengan susunan sebagai berikut: madrasah awaliyah (dua tahun), Madrasah Ibtidaiyah (tiga tahun), Madrasah Tsanawiyah (tiga tahun), Madrasah Mu'allimin Wusta (dua tahun) dan Madrasah Mu'allimin 'Ulya (tiga tahun) (Noer, 1980: 81).

Di Bandung (Jawa Barat), didirikan Persatuan Islam (Persis) pada permulaan tahun 1920. Tokoh termasyhur dari organisasi ini adalah Ahmad Hasan, dilahirkan di Singapura pada tahun 1887, berasal dari keluarga campuran Indonesia dan India. Tokoh lainnya adalah Muhammad Natsir, lahir di Alahan Panjang (Sumatera Barat) pada tanggal 17 Juli 1908. Atas upaya Natsir didirikan sebuah lembaga pendidikan yang mengasuh sekolah taman kanak-kanak, HIS, MULO, dan sebuah sekolah guru. Di samping sekolah-sekolah di atas, PERSIS (Persatuan Islam) juga mendirikan sebuah pesantren di Bandung pada bulan Maret 1936. Kemudian pesantren ini dipindahkan ke Bangil (Jawa Timur) (Noer, 1980: 101-102).

Madrasah-madrasah yang disebutkan di atas, baik yang dikelola oleh organisasi maupun pribadi, belum menunjukkan keseragaman dalam berbagai hal seperti lamanya bela-

jar, jenjang pelajaran, dan kurikulum. Dalam perbandingan antara bobot mata pelajaran agama dan umum, juga berbeda antara satu madrasah dengan madrasah lainnya, ada yang mencantumkan perbandingan 30:70, 40:60, 50:50, 60:40, dan 70:30 dalam persentase (Sumardi, 1978: 52).

Setelah Indonesia merdeka, maka salah satu di antara departemen yang dibentuk adalah Departemen Agama sebagai perwujudan dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang religius. Departemen Agama didirikan pada tanggal 3 Januari 1946. Salah satu bidang garapan Departemen Agama adalah bidang pendidikan agama, seperti madrasah, pesantren, dan mengurus pendidikan agama di sekolah-sekolah umum.

Dalam rangka upaya meningkatkan madrasah, maka pemerintah melalui Kementerian Agama memberikan bantuan kepada madrasah dalam bentuk material dan bimbingan, untuk itu Kementerian Agama mengeluarkan peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1952.

Di dalam peraturan tersebut dicantumkan, yang dinamakan madrasah ialah: tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam menjadi pokok pengajaran. Menurut ketentuan ini juga jenjang pendidikan pada madrasah terdiri dari:

- a. Madrasah rendah, sekarang namanya disebut Madrasah Ibtidaiyah.
- b. Madrasah lanjutan tingkat pertama, sekarang disebut namanya dengan Madrasah Tsanawiyah.
- c. Madrasah lanjutan atas, sekarang disebut namanya Madrasah Aliyah.





Upaya pemerintah selanjutnya untuk meningkatkan status madrasah adalah dengan jalan menegerikan madrasah-madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat, baik berben-tuk pribadi maupun organisasi. Tercatat sejumlah ratusan madrasah swasta yang dijadikan madrasah negeri yang meli-puti tingkat ibtidaiyah dengan nama MIN (Ma-drasah Ibtidaiyah Negeri), tingkat tsanawiyah dengan nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN), dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN).

Dalam sejarah perkembangan madrasah di Indonesia tercatat pula bahwa pemerintah pernah mendirikan apa yang disebut madrasah wajib belajar atau MWB. Madrasah ini lama belajarnya delapan tahun, materi pelajaran terdiri dari mata pelajaran agama, umum, dan keterampilan dalam lapangan ekonomi, industri, dan transmigrasi.

Tujuan dari madrasah ini adalah agar setamat dari mad-rasah ini anak didik kembali ke desa untuk berproduksi atau bertransmigrasi dengan swadaya dan keterampilan yang di-perolehnya selama delapan tahun, di madrasah MWB. Kuri-kulum dari MWB merupakan keselarasan tiga perkembang-an, yaitu perkembangan otak dan akal, perkembangan hati atau perasaan, dan perkembangan tangan atau kedekatan/keterampilan (Sumardi, 1978: 62).

Dalam kenyataan konsepsi madrasah wajib belajar (MWB) tidak berjalan sebagaimana yang diprogramkan. Ada juga madrasah yang menamakan dirinya dengan madrasah wajib belajar, tetapi kegiatannya tidak sesuai dengan kuri-kulum MWB.

### 3. Madrasah sebagai Lembaga Pendidikan Islam

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950, madrasah mengandung makna:

- a. Tempat pendidikan yang diatur sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Is-lam menjadi pokok pengajarannya.
- b. Pondok dan pesantren yang memberi pendidikan seting-kat dengan madrasah (Poerbakawatja, 1976: 221).

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Tahun 1975, Bab I Pasal 1 menyebutkan:

"Yang dimaksud dengan madrasah dalam keputusan bersama ini ialah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberi-kan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajair-an umum."

Berdasarkan diktum-diktum di atas, baik Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1946 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 1950 maupun SKB Tiga Menteri Ta-hun 1975, dapat dipahami bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran pokok atau dasar, di samping itu juga diajarkan mata pelajaran umum.

Sistem dan isi madrasah diupayakan adanya pengga-bungan antara sistem pesantren dan sekolah umum. Penyusun ensiklopedi Indonesia, pada pasal yang membicarakan madrasah, memandang madrasah sebagai perpaduan antara pendidikan sistem pondok yang khusus mengajarkan agama Islam dan sistem pendidikan yang mengajarkan ilmu penge-tahuan umum.



Sejak lahirnya sistem madrasah di Indonesia, telah memiliki ciri khas yang membedakannya dari pesantren dan sekolah umum, yaitu upaya untuk mengonvergensi antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama. Dalam usaha memadukan itu tidak dapat kesamaan antara satu madrasah dan madrasah lainnya, seperti yang diungkapkan terdahulu.

Walaupun terdapat keanekaragaman dalam upaya menggabungkan antara mata pelajaran agama dan mata pelajaran umum, namun madrasah tetap sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadikan mata pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok atau dasar. Pengertian mata pelajaran pokok atau dasar adalah mata pelajaran yang menentukan dalam memberi penilaian terhadap status seorang siswa, baik pada waktu penentuan naik kelas maupun penentuan ujian akhir.

Dalam kurikulum madrasah disebutkan bahwa mata pelajaran agama terdiri dari:

- a. Al-Qur'an Hadis
- b. Aqidah Akhlak
- c. Fikih
- d. Sejarah dan Kebudayaan Islam
- e. Bahasa Arab

#### 4. Madrasah SKB Tiga Menteri

Madrasah SKB Tiga Menteri adalah hasil kesepakatan tiga departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hakikatnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga

Menteri Tahun 1975, Bab I Pasal 1 menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan madrasah dalam keputusan bersama ini ialah: lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum.”

Ada tiga kesimpulan pokok dari Madrasah SKB Tiga Menteri:

- a. Ijazah madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum setingkat.
- b. Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas.
- c. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat (Bab II Pasal 2 SKB Tiga Menteri 1975).

Dengan dilaksanakannya SKB Tiga Menteri berarti:

- a. Eksistensi madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam lebih mantap dan kuat.
- b. Pengetahuan umum pada madrasah lebih meningkat.
- c. Fasilitas fisik dan peralatan perlu lebih disempurnakan.
- d. Adanya *civil effect* terhadap ijazah madrasah.

Sebelum lahirnya SKB Tiga Menteri Tahun 1975, kita melihat adanya perbedaan yang mendasar antara lulusan madrasah dan sekolah umum. Perbedaan yang mendasar itu terlihat nyata sekali di dalam dua hal. *Pertama*, di dalam kesempatan untuk melanjutkan studi. Dalam hal ini lulusan madrasah tidak memiliki kesempatan untuk memasuki universitas negeri, mereka hanya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi agama seperti IAIN atau perguruan tinggi agama swasta. Setelah adanya SKB Tiga Menteri ini, maka lulusan





madrasah telah memiliki kesamaan dan kesetaraan dengan lulusan sekolah.

## 5. Madrasah pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989

Periode ini adalah periode di mana madrasah telah berada di bawah aturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 Tahun 1989) dan diatur pula oleh peraturan pemerintah yang berkaitan dengan ini adalah PP No. 28 dan 29. Selanjutnya untuk menindaklanjuti pelaksanaan peraturan pemerintah itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama masing-masing mengeluarkan surat keputusan. Menteri Pendidikan mengeluarkan surat Keputusan No. 489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum, sedangkan Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah. Selanjutnya Menteri Agama mengeluarkan pula Surat Keputusan No. 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah (MA), dan Surat Keputusan No. 374 Tahun 1993 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Keagamaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28, dan 29, serta diikuti oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama, dapat diketahui bahwa madrasah adalah sekolah yang berciri khas agama Islam. Berkenaan dengan ini, maka Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah memiliki kurikulum yang sama dengan sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, ditambah dengan ciri keislamannya yang tertuang dalam kurikulum, yaitu memiliki mata pelajaran agama yang lebih dari sekolah.

Sesuai pula dengan PP No. 29, yang membagi pendidikan menengah tersebut kepada beberapa jenis, maka dalam hal ini madrasah pada tingkat aliyah dibagi kepada dua jenis: *pertama*, Madrasah Aliyah (MA), yang ini adalah sama dengan SMU (sekolah menengah umum) yang berciri khas agama Islam. Disebabkan itulah seluruh sistem Madrasah Aliyah tersebut sama dengan sekolah umum. Hak dan *civil effect*-nya juga sama. Selanjutnya Madrasah Aliyah Keagamaan. Madrasah ini diperuntukkan sesuai dengan maksud yang tertera PP No. 29 Tahun 1990, Bab I Pasal 1 ayat 4. Pendidikan menengah keagamaan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan. MAK (Madrasah Aliyah Keagamaan) tidak terealisasi sebagai sebuah lembaga pendidikan sampai berakhir UU No. 2 Tahun 1989.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan, yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Undang-undang ini terdiri dari XX bab dan 59 Pasal. Berisikan: ketentuan umum, dasar fungsi dan tujuan, hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, satuan jalur dan jenis pendidikan, jenjang pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan kurikulum, hari belajar dan libur sekolah, bahasa pengantar, penilaian, peran serta masyarakat, badan pertimbangan pendidikan nasional, pengolahan, pengawasan, ketentuan lain, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.





Di dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12, 13, dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah tentang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Berkenaan dengan itu lahirlah:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Peraturan pemerintah yang terkait dengan madrasah adalah PP No. 28 dan 29 Tahun 1990. Di dalam PP No. 28 Tahun 1990 disebutkan pada Bab III Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa: Sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum. Dan untuk penyelenggaraan madrasah dilimpahkan kepada Menteri Agama. Berdasarkan pelimpahan tersebut maka Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Madrasah Aliyah, yaitu Keputusan Menteri Agama No. 370 Tahun 1993. Di dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa Madrasah Aliyah (MA)

adalah sekolah menengah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 membagi pendidikan menengah kepada: pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah keagamaan, pendidikan menengah kedinasan, dan pendidikan menengah luar biasa (PP No. 29 Bab I Pasal 1).

## 6. Madrasah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Fungsi, peranan, dan status madrasah secara substansial pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ini tidak berbeda dengan madrasah pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Hanya saja dilihat dari yuridisnya, madrasah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 lebih kuat dan kukuh, karena penyebutan nomenklatur madrasah masuk dalam batang tubuh undang undang, berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, peristilahan madrasah hanya diatur pada peraturan pemerintah dan surat keputusan menteri.

Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990. Adapun perkataan Madrasah Aliyah disebutkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 489/U/1992. Perkataan madrasah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dapat ditemukan secara eksplisit pada Pasal 17 dan 18.

Pasal 17: Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.





Di dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 12, 13, dan 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan pemerintah tentang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Berkenaan dengan itu lahirilah:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
- b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.

Peraturan pemerintah yang terkait dengan madrasah adalah PP No. 28 dan 29 Tahun 1990. Di dalam PP No. 28 Tahun 1990 disebutkan pada Bab III Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa: Sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah.

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum. Dan untuk penyelenggaraan madrasah dilimpahkan kepada Menteri Agama. Berdasarkan pelimpahan tersebut maka Menteri Agama menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Madrasah Aliyah, yaitu Keputusan Menteri Agama No. 370 Tahun 1993. Di dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa Madrasah Aliyah (MA)

adalah sekolah menengah umum yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 membagi pendidikan menengah kepada: pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, pendidikan menengah keagamaan, pendidikan menengah kedinasan, dan pendidikan menengah luar biasa (PP No. 29 Bab I Pasal 1).

## 6. Madrasah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

Fungsi, peranan, dan status madrasah secara substansial pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 ini tidak berbeda dengan madrasah pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989. Hanya saja dilihat dari yuridisnya, madrasah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 lebih kuat dan kukuh, karena penyebutan nomenklatur madrasah masuk dalam batang tubuh undang undang, berbeda halnya dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, peristilahan madrasah hanya diatur pada peraturan pemerintah dan surat keputusan menteri.

Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990. Adapun perkataan Madrasah Aliyah disebutkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 489/U/1992. Perkataan madrasah pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dapat ditemukan secara eksplisit pada Pasal 17 dan 18.

Pasal 17: Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat.





Pasal 18: Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), sekolah mene-ngah kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

## BAB 2

# PERANAN PESANTREN DALAM MENCIPTAKAN MASYARAKAT MADANI

## A. PENDAHULUAN

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang sudah berdiri sejak ratusan tahun yang lalu. Di lembaga inilah di-ajarkan dan dididikkan ilmu dan nilai-nilai agama kepada santri. Pada tahap awal pendidikan di pesantren tertuju se-mata-mata mengajarkan ilmu-ilmu agama saja lewat kitab-kitab klasik atau kitab kuning. Ilmu-ilmu agama yang terdiri dari berbagai cabang diajarkan di pesantren dalam bentuk *wetonan*, *sorogan*, hafalan, ataupun musyawarah (*muzaka-rah*). Pada tahap awal juga sistemnya berbentuk nonformal, tidak dalam bentuk klasikal, serta lamanya santri di pesan-tren tidak ditentukan oleh tahun, tetapi oleh kitab yang di-baca. Biasa juga seorang santri berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lainnya, untuk mendalami ilmu yang lebih spesifik dari pesantren yang bersangkutan, dan biasa juga bagi santri yang memiliki kemampuan ekonomi me-lanjutkan pelajaran ke Mekkah atau ke Mesir (Kairo).

Ciri yang paling menonjol pada pesantren tahap awal tersebut adalah pendidikan dan penanaman nilai-nilai aga-ma kepada para santri lewat kitab-kitab klasik, selanjutnya setelah masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke In-





Indonesia, turut serta terjadinya perubahan dalam bidang pendidikan. Pendidikan pesantren yang pada mulanya hanya berorientasi kepada pendalaman ilmu agama semata-mata mulai dimasukkan mata pelajaran umum. Masuknya mata pelajaran umum ini diharapkan untuk memperluas cakrawala pikir para santri dan agar para santri dapat mengikuti ujian negara yang diadakan oleh pemerintah.

Selain dari itu, di dunia pesantren juga telah diperkenalkan berbagai bentuk keterampilan. Dengan demikian, ada tiga “H” yang dididikan kepada santri saat sekarang ini, yaitu “H” pertama, *head* artinya kepala, maknanya mengisi otak santri dengan ilmu pengetahuan, “H” kedua, *heart* yang artinya hati, maknanya mengisi hati santri dengan iman dan takwa, dan “H” yang ketiga, *hand* artinya tangan pengertiannya adalah memberi pendidikan keterampilan.

Dengan berdasarkan kemampuan ketiga “H” tersebut, pesantren saat sekarang ini akan berperan sebagai lembaga pendidikan Islam yang mencetak kader ulama, bangsa, dan negara.

## 1. Mengenal Pesantren

Di awal telah diperkenalkan tentang pengertian pesantren, baik dari segi pengertian maupun pola-polanya. Pada awalnya pesantren itu hanya mengajarkan ilmu agama Islam yang terdapat pada kitab-kitab klasik (kuning). Akan tetapi, karena perkembangan zaman maka pesantren telah tumbuh dan berkembang menjadi beberapa pola seperti yang telah diuraikan terdahulu dalam buku ini. Yang setiap pola memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Makna yang terkandung di sini adalah Pola I mempunyai karakteristik yang berbeda

dengan pola-pola lainnya, begitu juga sebaliknya. Kalau Pola I dapat digolongkan kepada pesantren tradisional, tidak demikian halnya dengan Pola III, yang sudah dapat dikatakan pesantren modern.

Dinamika dan pertumbuhan pesantren ini disebabkan terjadinya arus perkembangan zaman. Sesuai dengan arus dinamika zaman, pemahaman terhadap pesantren pun berubah pula. Kalau pada tahap awalnya pesantren diartikan sebagai lembaga pendidikan tradisional, tetapi saat sekarang menempatkan pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional saja tidak lagi selamanya benar. Dari pola-pola pesantren yang telah dikemukakan terdahulu terlihat bahwa tidak selamanya pendidikan pesantren saat sekarang ini digolongkan kepada pendidikan tradisional.

Berdasarkan hal tersebut, secara garis besar pesantren dibagi kepada dua bagian, pertama, pesantren tradisional (*salafi*); kedua, pesantren modern (*khalafi*).

## 2. Hakikat Pendidikan Islam

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta. Potensi jasmaniah manusia adalah yang berkenaan dengan seluruh organ-organ fisik manusia. Adapun potensi rohani manusia itu meliputi kekuatan yang terdapat di dalam batin manusia, yakni akal, kalbu, nafsu, roh, fitrah. Asy-Syaibani menyatakan bahwa manusia itu memiliki potensi yang meliputi badan, akal, dan roh,





ketiga-tiganya persis seperti segitiga yang sama panjang sisi-sisinya (Asy-Syaibani: 92). Adapun Hasan Langgulung menyebutkan potensi manusia itu: fitrah, roh, kemauan bebas, dan akal (Hasan Langgulung: 57-58). Potensi ini semua telah ada pada batin manusia sejak manusia itu lahir ke dunia dan ia telah *built in* dalam diri pribadi manusia. Atas dasar itulah, apabila dikaitkan hakikat pendidikan yang berperan untuk mengembangkan potensi manusia maka sudah pada tempatnyalah seluruh potensi manusia itu dikembangkan semaksimal mungkin. Bertolak dari potensi manusia tersebut, maka paling tidak ada beberapa aspek pendidikan yang perlu dididikkan kepada manusia, yaitu aspek pendidikan ketuhanan dan akhlak, pendidikan akal dan ilmu pengetahuan. Pendidikan kejasmanian, kemasyarakatan, kejiwaan, keindahan, dan keterampilan. Kesemuanya diaplikasikan secara seimbang. Hal ini sesuai pula dengan hasil konferensi dunia tentang pendidikan Islam.

Selanjutnya kita ingin berbincang tentang masyarakat madani. Apa yang dimaksud dengan masyarakat madani? Komarudin Hidayat menjelaskan bahwa Nurcholish Madjid yang menggelindingkan istilah masyarakat madani yang terbakukan dengan nama yayasan Paramadina (terdiri dari arti para dan madina atau parama dan dina). Secara semantik artinya kira-kira ialah sebuah agama (dina) yang *excellent* (*paramount*) misinya untuk membangun sebuah peradaban (madania) (Hidayat, 2002: 1-2). Menurut Nurcholish juga, masyarakat madani itu adalah masyarakat yang mengacu kepada masyarakat Madinah yang berada di bawah pimpinan Rasulullah di Madinah.

Beliau membangun tatanan kehidupan masyarakat yang berperadaban. Jika masyarakat Madinah di bawah pimpinan Rasulullah yang menjadi acuan bagi masyarakat madani itu, maka perlulah diketahui beberapa ciri-ciri dari masyarakat Madinah itu, yaitu:

1. Masyarakat Rabbaniyah, semangat berketuhanan yang dilandasi tiga pilar, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Ketiga pilar menyatu menjadi satu, ibarat tali berpilin tiga yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain dan saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya pula. Di zaman Rasulullah setiap pribadi Muslim memanifestasikannya dalam pribadi masing-masing.
2. Masyarakat yang demokratis, di mana Rasul dan para sahabatnya mentradisikan musyawarah dalam segala persoalan, dan Rasulullah tidak berkeberatan menarik pendapatnya apabila ada pendapat yang lebih baik. Masyarakat egalitarian, memandang sama manusia di depan hukum, bahkan Beliau pernah bersabda: "Seandainya Fatimah mencuri niscaya akan kupotong tangannya". Masyarakat demokrasi dan egalitarian itu juga tercermin dalam sikap kaum Muslimin, dicerminkan dengan pemilihan khalifah yang tidak berdasarkan kepada sistem monarki, tetapi lebih condong kepada sistem demokrasi yang dilakukan oleh negara-negara modern sekarang. Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali terpilih menjadi kepala negara dan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi.
3. Masyarakat yang toleran, masyarakat Madinah adalah masyarakat yang plural, dari segi suku mereka ter-



diri dari berbagai etnik. Qabilah Auz dan Khazraj adalah suku guru dari kelompok Ansor, sedangkan Suku Quraish yang berasal dari Mekkah adalah orang-orang Muhajirin. Dari sisi agama selain dari Islam ada Yahudi dan lain sebagainya. Kehidupan toleran itu diikat oleh Rasulullah dalam satu ikatan yang disebut dengan *Constitution of Madinah* (Piagam Madinah atau Mistaqul Madinah).

Piagam ini mengatur tentang tanggung jawab seluruh warga Madinah untuk terciptanya persatuan dan kesatuan di kalangan mereka.

Piagam Madinah itu adalah:

- a. Nabi Muhammad pemimpin bagi semua penduduk Madinah.
  - b. Semua penduduk Madinah tidak boleh bermusuhan.
  - c. Semua penduduk Madinah bebas mengamalkan agamanya masing-masing.
  - d. Semua penduduk Madinah hendaklah bekerja sama dalam bidang ekonomi dan pertahanan.
  - e. Keselamatan orang Yahudi terjamin selagi mereka taat kepada perjanjian yang tercatat pada Piagam Madinah (Dusuki, 1975: 84).
4. Berkeadilan, Al-Qur'an dalam banyak tempat menjelaskan tentang keadilan. Karena begitu pentingnya keadilan sampai-sampai Al-Qur'an menjelaskan bahwa keadilan itu mendekati takwa (QS. Al-Maidah (5): 8).
  5. Masyarakat berilmu, ilmu merupakan salah satu pilar yang ditegakkan Rasul dalam membangun masyarakat

Madinah. Penerapan masyarakat berilmu ini telah dimulai oleh Rasulullah dengan memberantas buta aksara di kalangan kaum Muslimin, dengan cara membebaskan tawanan perang yang mampu mengajarkan kaum Muslimin menulis dan membaca sebagai tebusannya.

Semangat keilmuan ini pulalah yang mendorong kaum Muslimin yang terdiri dari para sahabat Rasul untuk menimba ilmu' *aqliyah* (IPTEK) tatkala mereka menaklukkan wilayah-wilayah yang menjadi pusat-pusat peradaban Yunani di Asia, yakni wilayah Syam (Syria), Irak, dan Iran. Dari hasil kontak kaum Muslimin dengan peradaban yang telah maju itu pulalah mulai timbulnya era penerjemahan ilmu pengetahuan *aqliyah* ke dalam bahasa Arab. Upaya-upaya penerjemahan inilah yang merupakan cikal bakal pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam.

Melihat kepada beberapa indikasi masyarakat Madinah tersebut yang identik dengan masyarakat Madani, maka pantaslah Robert N. Bellah seorang sosiolog agama terkemuka mengatakan : "Masyarakat Muslim klasik yang dipimpin oleh Rasulullah SAW adalah masyarakat yang sangat modern untuk zaman dan tempatnya." Masyarakat ini telah membuat lompatan jauh ke depan kecanggihan sosial dan kapasitas politik, sehingga masih tetap dan sangat aktual untuk menjadi acuan *shift* paradigma (Siti Nadhrah: 151).

### 3. Pesantren dan Pembentukan Masyarakat Madani

Berdasarkan indikasi masyarakat madani yang telah diutarakan terdahulu, dapat dijadikan acuan untuk melihat sejauh mana pondok pesantren membentuk masyarakat yang





diutarakan ciri-ciri tersebut.

1. Masyarakat Rabbaniyah adalah masyarakat yang didasarkan atas dasar ketuhanan yang dilandasi atas tiga pilar akidah, syariah, dan akhlak. Berkenaan dengan ini, pesantren titik tumpu utamanya adalah lembaga pendidikan keagamaan baik secara teori maupun praktik. Secara teori para santri diajarkan ilmu agama, baik yang bersumber dari kitab klasik maupun bukan. Secara praktik mereka diwajibkan untuk mempraktikkan kehidupan beragama baik menyangkut akidah, syariah, dan akhlak.
2. Masyarakat demokratis dan egalitarian, kehidupan santri sangat demokratis dan egalitarian. Mereka hidup tanpa disekat oleh status sosial dan ekonomi. Muzakarah dan musyawarah ilmu pengetahuan yang dikembangkan di pesantren merupakan perwujudan dari kehidupan demokratis dan egalitarian tersebut.
3. Hidup toleran, salah satu di antara kehidupan yang dikembangkan adalah hidup bertoleransi sesama mereka, menghargai orang lain, mengembangkan hidup tenggang rasa, mengikis sikap-sikap egois, ditumbuhkan semangat persaudaraan (ukhuwah). Sulit dibayangkan santri yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan di suatu pesantren apabila tidak memiliki sikap hidup tenggang rasa.
4. Berkeadilan, sikap berkeadilan ini timbul dari sikap kiai yang memberikan pendidikan, perhatian, serta kasih sayang yang sama kepada santri. Santri diberlakukan secara sama, tidak dibedakan dalam pendidikan, pengajaran, dan fasilitas, bahkan juga dari segi hukuman yang

diberikan tidak membedakan seseorang atas dasar status sosial dan ekonomi orangtuanya. Pendidikan yang seperti ini memiliki pengaruh besar kepada santri dalam menumbuhkan toleran dan adil.

5. Masyarakat berilmu. Pesantren adalah lembaga untuk menimba ilmu. Tentu saja dapat dipastikan bahwa pesantren tidak dapat dipisahkan dengan ilmu. Pada tahap awal (pesantren *Salafi*) mengembangkan ilmu-ilmu *naqliyah* (*perrenial knowledge*) atau pesantren pola I dan II. Dinamika berikutnya, pesantren telah berkembang kepada pola III, IV, dan V, pesantren modern (pesantren *khalafi*), pada pesantren *khalafi* ini ilmu telah lebih bervariasi dengan diajarkannya ilmu-ilmu *aqliyah* (*acquired knowledge*) di samping ilmu-ilmu *naqliyah*.

## B. KESIMPULAN

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia, yang pada tahap awal sebelum masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam ke Indonesia semata-mata mengajarkan kitab-kitab klasik yang bertujuan untuk membentuk ulama, kiai yang kompeten dalam bidang ilmu-ilmu diniyah.

Sesuai dengan arus kemajuan zaman, dibarengi pula masuknya ide-ide pembaruan pemikir Islam ke Indonesia, maka pesantren telah mengalami dinamika. Dinamika itu dapat dilihat dari empat segi, dinamika materi (bahan yang diajarkan), dinamika administrasi dan manajemen, serta dinamika sistem dari nonklasikal menjadi klasikal dan dina-





mika metode pembelajaran.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pesantren semakin adaptif terhadap kemajuan zaman. Atas dasar itu, peluang pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang akan menciptakan manusia seutuhnya akan semakin terbuka. Selain dari itu, pesantren juga berperan untuk membentuk masyarakat madani yang bercirikan masyarakat religius, demokratis, egalitarian, toleran, berkeadilan, serta berilmu.

Kesemua ciri-ciri masyarakat madani ini yang ditransformasikan dari sikap hidup masyarakat Madinah yang dipimpin Rasul sangat erat kaitannya dengan output pesantren.



## BAB 3

# PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan agama adalah hak peserta didik berdasarkan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional: Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Bab V, Pasal 12 (1), yang berbunyi: Setiap peserta didik pada satuan pendidikan berhak: (a) mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Dalam penjelasan Pasal 12 (1) a, disebutkan bahwa pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3). Dalam Undang-Undang Pendidikan sebelumnya, Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 disebutkan bahwa salah satu dari tiga mata pelajaran yang wajib diberikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan (pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan) (UU Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 39 ayat (2)).

Berdasarkan keterangan di atas, bahwa kedudukan pendidikan agama sangat penting. Pendidikan agama dikelompokkan kepada pendidikan yang wajib diberikan kepada seluruh peserta didik sesuai dengan agama yang dianutnya.





Pendidikan agama itu tentunya dilaksanakan untuk mencapai terwujudnya tujuan pendidikan nasional pada aspek beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia (Bab II, Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003). Lebih dipertegas lagi kedudukan pendidikan agama pada Bab V, Pasal 12 (1) UU No. 20 Tahun 2003 mengenai hak peserta didik. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: a. Mendapat pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Bila dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, maka pendidikan agama mestilah mampu mengantarkan seorang peserta didik kepada terbinanya setidaknya tiga aspek. *Pertama*, aspek keimanan mencakup seluruh *arkanul iman*. *Kedua*, aspek ibadah mencakup seluruh *arkanul Islam*. *Ketiga*, aspek akhlak mencakup seluruh *akhlaqul karimah*.

Dalam operasionalnya, pendidikan agama di sekolah-sekolah umum diatur oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Nasional, mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi.

Tulisan singkat ini akan berupaya mengungkapkan bagaimana mengefektifkan pendidikan agama di sekolah-sekolah umum, sehingga berhasil guna dan berdaya guna untuk terwujud misi utamanya dalam tiga aspek tersebut: keimanan, ibadah, dan akhlak mulia.

## B. PROBLEMA DAN SOLUSI

Ada beberapa asumsi problema pendidikan agama di sekolah umum.

### 1. Peserta Didik

Peserta didik berasal dari lingkungan keluarga yang beraneka ragam tingkat pemahaman, pengamalan, serta penghayatan agama. Dan hal ini tentu ada peserta didik yang berasal dari keluarga yang sudah memiliki pemahaman, pengamalan, dan penghayatan agama yang tinggi, tetapi juga ada yang berasal dari kelompok sedang dan rendah. Idealnya kelompok tersebut harus dipisahkan agar mendapat perlakuan yang berbeda, sehingga masing-masing kelompok memperoleh perhatian yang sepatutnya.

### 2. Pendekatan Kognitif

Pendidikan itu setidaknya memiliki tiga aspek sasaran. *Pertama*, sasaran pengisian otak (*transfer of knowledge*). Di sini yang paling ditekankan adalah mengisi kognitif peserta didik, mulai dari yang sederhana seperti menghafal sampai analisis. *Kedua*, mengisi hati, melahirkan sikap positif (*transfer of values*), sasarannya menumbuhkan kecintaan kepada kebaikan dan membenci kejahatan. *Ketiga*, keterampilan (*transfer of skill*), timbul keinginan untuk melakukan yang baik dan menjauhi perilaku jelek. Di antara ketiga tersebut, yang paling mudah dilakukan oleh seorang guru adalah pendekatan kognitif, sebab di dalam praktiknya tidak sejelelimet pendekatan afektif dan psikomotorik. Karena itulah, yang paling sering dilakukan oleh sekolah-sekolah dalam pendekatan pendidikan agama adalah pendekatan aspek kognitif. Oleh karena agama banyak menyentuh kalbu (hati) manusia, maka pendekatan terhadap agama tidak selamanya efektif jika hanya didekati lewat pendekatan kognitif, karena



itu pendekatan afektif dan psikomotorik merupakan suatu keniscayaan di samping pendekatan kognitif.

### 3. Pendekatan Parsial

Ada kesan di berbagai sekolah umum, baik negeri maupun swasta, bahwa pendidikan agama tertumpu menjadi tanggung jawab guru agama saja, sedangkan guru mata pelajaran lainnya merasa kurang ada hubungannya dengan pendidikan agama. Untuk mengefektifkan pendidikan agama tersebut maka guru-guru bidang studi lainnya mesti menjadi guru agama yang mengimplisitkan nilai (*values*) agama ke dalam mata pelajarannya. Sang guru dapat menarik nilai-nilai luhur yang terdapat dalam mata pelajarannya. Selain itu, juga mesti dilaksanakan pendekatan bersepadu (*integritet*) antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

### 4. Sarana dan Fasilitas

Pendidikan agama sebagaimana pendidikan lainnya juga membutuhkan sarana dan fasilitas. Bila di sekolah ada laboratorium IPA, Biologi, Bahasa, maka sebetulnya sekolah juga membutuhkan laboratorium agama di samping masjid. Apa saja isi dari laboratorium agama tersebut? Laboratorium itu dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang membawa peserta didik untuk lebih menghayati agama, misalnya video yang bernapaskan keagamaan, musik dan nyanyian keagamaan, syair, puisi keagamaan, alat-alat peraga pendidikan agama, dan foto-foto yang bernapaskan keagamaan, yang merangsang emosional keberagamaan peserta didik.

## 5. Evaluasi

Evaluasi yang berorientasi terhadap penilaian kognitif semata sudah harus diubah kepada evaluasi yang berorientasi kepada penilaian afektif dan psikomotorik. Di samping tetap melaksanakan penilaian kognitif sudah perlu direncanakan salah satu bentuk evaluasi dengan menggunakan pendekatan afektif dan psikomotorik, misalnya skala sikap dan penilaian praktik ibadah.

### C. UPAYA PENANAMAN RANAH AFEKTIF

*Kamus Umum Bahasa Indonesia* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan afektif adalah: 1) berkenaan dengan perasaan; 2) keadaan perasaan yang memengaruhi keadaan penyakit (penyakit jiwa); 3) gaya atau makna yang menunjukkan perasaan (*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1990: 8).

*Kamus Psikologi* menyebutkan: *affect, affection*: 1) *a broad class of mental processes, including feeling, emotion, moods, and temperament. Historically, affection was distinguished from cognition and volition*; 2) (*Titchener*) *pleasantness and unpleasantness. Affectivity*: 1) *emosional, tendency toward emotional reaction*; 2) *generalized emotional reaction not readily identifiable with a particular stimulus situation* (*Chaplin*, 1973: 13-14).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa afektif itu adalah masalah yang berkenaan dengan emosi (kejiwaan), berkenaan dengan ini terkait dengan suka, benci, simpati, antipati, dan lain sebagainya. Dengan demikian afektif itu adalah sikap batin seseorang.

Pendidikan agama yang berorientasi kepada pemben-





tukan afektif ini adalah pembentukan sikap mental peserta didik ke arah menumbuhkan kesadaran beragama. Beragama tidak hanya pada kawasan pemikiran, tetapi juga memasuki kawasan rasa. Karena itu sentuhan-sentuhan emosi beragama perlu dikembangkan. Di antara metode pendidikan yang banyak kaitannya dengan sentuhan emosi adalah:

1. Bimbingan kehidupan beragama.

Bimbingan kehidupan beragama dapat diberikan lewat pembentukan lembaga bimbingan kehidupan beragama. Peserta didik yang bemasalah atau tidak mesti lewat pintu gerbang apa yang disebut bimbingan. Bimbingan ini berbentuk pendekatan individual. Dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan psikologis. Data-data person yang memuat kehidupan beragamanya telah ada di tangan pembimbing. Lewat itulah dikembangkan dialog dengan peserta didik tersebut.

2. *Uswatun hasanah* (contoh teladan).

3. Seluruh tenaga kependidikan adalah menjadi guru agama, baik dalam bentuk pasif maupun aktif, yang menjadi *uswatun hasanah* bagi peserta didik. Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
- b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan
- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (UU No 20 Tahun 2003 Bab XI Pasal 40 ayat 2).

4. Malam ibadah.

Diisi dengan berbagai aktivitas religius dengan menampilkan acara-acara yang mendorong untuk semakin tebalnya emosi beragama, misalnya doa, membaca Al-Qur'an, zikir, dan pertobatan.

5. Pesantren kilat.

Secara kontinu (berkelanjutan), pesantren kilat Sabtu-Minggu perlu diprogramkan. Para pelajar pada tingkat SLTP dan SLTA dapat mengikutinya tanpa terkecuali. Diprogramkan setiap peserta didik minimal telah mengikutinya satu kali selama menjadi siswa.

6. Laboratorium pendidikan agama.

Adanya suatu ruangan khusus yang ditata dengan baik yang bernuansa religius, misalnya musik, sajak, puisi religius, video yang mengisahkan nuansa keberagamaan. Peserta didik secara bergiliran perkelas, pada hari-hari yang ditentukan mengikuti acara di tempat tersebut.

7. Iklim religius.

Menciptakan suasana religius yang kental di lingkungan pendidikan, meliputi tata pergaulan, pakaian, lingkungan sekolah, praktik ibadah.

8. Hubungan sekolah dan rumah tangga.

Seperti yang telah dimaklumi, bahwa arti tripusat pendidikan itu—rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan agama di sekolah hanya sebagian dari upaya pendidikan. Kesuksesan pendidikan agama harus ada jaringan kerja antara rumah tangga, sekolah, dan masyarakat, setidaknya bagaimana hubungan sekolah dengan rumah tangga.



#### D. PENUTUP

Pelaksanaan pendidikan agama sangat kompleks, menyangkut berbagai aspek, karena itu keberhasilannya pun terkait pula dengan berbagai aspek tersebut, antara lain peserta didik, pendidik, kurikulum, manajemen, metode, evaluasi. Untuk mengefektifkan pelaksanaannya perlu diadakan evaluasi terhadap berbagai hal yang disebutkan di atas.

Salah satu yang sering menjadi bahan diskusi adalah bagaimana menerapkan pendekatan afektif dan psikomotorik dalam pendidikan agama, yang memang terasa lebih sulit bila dibanding dengan pendekatan kognitif. Berkenaan dengan itu, maka ada beberapa tawaran, di antaranya bimbingan beragama, *uswatun hasanah*, malam ibadah, pesantren kilat, evaluasi, dan iklim beragama, serta membina hubungan baik antara sekolah dengan rumah tangga.

### BAB 4

## PROFESIONALISME GURU MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN

### A. PENDAHULUAN

Guru adalah salah satu di antara faktor pendidikan yang memiliki peranan yang paling strategis, sebab gurulah sebenarnya 'pemain' yang paling menentukan di dalam terjadinya proses belajar mengajar. Di tangan guru yang cekatan fasilitas dan sarana yang kurang memadai dapat diatasi, tetapi sebaliknya di tangan guru yang kurang cakap, sarana dan fasilitas yang canggih tidak banyak memberi manfaat.

Berangkat dari asumsi tersebut, maka langkah pertama yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pendidiknya terlebih dahulu. Disyaratkan lulusan S-1 merupakan syarat minimal pendidikan guru, merupakan bagian dari upaya guna meningkatkan kualitas guru.

Salah satu di antara ciri kemajuan zaman tersebut adalah adanya suatu pekerjaan yang ditangani secara profesionalis, sehingga pekerjaan itu dikerjakan secara sungguh-sungguh dan serius oleh orang yang memiliki profesi di bidang tersebut. Pekerjaan guru merupakan pekerjaan profesi, karena itu mesti dikerjakan sesuai dengan tuntutan profesionalis.



Di bidang keguruan ada tiga persyaratan minimal seseorang itu menjadi tenaga profesionalis di bidang keguruan. *Pertama*, memiliki ilmu pengetahuan di bidang yang diajarkannya sesuai dengan kualifikasi di mana dia mengajar. *Kedua*, memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang keguruan. *Ketiga*, memiliki moral akademik.

Timbul pertanyaan upaya apakah yang dilakukan sehingga guru madrasah dapat menempatkan dirinya sebagai tenaga profesionalis. Untuk itu, tulisan ini akan mencoba menguraikannya.

## B. PROFESIONALISME TENAGA PENDIDIK

Profesionalis adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok yang menghasilkan nafkah hidup dan menghendaki suatu keahlian (Salam, 1997: 137)

Cirinya: 1) memiliki keahlian di bidang tersebut; 2) menggunakan waktunya untuk bekerja dalam bidang tersebut; 3) hidup dari pekerjaan tersebut; 4) bukan sebagai hobi. Burhanuddin Salam menyebutkan ciri profesi itu adalah: 1) adanya pengetahuan khusus; 2) adanya kaidah atau standar moral yang tinggi; 3) mengabdikan kepada kepentingan masyarakat; 4) ada izin khusus untuk melaksanakan suatu profesi; 5) biasanya menjadi anggota dari suatu organisasi profesi. (Salam, 1997: 141-142). Selain dari ini masih ada lagi pendapat lain yang menguraikan tentang ciri keprofesionalisme.

Bila mengacu kepada beberapa penjelasan yang disebutkan di atas, timbul pertanyaan apakah guru merupakan tenaga profesi? Sikun Pribadi berpendapat bahwa guru harus diberi predikat profesi. Sodik A. Kuntoro juga berpendapat

bahwa tugas guru adalah tugas profesi, seperti profesi kedokteran, dan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka guru dapat digolongkan kepada tenaga profesi. Keprofesionalisme guru dapat dilihat dari ilmu, kemampuan teknis, komitmen moral yang tinggi terhadap tugasnya. Ilmu pengetahuan kaitannya dengan guru yang profesionalis adalah sang guru tadi memiliki ilmu pengetahuan dalam bidang yang diajarkannya, sehingga memungkinkan dia untuk mentransfer ilmu kepada peserta didiknya. Kemampuan teknis keguruan, dalam hal ini memiliki berbagai keterampilan mengajar, misalnya persiapan mengajar, proses pembelajaran, sampai kepada evaluasi. Komitmen moral, berkenaan dengan sikap mental seorang guru, meliputi: mencintai pekerjaannya, disiplin, dan objektif.

Perincian dari tiga sumber pokok tersebut melahirkan kompetensi keguruan, yang meliputi:

1. menguasai bahan;
2. mengelola program belajar mengajar;
3. mengelola kelas;
4. menggunakan media/sumber;
5. menguasai landasan-landasan kependidikan;
6. mengelola instruksi belajar mengajar;
7. menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran (Roestiyah, 1989: 6-7).

## C. SEKILAS TENTANG MADRASAH

Madrasah telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak awal abad ke-20, lahir sebagai jawaban dari munculnya ide-ide pembaruan pemikiran dalam Islam. Madrasah me-



rupakan perpaduan antara pendidikan pesantren dan sekolah. Ciri kepesantrenan yang diadopsi oleh madrasah adalah ilmu agama serta sikap hidup beragama. Ciri sekolah yang diadopsi oleh madrasah adalah sistem klasikal, mata pelajaran umum, manajemen pendidikan. Pada masa kolonial, madrasah tumbuh dan berkembang secara separatis tanpa dikoordinasi oleh pemerintah, dengan demikian mucullah madrasah yang beraneka ragam bentuknya.

Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan madrasah dipercayakan pemerintah kepada Kementerian Agama. Sejak Indonesia merdeka telah terjadi tiga fase perkembangan madrasah. *Fase pertama*, fase antara tahun 1945–1974. Pada fase ini madrasah lebih terkonsentrasi kepada pengajaran ilmu agama. Karena itu, ijazah madrasah lebih terkonsentrasi berlakunya di kalangan Kementerian Agama, baik untuk melanjutkan studi maupun untuk memasuki dunia kerja.

*Fase kedua*, antara tahun 1975–1989, fase ini adalah fase pemberlakuan SKB (Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri Tahun 1975). Madrasah pada periode ini telah memasuki “dunia baru” yaitu disamakannya antara ijazah sekolah dan madrasah. Sejak saat itu banyak siswa tamatan madrasah yang melanjutkan studinya ke perguruan tinggi umum. *Ketiga*, madrasah pasca-UU No. 2 Tahun 1989, madrasah pada periode ini didefinisikan sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam, maka madrasah memiliki program yang sama dengan sekolah mulai tingkat dasar sampai menengah. Ciri keislaman dilihat dari mata pelajaran agamanya lebih banyak dari sekolah, demikian juga semangat beragamanya lebih menonjol dari sekolah (Daulay, 2009: 144-145).

Beberapa hal yang menjadi problema madrasah hingga saat ini adalah:

1. Problema struktural dan kultural. Secara struktural madrasah berada di bawah naungan Departemen Agama, hal ini berdampak kepada pendanaan. Problema kultural adalah masih langka kaum Muslimin menengah ke atas untuk memasukkan anaknya ke madrasah.
2. Kekurangan tenaga pendidik yang sesuai dengan profesi, terutama dalam bidang matematika, IPA, B. Inggris.
3. Kekurangan sarana dan fasilitas.
4. Manajerial.

## D. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN

Indonesia saat sekarang ini termasuk negara yang tergolong tingkat kualitas manusianya rendah. *Human development Index* (HDI) yang belum menggembirakan masih jauh *ranking*-nya dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara apalagi negara-negara maju.

Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan hasil pembelajaran.

### 1. Peserta Didik (Raw Input)

Bila pendidikan diibaratkan dengan sebuah pabrik, maka pabrik tersebut bila ingin menghasilkan produk yang berkualitas dimulainya dengan memasok bahan baku yang berkualitas pula, dengan alasan semakin baik bahan bakunya (*raw input*) akan semakin baik pula kualitas outputnya.





Dipandang dari sudut peserta didik, ada beberapa faktor yang memengaruhi belajar:

#### a. Faktor intern

- 1) Faktor jasmani, meliputi faktor kesehatan, kebugaran tubuh, siswa yang sehat badannya akan lebih baik hasil belajarnya dari siswa yang sakit. Begitu juga sangat berpengaruh kesempurnaan dan kelengkapan indra (penglihatan, pendengaran, serta kelengkapan anggota fisik lainnya).
- 2) Faktor psikologis, di antaranya yang amat berpengaruh adalah inteligensia, perhatian, minat, bakat, motivasi, kematangan, kesiapan, dan kelelahan.

#### b. Faktor ekstern

Di antara faktor ekstern itu adalah:

- 1) Keluarga  
Di dalam keluarga yang menjadi penanggung jawab adalah orang tua, sikap orang tua di dalam keluarga sangat memengaruhi hasil belajar peserta didik. Sikap orang tua yang otoriter, demokratis sangat berpengaruh bagi perkembangan anak. Karena itu rumah tangga sangat berpengaruh bagi perkembangan pribadi anak.
- 2) Faktor sekolah  
Faktor sekolah juga tidak kalah pentingnya di dalam menciptakan kondisi pembelajaran yang baik, meliputi guru, sarana, fasilitas, kurikulum, disiplin, lingkungan sekolah hubungan guru dengan siswa, hubungan sekolah dengan orangtua siswa, dan lain sebagainya.

#### 3) Faktor masyarakat

Karena peserta didik hidup berkecimpung di tengah-tengah masyarakat, maka lingkungan masyarakat sangat berpengaruh bagi peserta didik.

### 2. Sarana dan Fasilitas

Pengajaran akan lebih sukses lagi apabila peserta didik terlibat secara fisik dan psikis. Seorang siswa yang hanya mendengar dari gurunya tentang cerita seekor kerbau, sangat jauh bedanya apabila si guru dapat memperlihatkan gambar kerbau, dan lebih terkesan lagi pengaruhnya apabila si siswa tadi melihatnya secara langsung apalagi kalau sudah sampai pula memegangnya.

### 3. Pendidik

Seperti yang telah diungkapkan terdahulu bahwa guru adalah faktor pendidikan yang amat penting, sebab di tangan guru metode, kurikulum, alat pembelajaran lainnya akan hidup dan berperan. Manusia yang mengendalikan senjata itu lah yang menentukan bukan senjatanya (*the man behind the gun*). Atas asumsi sedemikian itulah maka salah satu yang paling pokok dibenahi oleh pemerintah di dalam membenahi dunia pendidikan adalah guru. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dalam rangka meningkatkan peran guru.

- a. Pemantapan dan peningkatan kompetensi keguruan. Sesuai UU No. 14 Tahun 2005 Undang-Undang Guru dan Dosen, menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. (Bab



IV Pasal 8 UU No. 14 Tahun 2005). Khusus mengenai kompetensi diuraikan pada pasal: Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (Bab IV, Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2003).

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Adapun kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. (Penjelasan tentang UU No. 14 Tahun 2005).

- b. Memegang teguh etika profesi keguruan. Kode etik guru, seperti hasil kongres ke XIII adalah:
  - 1) Berbakti membimbing anak didik seutuhnya.
  - 2) Memiliki kepemimpinan profesional.
  - 3) Membina komunikasi, terutama memperoleh informasi tentang anak didik.
  - 4) Menelusuri hubungan dengan orangtua murid untuk kepentingan anak didik.
  - 5) Memelihara hubungan baik dengan masyarakat.
  - 6) Berusaha meningkatkan mutu profesinya.

- 7) Memelihara hubungan antar-sesama guru.
- 8) Membina dan memelihara mutu organisasi profesional.
- 9) Melaksanakan sesuatu yang berhubungan dengan ketatapemerintahan.
- c. Guru berperan sebagai motivator dan dinamisor bagi peserta didik.
- d. Kesejahteraan guru, *last but not least* kesejahteraan guru amat berperan dalam rangka meningkatkan kinerja mereka, kesejahteraan itu bisa dalam arti materi dan immateri.

#### 4. Lingkungan

Lingkungan ada dua macam, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik yakni suasana dan keadaan berlangsungnya pendidikan. Lingkungan sosial yakni iklim dan suasana kependidikan. Iklim yang kondusif bagi pencapaian tujuan pendidikan merupakan kurikulum tersembunyi bagi pencapaian tujuan pendidikan.

#### E. UPAYA PEMBENTUKAN GURU MADRASAH YANG PROFESIONAL

Guru madrasah adalah guru, karena itu perlakuan umum yang diberlakukan untuk guru juga berlaku untuk guru madrasah, guru yang sukses dan guru yang profesional kriteria umumnya sama untuk seluruh guru, kendatipun tidak menutup kemungkinan adanya spesifik guru madrasah.

Menurut D.N. Medley (1979) ada empat fase asumsi yang melandasi keberhasilan guru dan pendidikan guru.





*Fase pertama*, (sekitar tahun 1930-an) penelitian terfokus kepada sifat-sifat kepribadian guru. Kepribadian guru yang dapat menjadi suri teladanlah menjamin keberhasilannya mendidik anak. *Fase kedua*, keberhasilan guru di dalam mengajar adalah metode mengajar. Metode penyampaian yang baik menjamin keberhasilan pendidikan. Hal ini banyak juga pengaruhnya di kalangan pendidik di Indonesia.

*Fase ketiga*, mengutamakan iklim interaksi di kelas. Interaksi guru di dalam kelaslah yang menentukan, iklim di dalam kelaslah yang paling dominan di dalam keberhasilan pendidikan. *Fase keempat*, memusatkan perhatian kepada penampilan (*performance*) yang menggambarkan dia memiliki kemampuan (*competency*). Calon guru dievaluasi kemampuan mengajarnya berdasarkan penampilannya (implisit di dalamnya: penguasaan materi, strategi penyampaian, penguasaan alternatif media yang tepat, dan lainnya) (Muhadjir, 1987: 108-109).

Menurut Noeng Muhadjir, seorang pendidik adalah seorang yang mempunyai pengetahuan lebih serta mampu mengimplisitkan nilai-nilai di dalamnya, jadi calon guru diberi bekal pengetahuan sesuai dengan tugasnya, dan pengetahuan itu mempribadi di mana nilai-nilai menjadi implisit di dalamnya (Muhadjir, 1987: 110).

Ada pendapat yang menyatakan bahwa kemampuan guru itu dilihat dari kemampuan mengajarnya, asumsi ini didasarkan kepada “guru yang baik adalah guru yang mampu mengajar baik” (Muhadjir, 1987: 111). Ada beberapa model di dalam evaluasi kemampuan mengajar guru (EKM):

1. Model STAG ( *Stanford Teacher Competence Appraisal*

*Guide*), mengemukakan empat komponen evaluasi: tujuan, penampilan (*performance*), evaluasi, profesionalitas serta kemasyarakatan. Kemudian dikembangkan menjadi 17 item evaluasi, kemampuan guru dari 17 itu 13 item dapat dilihat dengan observasi, misalnya mengevaluasi tentang pemilihan isi pelajaran, dan lain sebagainya.

2. Model Rob Norris, mengetengahkan enam komponen yang mencakup 45 item. Keenam komponen itu adalah kualitas personal—profesional, persiapan mengajar, perumusan tujuan, evaluasi, penampilan di kelas, penampilan siswa. Sebanyak 21 item tentang penampilan guru di kelas.
3. Model Oregon, yang disebut sebagai: OCE-CBTE (*Oregon College of Education Competency Based Teacher Education*), mengelompokkan kemampuan mengajar dalam lima *cluster*: perencanaan dan persiapan, kemampuan mengajar (guru), kemampuan belajar (siswa), kemampuan hubungan interpersonal, dan kelima kemampuan hubungan dan tanggung jawab profesional terhadap orangtua, kurikuler, administratif, dan anggaran.
4. Model APKG (alat penilaian kemampuan guru) yang disadur dari TPAI (*teacher performance assesment Instruments*) mengetengahkan lima alat mengukur kemampuan, yaitu: rencana pengajaran, prosedur mengajar, hubungan antarpribadi, standar profesional, dan persepsi siswa (Muhadjir, 1987: 112-113).

Di Indonesia dikembangkan 10 kompetensi kemampuan dasar guru: menguasai bahan, mengelola program be-



lajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media/sumber, menguasai landasan kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran, mengenal fungsi dan program bimbingan, dan penyuluhan di sekolah, mengenal dan menyelenggarakan administrasi di sekolah, memahami prinsip, dan mampu menafsirkan hasil penelitian guna keperluan mengajar. (Muhadjir, 1987: 113-114).

Berdasarkan ungkapan di atas, penulis mengelompokkan kompetensi keguruan itu kepada tiga kelompok besar:

1. kelompok penguasaan keilmuan, yakni seorang guru mesti menguasai ilmu yang akan diajarkannya kepada anak didik dengan cukup baik, sesuai dengan tingkat kepada siapa ilmu itu diberikan. Kelompok ini menampilkan seorang guru yang bermental ilmu, mencintai ilmu, serta senantiasa giat untuk menambah ilmunya, terutama di dalam bidang mata pelajaran yang diasuhnya. Kriteria yang paling sederhana dalam hal ini adalah penguasaan bahan pelajaran yang diajarkannya dengan baik. Dalam kompetensi guru yang diungkapkan pada UU No. 14 Tahun 2005, ini termasuk pada kelompok kompetensi profesional.
2. Komponen dasar kedua adalah kemampuan berkomunikasi, baik dalam menyampaikan ilmu (mengajar) maupun berinteraksi sosial termasuk di dalamnya adalah kemampuan persiapan mengajar, mengelola interaksi belajar mengajar, penguasaan kelas, penguasaan metode mengajar yang tepat untuk mata pelajaran tertentu, kemampuan penggunaan media/sumber, kemampuan

hubungan interpersonal, dan lain-lain yang termasuk dalam bidang kemampuan berkomunikasi. Ini termasuk dalam kompetensi pedagogik dan sosial pada UU No. 14 Tahun 2005.

3. Komponen dasar ketiga adalah kompetensi moral akademik, seorang guru bukan hanya orang yang bertugas untuk mentransferkan ilmu (*transfer of knowledge*), melainkan juga orang yang bertugas untuk mentransferkan nilai (*transfer of value*). Guru tidak hanya mengisi otak peserta didik (kognitifnya), tetapi juga bertugas untuk mengisi mental mereka dengan nilai baik dan luhur mengisi afektifnya. Di sini seorang pendidik menjadi panutan bagi peserta didiknya dalam banyak segi sang guru tadi dapat dijadikan contoh teladan oleh peserta didiknya. Para pendidik Islam di zaman klasik telah banyak membahas tentang ini. Misalnya, Ibn Jama'ah menyebutkan seorang guru mestilah menghiaskan dirinya dengan akhlak yang diharuskan bagi seorang yang beragama dan bagi seorang Muslim, dan para tokoh pendidik Islam lainnya. Ini termasuk pada kompetensi kepribadian pada UU No. 14 Tahun 2005.

## F. PENUTUP/KESIMPULAN

Salah satu komponen pokok terpenting dari pendidikan adalah guru. Keberhasilan pengajaran dan peningkatan kualitas pendidikan banyak ditentukan oleh guru, karena itulah perhatian tentang guru ini mesti diutamakan bila ingin meningkatkan hasil pendidikan. Madrasah adalah lembaga pendidikan yang disetarakan dengan sekolah, *civil effect* madra-





sah sama dengan sekolah. Berangkat dari alas pikir tersebut, maka untuk meningkatkan mutu pendidikan harus berawal dari peningkatan mutu gurunya, dedikasinya serta kecintaan kepada profesinya.

Salah satu permasalahan yang dihadapi madrasah adalah masalah guru. Guru di madrasah masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Untuk menciptakan tenaga profesional di bidang keguruan harus ditempuh beberapa upaya. Guru madrasah pada prinsipnya sama dengan guru di sekolah, kriteria-kriteria serta kompetensi keguruan antar-guru sekolah dan madrasah tidak berbeda.

Ada empat kompetensi pokok yang mesti dimiliki oleh seorang guru, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. keempat hal tersebut dapat dikelompokkan kepada: *pertama*, kompetensi keilmuan; *kedua*, kompetensi berkomunikasi; dan *ketiga*, kompetensi moral.

## Bagian 3

### PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

- Historis dan Eksistensi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia
- IAIN di Era Globalisasi: Peluang dan Tantangan dari Sudut Pendidikan Islam
- Perguruan Tinggi Agama Islam di Masa Depan (Peluang dan Tantangan)





## BAB 1

# HISTORIS DAN EKSISTENSI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

### A. PENDAHULUAN

Hasrat umat Islam untuk mendirikan pendidikan tinggi sudah dirintis sejak zaman kolonial Belanda, M. Natsir menulis dalam *Capita Selecta*, bahwa keinginan untuk mendirikan pendidikan tinggi Islam itu telah muncul di hati umat Islam. M. Natsir menyebutkan, bahwa Dr. Satiman telah menulis artikel dalam PM (Pedoman Masyarakat) Nomor 15 membentangkan cita-cita beliau yang mulia akan mendirikan satu sekolah tinggi Islam itu akan terpusat di tiga tempat, yakni di Jakarta, Solo, dan Surabaya. Di Jakarta akan diadakan sekolah tinggi sebagai bagian atas Sekolah Menengah Muhammadiyah (AMS) yang bersifat *Westerch* (kebaratan). Di Solo akan diadakan sekolah tinggi untuk mendidik *mubalighin*. Di Surabaya akan diadakan sekolah tinggi yang akan menerima orang-orang pesantren (Natsir, 1973: 90). Kendatipun yang diungkapkan ini masih dalam bentuk ide, belum menjadi kenyataan, akan tetapi semangat untuk mendirikan perguruan tinggi Islam itu telah muncul pada tahun 1930-an.

Mahmud Yunus mengemukakan pula bahwa di Padang Sumatera Barat, pada tanggal 9 Desember 1940 telah berdiri perguruan tinggi Islam yang dipelajari oleh Persatuan Guru-guru Agama Islam (PGAI). Menurut Mahmud Yunus per-

guruan tinggi ini yang pertama di Sumatera Barat bahkan di Indonesia. Tetapi ketika Jepang masuk ke Sumatera Barat pada tahun 1941, pendidikan tinggi ini ditutup sebab Jepang hanya mengizinkan dibuka tingkat dasar dan menengah.

Pendidikan ini dibuka dari dua fakultas:

1. Fakultas Syariat (Agama).
2. Fakultas Pendidikan dan Bahasa Arab (Yunus, 1979: 121).

Semangat untuk mendirikan pendidikan tinggi ini juga tercantum dalam Kongres II MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) yang diadakan di Solo pada tanggal 2-7 Mei 1939, dihadiri oleh 25 organisasi Islam yang menjadi anggota MIAI. Di dalam laporan kongres itu salah satu agenda pembahasannya adalah perguruan tinggi Islam, kongres mendukung untuk dibentuknya perguruan tinggi Islam. Setelah kongres selesai, didirikanlah PTI (Pendidikan Tinggi Islam) di Solo yang dimulai dari tingkat menengah dengan nama IMS (*Islamische Midilbare School*). Akan tetapi lembaga pendidikan pada tahun 1941 ditutup karena pecah Perang Dunia II.

Berdasarkan hal itu, dapat dimaklumi bahwa umat Islam sejak zaman kolonial Belanda telah memiliki cita-cita untuk mendirikan perguruan tinggi. Apalagi di kalangan pemerintah kolonial Belanda sudah lama berdirinya lembaga pendidikan tinggi, misalnya Sekolah Tinggi Teknik (*Technische Hogeschool*) didirikan tahun 1920 di Bandung, dan sekolah Tinggi Hukum (*Rechtskundige Hogeschool*) didirikan tahun 1920 di Jakarta, sekolah Tinggi Kedokteran (*Geneeskundige Hogeschool*) berdiri tahun 1927 di Jakarta.

Sudah dapat dipastikan sesuai dengan kebijakan pen-



didikan kolonial Belanda yang menjadi mahasiswa dari lembaga pendidikan tinggi yang didirikan oleh kolonial Belanda ini adalah masyarakat elite bangsa Indonesia. Dengan demikian keadaan seperti ini mendorong para tokoh pendidik Islam untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi. Ternyata lembaga pendidikan Islam yang telah didirikan di berbagai daerah di Indonesia sangat demokratis. Kedemokratisan terletak kepada peluang sama bagi generasi muda Islam untuk menikmati pendidikan di berbagai perguruan Islam. Atas dasar kenyataan ini pulalah bahwa dibukanya pendidikan tinggi menghilangkan sekat-sekat yang membatasi guna melanjutkan ke tingkat pendidikan tinggi.

Kendatipun pemerintah kolonial Belanda telah dipengaruhi oleh pemahaman yang muncul dari *aufklarung* dan politik etik, namun diskriminasi pendidikan tidak bisa dielakkan oleh pemerintah kolonial. Diharapkan dengan beroperasinya PTI maka akan dapat menampung berbagai lapisan masyarakat tanpa terikat sekat-sekat yang kaku.

Usaha untuk mendirikan PTI terus menggelora di kalangan umat Islam. Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) merupakan gabungan dari organisasi-organisasi Islam, memelopori untuk mendirikan PTI. Untuk itu, pada bulan April 1945 diadakanlah rapat di Jakarta yang dihadiri oleh para tokoh organisasi Islam yang menjadi anggota Masyumi. Dalam rapat itu hadirilah sejumlah tokoh Islam, seperti:

1. PBNU dihadiri K.H. Abdul Wahab, K.H. Bisri Syamsuri, K.H. Wahid Hasyim, K.H. Masykur dan Zainal Arifin.
2. PB Muhammadiyah dihadiri Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Mas Mansur, K.H. Hasyim, K.H. Farid Ma'ruf, K.H.

Mu'thi, K.H. M. Yunus Anis, dan Kerto Sudarmo.

3. PB POI dihadiri K.H. A. Halim dan H. Mansur.
4. PB PUII dihadiri A. Sanusi dan Sumoatmojo.
5. PB Al-Islam dihadiri K.H. Imam Ghazali.
6. Shumubu dihadiri A. Kahar Muzakir, K.H. A. Moh. Adnan, K.H. Imam Zarkasi.
7. Cendekiawan Intelektual dihadiri Dr. Sukiman Wirdjosandojo, Dr. Satiman Wirdjosandojo, Wondoamiseno, Abukusno Tjokrosujoso, Muh. Rum, dan lain-lain.

Berdasarkan daftar nama yang menghadiri sidang ini cukup representatif. Karena dapat dikatakan para tokoh umat Islam Indonesia telah hadir dalam pertemuan tersebut.

Sidang itu memutuskan membentuk panitia perencana STI (Sekolah Tinggi Islam) yang dipimpin oleh Moh. Hatta dan sekretarisnya M. Natsir. Akhirnya atas bantuan pemerintah Jepang, STI dibuka secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1364 H bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta. Peresmiannya diselenggarakan di gedung kantor Imigrasi Pusat Gondangdia di Jakarta (Setengah abad UII: 25). Kurikulum yang dipakai adalah mencontoh Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo.

Pada tahun pertama jumlah mahasiswa STI sebanyak 14 orang dari 78 orang pendaftar. Dilihat dari latar belakang pendidikan yang 14 orang itu adalah 11 orang berasal dari lulusan Sekolah Menengah Hindia Belanda AMS atau HBS dan sederajat. Adapun tiga orang berasal dari madrasah menengah (alimah), sedangkan sisanya 64 orang diterima di tingkat matrikulasi selama satu atau dua tahun kemudian



baru dapat diterima sebagai mahasiswa STI.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, yang berbarengan dengan itu para tokoh pendiri STI terlibat langsung pula dalam kancah perjuangan kemerdekaan RI. Dan sekaitan pula dengan munculnya agresi Belanda ke Indonesia untuk kembali menjadikan Indonesia bagian dari negeri jajahan mereka, maka ibu kota negeri RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan pindahanya pemerintah RI ke Yogyakarta maka STI pun ikut pindah pula.

Pada tanggal 10 April 1946, STI dibuka kembali di Yogyakarta dengan dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Dalam acara tersebut Moh. Hatta menyampaikan pidato yang berjudul "Sifat Sekolah Tinggi Islam". Adapun K.H. Hadjid menyampaikan pidato (kuliah umum) tentang ilmu tauhid (Setengah abad 411: 25-26).

Untuk lebih meningkatkan efektivitas serta keluasan jangkauan STI, maka muncullah ide untuk mengubah STI menjadi universitas. Untuk merealisasi ide itu, dibentuklah panitia perbaikan STI pada November 1947 yang terdiri dari Fathurrahman, Kafrawi, Farid Ma'ruf, Kahar Muzakhir, dan lain-lain. Keputusan terpenting dari panitia ini adalah mengubah STI menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan membuka empat fakultas, yaitu Agama, Hukum, Pendidikan, Ekonomi, yang kemudian secara resmi dibuka pada tanggal 10 Maret 1948 (27 Rajab 1367 H).

Dalam perkembangan berikutnya Fakultas Agama UII ini dinegerikan, sehingga ia terpisah dari UII menjadi PTAIN

(Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri).

## B. PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (PTAIN)

Kota Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan pusat pemerintahan Republik Indonesia, diberi penghargaan dengan menetapkan Yogyakarta sebagai kota universitas. Berkenaan dengan itu, didirikanlah di Yogyakarta Universitas Gajah Mada yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950, yang ditandatangani oleh Assat selaku pemangku jabatan presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu pula, kepada umat Islam diberikan pemerintah pula Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), yang dinegerikan dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950. Adapun peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. K/I/14641 Tahun 1951 (Agama) dan No. 28665/Kab. Tahun 1951 (Pendidikan tertanggal 1 September 1951). Tujuan PTAIN adalah untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam, dan untuk tujuan tersebut ditetapkan asas untuk membentuk manusia susila dan cakap serta mempunyai keinsafan bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dunia umumnya atas dasar Pancasila, kebudayaan, kebangsaan Indonesia, dan kenyataan (Buku Tahunan 1960-1961: 12).

Di samping tujuan ideal di atas, dibentuknya PTAIN



tidak luput dari tujuan praktis, yakni untuk memenuhi dan mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam. Dapat dimaklumi bahwa pada ketika itu telah banyak lulusan tingkat menengah sekolah atau madrasah yang belum tersalurkan minat studi mereka ke tingkat perguruan tinggi, disebabkan lembaganya sebelum berdiri PTAIN belum ada. Selain dari itu, kebutuhan tenaga ahli dalam bidang agama yang dapat menyahuti perkembangan zaman amat diperlukan dalam rangka membangun Indonesia yang baru merdeka. Di sisi lain, selama ini sebelum berdirinya PTAIN masyarakat Indonesia yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan keagamaannya mesti berangkat ke luar negeri ke Mesir atau ke Saudi Arabia. Selain dari itu, PTAIN ini juga dapat diharapkan untuk menjadi pusat mengembangkan ilmu-ilmu keislaman seperti halnya Al-Azhar di Kairo Mesir.

PTAIN yang diresmikan berdirinya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950, baru beroperasi secara praktis pada tahun 1951. Dimulailah perkuliahan perdana pada tahun tersebut dengan jumlah mahasiswa 67 orang dan 28 orang siswa persiapan dengan pimpinan fakultasnya adalah K.H. Adnan.

PTAIN ini mempunyai jurusan Tarbiyah, Qadha, dan Dakwah dengan lama belajar empat tahun pada tingkat bacheloret dan Doktoral. Mata pelajaran agama didampingi mata pelajaran umum terutama yang berkenaan dengan jurusan. Mahasiswa jurusan Tarbiyah diperlukan pengetahuan umum mengenai ilmu pendidikan, dan begitu juga jurusan lainnya diberikan pula pengetahuan umum yang sesuai dengan jurusannya.

Calon mahasiswa berasal dari Sekolah Menengah Atas

atau yang sederajat, seperti SGHA, SMA negeri atau yang dipersamakan sekolah kejuruan sejarah SGA, STM, serta madrasah menengah tinggi dengan terlebih dahulu dilaksanakan *testing*.

### C. AKADEMI DINAS ILMU AGAMA (ADIA)

Dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Tahun 1951 No. K/651 tanggal 20 Januari 1951 (Agama) dan No. 143/K tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), maka pendidikan agama dengan resmi dimasukkan ke sekolah-sekolah negeri dan swasta. Berkenaan dengan itu dan sekaitan pula dengan peraturan-peraturan sebelumnya, maka Departemen Agama yang bertugas untuk menyiapkan tenaga-tenaga guru agama untuk kesuksesan pelaksanaan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Sehubungan dengan itu, untuk merealisasi salah satu tugas tersebut pemerintah mendirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) dengan maksud dan tujuan “guna mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri akan mencapai ijazah pendidikan semi akademi dan akademi untuk dijadikan ahli didik agama pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum maupun kejuruan dan agama” (Buku Tahun 1960-1962: 13).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka di Jakarta tepatnya di Ciputat sekitar 12 kilometer dari Jakarta arah ke selatan didirikanlah pada tanggal 15 Mei 1957 Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), berdasarkan ketetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1957 tertanggal 1 Januari 1957 yang dipimpin oleh Mahmud Yunus.



Lama belajar di ADIA ini adalah lima tahun yang dibagi kepada dua tingkatan, tingkat semi akademik lama belajar tiga tahun, sedangkan tingkat akademik lama belajarnya dua tahun. Masing-masing tingkat terdiri dari dua jurusan, yakni jurusan pendidikan agama dan jurusan sastra Arab (Sumardi, 1978: 93).

Syarat untuk diterima menjadi mahasiswa ADIA adalah lulusan atau berijazah SGAA, PGAA, atau PHIN, mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya dua tahun, dan berumur tidak lebih dari 30 tahun.

#### D. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

Setelah PTAIN berusia lebih kurang sembilan tahun, maka lembaga pendidikan tinggi dimaksud telah mengalami perkembangan. Dengan perkembangan tersebut dirasakan bahwa tidak mampu menampung keluasan cakupan ilmu-ilmu keislaman tersebut kalau hanya berada di bawah satuan payung fakultas saja. Pimpinan fakultas Prof. Mukhtar Yahya dan sekretaris fakultas Mr. Wasil Aziz, dan sejumlah dosen PTAIN telah merasakan hal tersebut. Berkenaan dengan itu timbullah ide-ide, gagasan untuk mengembangkan cakupan PTAIN kepada yang lebih luas.

Situasi ekstern (di luar IAIN) juga sangat kondusif untuk mengembangkan PTAIN. Kondisi yang kondusif yang dimaksudkan itu adalah kondisi kehidupan keberagamaan bangsa dan negara. Kondisi keberagamaan itu berkenaan dengan dekrit presiden/panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali UUD 1945, dan mengatakan pula bahwa Piagam Ja-

karta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Piagam Jakarta yang bersejarah itu amat spesifik kedudukannya di mata umat Islam sebab di dalamnya ada tujuh kata yang bersejarah, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya." Kata-kata ini tidak lagi dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, karena akan merusak persatuan kesatuan bangsa. Umat Islam demi persatuan bangsa tersebut, pada tanggal 18 Agustus 1945 rela mencabut kata-kata itu sehingga tidak lagi muncul dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan disebutkannya pada Dekret Presiden 5 Juli 1959 bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, ini bermakna bahwa semangat kehidupan beragama bertambah mendapat kedudukan penting di negara Republik Indonesia.

Dengan kembalinya ke UUD 1945 bermakna bahwa Pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 perlu direalisasi dalam kehidupan nyata. Realisasi itu berwujud memfungsikan agama menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama merealisasikan Pasal 29 ayat 2: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah dan menurut agamanya dan kepercayaannya".

Jiwa kembali kepada UUD 1945 mendorong benar-benar untuk lebih menggiatkan mengisi sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkenaan dengan ini, maka peranan perguruan tinggi agama khususnya PTAIN semakin dirasakan sebagai salah satu institusi penda-



laman ajaran-ajaran Islam. Dengan demikian, maka peranan PTAIN dapat lebih diperluas cakupannya.

Dalam suasana semangat kembali ke UUD 1945, maka menjelang ulang tahun (Dies Natalis) ke IX PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) pada tanggal 26 September 1959 berdasarkan Ketetapan Menteri Muda Agama Nomor 41 Tahun 1959 dibentuklah suatu panitia dengan nama "Panitia Perbaikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri" yang diketuai oleh Prof. Mr. R.H.A. Soenarjo.

Setelah mengadakan sidang beberapa kali, maka disepakatilah bahwa PTAIN yang berkedudukan di Yogyakarta dengan ADIA yang berkedudukan di Jakarta digabungkan menjadi satu dengan nama Institut Agama Islam Negeri "Al-Jami'ah al-Islamiah al-Hukumiyah. Keputusan panitia tersebut disetujui oleh pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri yang mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1960 (Lembaran Negara No. 61 Tahun 1960).

Pada konsenderan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan untuk mengadakan Institut Agama Islam Negeri ini adalah untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat, sesuai dengan Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang menjawai Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut (Buku Tahunan 1960-1962: 14).

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden tersebut, ditegaskan bahwa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Yogyakarta

dan Akademik Dinas Ilmu Agama di Jakarta digabungkan menjadi Institut Agama Islam Negeri Al-Jamiah al-Islamiah al-Hukumiyah yang berkedudukan di Yogyakarta yang intinya PTAIN, sedangkan ADIA di Jakarta dijadikan Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Adab.

Setelah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tersebut diundangkan dan mulai berlaku, yakni pada tanggal 9 Mei 1960, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan tersebut, maka Menteri Agama mengeluarkan sebuah Ketetapan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 1960. Dengan penetapan tersebut terbentuklah sebuah panitia baru dengan nama: "Panitia Persiapan Penyelenggaraan al-Jamiah". Panitia ini diketuai oleh Prof. Mr. R.H.A. Soenarjo dengan jumlah anggota 21 orang yang terbagi atas tiga seksi, yakni seksi teknis, seksi formasi personalia, dan seksi administrasi/perengkapan.

Atas kerja keras panitia, maka pada tanggal 13 Juni 1960 panitia melapor ke Menteri Agama tentang hasil kerja panitia, meliputi anggaran keuangan, personalia rencana pelajaran, dan tempat kedudukan masing-masing fakultas.

Berdasarkan atas laporan itu, maka penggabungan dua lembaga yang pada mulanya berdiri masing-masing PTAIN dan ADIA perlu segera dilaksanakan. Berkenaan dengan itu maka berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960 tersebut, Menteri Agama mengeluarkan sebuah Ketetapan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1960 tentang Penyelenggaraan Institut Agama Islam Negeri dan sebagai pelaksanaannya dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan IAIN (Buku Tahunan 1960-1962: 15).





Beberapa pasal dari Ketetapan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1961 dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Institut Agama Islam Negeri "Al-Jamiah" ini terdiri dari:
  - a. Fakultas Ushuluddin yang mempunyai empat jurusan:
    - 1) Dakwah
    - 2) Tasawuf
    - 3) Filsafat
    - 4) Perbandingan Agama
  - b. Fakultas Syari'ah mempunyai tiga jurusan:
    - 1) Tafsir/Hadis
    - 2) Fikih
    - 3) Qadha
  - c. Fakultas Tarbiyah mempunyai delapan jurusan:
    - 1) Pendidikan Agama
    - 2) Pedagogis
    - 3) Bahasa Indonesia
    - 4) Bahasa Arab
    - 5) Bahasa Inggris
    - 6) Khusus (imam tentara)
    - 7) Etnologi dan Sosiologi
    - 8) Hukum dan Ekonomi.
  - d. Fakultas Adab, yang mempunyai empat jurusan:
    - 1) Sastra Arab
    - 2) Sastra Weda
    - 3) Sastra Persia
    - 4) Sejarah/Kebudayaan Islam

2. Tentang pengajaran diatur sebagai berikut:  
Lama pelajaran lima tahun dan mempunyai susunan bertingkat terdiri dari:
  - a. Tingkat pertama disebut *propaedeuse*.
  - b. Tingkat kedua disebut kandidat
  - c. Tingkat ketiga disebut bakaloreat.
  - d. Tingkat keempat disebut doktoral selama dua tahun dan dikahiri dengan ujian doktoral.
3. Mereka yang lulus ujian bakaloreat disebut dengan bakalarius/sarjana muda, dan berhak memakai titel B.A. (*Bachelor of Arts*). Adapun yang lulus ujian doktoral memperoleh sebutan doktorandus/sarjana.

IAIN al-Jamiah diresmikan berdirinya pada tanggal 2 Rabiul Awal tahun 1380 H. Dipilih tanggal tersebut karena tanggal itulah terjadinya peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.

Dalam perkembangan berikutnya IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berkembang menjadi 16 fakultas, yang tersebar di beberapa tempat seperti Banjarmasin, Palembang, Surabaya, Serang, Banda Aceh, Jambi, Padang.

Perkembangan fakultas-fakultas agama di beberapa daerah ini merupakan realisasi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tanggal 3 Desember 1960 No. 11/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Bidang mental/agama/keohanian/penelitian. Untuk mengakomodasi perkembangan IAIN di daerah-daerah maka dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 sebagai pengganti Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960, yang memungkinkan ter-





bentuknya IAIN di daerah-daerah di luar Yogyakarta dan Jakarta. Menurut peraturan yang baru itu sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas dapat digabungkan menjadi satu IAIN.

Dengan adanya peraturan itu, maka muncullah beberapa buah IAIN di luar Jakarta dan Yogyakarta. Jumlah IAIN itu sekarang ada 14 buah setelah sebagian IAIN berubah menjadi UIN, dan sebagian STAIN berubah menjadi IAIN, seperti tertera di bawah ini:

1. IAIN Antasari Banjarmasin.
2. IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. IAIN Sultan Amal Gorontalo.
4. IAIN Imam Bonjol Padang.
5. IAIN Mataram.
6. IAIN Raden Fatah Palembang.
7. IAIN Raden Intan Bandar Lampung.
8. IAIN Maulana Hasanuddin Serang.
9. IAIN Sulthan Toha Saifuddin Jambi.
10. IAIN Sumatera Utara Medan.
11. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
12. IAIN Walisongo Semarang.
13. IAIN Ambon.
14. IAIN Nurjati Cirebon.
15. IAIN Surakarta.

Dalam perkembangan berikutnya, IAIN telah mengalami dinamika perkembangan fakultas menjadi lima fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Syari'ah, Ushuluddin, Adab, dan Fakultas Dakwah, dilengkapi dengan berbagai jurusan dan

program studi.

Upaya-upaya peningkatan IAIN terus dilaksanakan. Di antaranya upaya peningkatan pendanaan, peningkatan peranan organisasi IAIN, kurikulum peningkatan mutu dosen, peningkatan sarana fisik. Untuk itu dilaksanakan beberapa kali musyawarah para rektor IAIN se-Indonesia.

Upaya perbaikan dan peningkatan IAIN ini banyak dilakukan pada masa H.A. Mukti Ali menjadi Menteri Agama, sebagai orang IAIN sejak lama mengajar di IAIN, Mukti Ali amat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh IAIN. Menurut beliau, dan ini sering beliau pidatikan dalam berbagai pertemuan, ada tiga kelemahan pokok IAIN: 1) kekurangan dalam sistem dan metode; 2) kekurangan dalam mental ilmu; 3) kekurangan dalam penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Atas dasar berbagai kelemahan tersebutlah maka diadakan berbagai perbaikan yang dituangkan dalam bentuk Garis-garis Besar Pembinaan IAIN yang meliputi tujuh bidang yaitu, 1) organisasi, 2) kurikulum, 3) personel, 4) materil, 5) pembiayaan, 6) penelitian, 7) kemahasiswaan (Sumardi, 1978: 99). Upaya perbaikan lainnya yang dilakukan pada zaman Mukti Ali menjadi Menteri Agama adalah dilaksanakan rasionalisasi IAIN. Pengertiannya adalah melaksanakan rasionalisasi dengan cara *Phasing Out System* bagi fakultas-fakultas cabang yang tidak memenuhi persyaratan akademik, berangsur-angsur dihapuskan kemudian disalurkan ke fakultas induk di ibu kota provinsi.

Pada masa Mukti Ali juga peningkatan kualitas dosen dilaksanakan cara melaksanakan pendidikan tambahan. Di





mulai sejak tahun 1974/1975 di Jakarta dilaksanakan pelatihan penelitian agama (PLPA), dilatih selama lima bulan. Di Yogyakarta dibuka pula Studi Purna Sarjana (SPS) lamanya sembilan bulan. SPS ini berlangsung sampai sembilan angkatan, yakni angkatan pertama sejak tahun 1974/1975 sampai dengan tahun 1982/1983.

Program Pascasarjana S-2 dan S-3 di IAIN dimulai dari IAIN Jakarta pada tahun 1982 dan IAIN Yogyakarta tahun 1983. Kedua IAIN sampai hari ini telah banyak melakukan master dan doktor dalam bidang Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam.

Disebabkan karena semakin gencarnya tuntutan agar para dosen IAIN ditingkatkan kualifikasinya dari berpendidikan S-1 menjadi S-2 dan S-3, dan juga semakin gencarnya tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan, maka beberapa IAIN di Indonesia diizinkan untuk membuka S-2 (Strata dua) dan S-3 (Strata tiga).

Upaya perbaikan kurikulum terus berjalan secara berkesinambungan, evaluasi terhadap kurikulum terus dilakukan, terakhir penyempurnaan kurikulum nasional pada tahun 1995 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997. Kurikulum dibagi kepada dua macam. Kurikulum inti (kurikulum nasional) yang berlaku untuk seluruh IAIN dan kurikulum lokal yang diberlakukan khusus bagi IAIN setempat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Kurikulum inti (kurikulum nasional) ini dibagi kepada tiga kategori, yaitu mata kuliah umum (MKU), mata kuliah dasar keahlian (MKDK), mata kuliah

keahlian (MKK).

## E. SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

Seperti yang telah diungkapkan terdahulu, sejak IAIN didirikan tahun 1960, lembaga ini telah berkembang ke berbagai kota di Indonesia, yang akhirnya IAIN tersebut yang pada mulanya merupakan cabang dari IAIN Yogyakarta atau Jakarta menjadi IAIN yang berdiri sendiri. Demikianlah hingga tahun 1973 IAIN telah tercatat sejumlah 14 buah di seluruh Indonesia.

IAIN yang telah berdiri sendiri itu, berdasarkan kebutuhan di berbagai daerah membuka cabang-cabang pula di luar IAIN induknya, sehingga IAIN menjadi berkembang di berbagai daerah, dalam perkembangan itu tidak dapat dihindarkan munculnya duplikasi fakultas. Misalnya ada Fakultas Tarbiyah di IAIN induknya, tetapi terdapat pula Fakultas Tarbiyah di cabangnya, dan ini bisa terjadi tidak hanya satu fakultas tetapi terdapat beberapa fakultas. Contoh berikutnya begini, misalnya IAIN Alauddin Ujung Pandang (Makassar) mempunyai Fakultas Tarbiyah di IAIN induk yang berpusat di Makassar, akan tetapi IAIN Alauddin juga memiliki beberapa Fakultas Tarbiyah yang berada di luar kota Makassar, misalnya Fakultas Tarbiyah di Ambon, Ternate, dan lain-lain. Demikian juga dengan fakultas-fakultas lain. Keadaan yang seperti ini ditemukan juga pada IAIN lain.

Untuk menyahuti jiwa dan peraturan yang berlaku, yakni untuk menghindari tidak terjadinya seperti kasus di atas yakni duplikasi fakultas, serta untuk menjadikan fakultas-



fakultas daerah itu mandiri, dan lebih dapat mengembangkan dirinya tidak terikat dengan berbagai peraturan yang agak mengekang oleh IAIN induknya, maka fakultas-fakultas daerah itu dipisahkan dari IAIN induknya masing-masing yang secara administrasi tidak lagi memiliki ikatan dengan IAIN induk masing-masing. Setelah dipisahkan itu berna-malah lembaga ini menjadi STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri), yang mungkin dahulu bernama Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Malang, berubah menjadi STAIN Malang, atau dahulunya bernama Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Padang Sidempuan berubah menjadi STAIN Padang Sidempuan, demikian seterusnya.

Fakultas-fakultas daerah yang memiliki lebih dari satu fakultas di suatu kota digabung menjadi satu dan menjadi STAIN di kota tersebut. Jumlah seluruh STAIN yang ada di seluruh Indonesia adalah 32 buah.

Apakah beda IAIN dan STAIN? Bila mengacu kepada PP No. 30 Tahun 1990, sekarang berubah menjadi PP No. 60 Tahun 1999, bahwa institut adalah menyelenggarakan program akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis. Adapun sekolah tinggi adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu (Bab II Pasal 6 ayat 4 dan 5).

Dalam penjelasan tentang institut disebutkan bahwa program pendidikan yang diselenggarakan pada institut terkait atau sangat dekat berhubungan dengan program-program pendidikan lain. Oleh sebab itu, program-program yang diselenggarakan merupakan satu kelompok atau satu jenis.

Di tingkat institut untuk membagi program kelompok

keilmuan diaplikasikan dalam bentuk fakultas. Misalnya Fakultas Adab, Dakwah, Syari'ah, Tarbiyah, Ushuluddin, sedangkan di tingkat sekolah tinggi penjabaran satu disiplin ilmu tertentu diaplikasikan dalam bentuk jurusan, misalnya jurusan Pendidikan Agama Islam, Jurusan Aqidah Filsafat, jurusan Muamalat.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) se-Indonesia adalah sebagai berikut:

1. STAIN Abdur Rahman Siddik Bangka Belitung
2. STAIN Al Fatah Jayapura
3. STAIN Batu Sangkar
4. STAIN Bengkulu
5. STAIN Bukit Tinggi
6. STAIN Cot Kala Langsa
7. STAIN Curup
8. STAIN Datokarama Palu
9. STAIN Jember
10. STAIN Jurai Siwo Metro Lampung
11. STAIN Kediri
12. STAIN Kendari
13. STAIN Kerinci
14. STAIN Kudus
15. STAIN Malikssaleh Lhokseumaweh
16. STAIN Manado
17. STAIN Padang Sidempuan
18. STAIN Palangkaraya
19. STAIN Palopo
20. STAIN Pamekasan



21. STAIN Pare-Pare
22. STAIN Pekalongan
23. STAIN Ponorogo
24. STAIN Pontianak
25. STAIN Purwokerto
26. STAIN Salatiga
27. STAIN Samarinda
28. STAIN Sorong
29. STAIN Surakarta
30. STAIN Ternate
31. STAIN Tulung Agung
32. STAIN Watampone

## F. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

Sejak tahun 1990-an telah mulai ada pemikiran tentang pengembangan IAIN menjadi universitas. Prof. Dr. Harun Nasution, Direktur Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah telah membuka wacana ke arah tersebut, begitu juga Tarmizi Taher yang pada waktu itu Menteri Agama juga melemparkan ide yang sama. Secara bertahap diadakan persiapan ke arah terwujudnya UIN. Mula pertama sekali yang melakukan persiapan itu adalah IAIN Syarif Hidayatullah, sehingga pada tahun 2002 resmi berubah IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidayatullah.

Apa sebetulnya inti dan hakikat dan Universitas Islam Negeri itu? Sesuai dengan namanya universitas, berarti mengandung makna bahwa ilmu-ilmu yang dikembangkan tidak hanya ilmu-ilmu agama saja, tetapi telah dikembangkan

kan ke berbagai disiplin ilmu-ilmu lainnya yang tergolong ilmu-ilmu kealaman (*natural science*), ilmu-ilmu sosial (*sosial science*), dan ilmu humaniora. Jika dilihat dari perjalanan sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia, maka perjalanan evolusi perkembangan ini sudah saatnya Perguruan Tinggi Islam itu menjadi universitas. Mula pertama berbentuk perguruan tinggi (PTAIN) ekuivalenlah sekarang dengan tingkatan sekolah tinggi, kemudian berevolusi menjadi institut (IAIN) dan setelah ini telah banyak mengharapkan untuk berkembang menjadi universitas.

Dilihat dari sudut pandangan Islam bahwa konsep Perguruan Tinggi Islam yang ideal itu adalah berbentuk universitas. Sebab, konferensi Islam internasional tentang pendidikan telah mengungkapkan bahwa ilmu itu pandangan Islam terbagi kepada dua.

*"Planning education to be based on the classification of knowledge into two categories: (a) Perennial knowledge derived from the Qur'an and the Sunah meaning all shari'ah oriented knowledge relevant and related to them, and (b) Acquired knowledge susceptible to quantitative growth and multiplication, limited variation and cross cultural borrowing as long as consistency with shari'ah as the source of values is maintained." (First World Conference on Muslim Education: 4)*

Pembagian ilmu menurut pandangan Islam yang dibagi kepada dua bagian yaitu *perennial knowledge* dan *acquired knowledge*, yang oleh konferensi internasional tentang pendidikan telah disusun mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Di dalam penyusunan subjek-subjek tersebut telah dirancang, seluruh ilmu yang mesti dikuasai oleh setiap Muslim. Aplikasinya tentu tidak terlepas dari tujuan



institusional dari suatu lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini tentu ada lembaga pendidikan yang penekanannya kepada pendalaman ilmu yang tergolong *acquired knowledge* dan ada pula *perennial knowledge* yang masing-masingnya mesti pula menempatkan keseimbangan yang wajar sesuai dengan tujuan institusional masing-masing pula, namun untuk merealisasi kedua jenis ilmu itu secara utuh tidak boleh tidak sarannya adalah universitas. Karena universitaslah pada prinsipnya mengembangkan seluruh objek ilmu pengetahuan, baik yang tergolong *perennial knowledge* maupun *acquired knowledge*. Hal ini di dunia Islam sejak periode pembaruan pada awal abad ke-20 sampai sekarang membangun perguruan tinggi dalam bentuk universitas, misalnya universitas Aligarh (Aligarh Muslim University) di Aligarh India. Universitas al-Azhar di Kairo yang dahulunya adalah terpusat kepada pengembangan ilmu agama saja sekarang telah mengasuh berbagai fakultas di luar disiplin ilmu agama. Universitas Islam internasional yang lahir dari setelah diadakannya konferensi Islam internasional. Sebagai contoh misalnya Islamic International University Kuala Lumpur mengajarkan ilmu-ilmu yang tergolong *perennial knowledge* dan ilmu-ilmu yang tergolong *acquired knowledge*. Secara konsepsi keilmuan menurut pandangan Islam, kehadiran Universitas Islam Negeri tidak ada permasalahan.

Sejak tahun 2002 telah terjadi perubahan bagi sebagian IAIN menjadi UIN, yaitu IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berubah menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2002 tanggal 20 Mei 2002. Seterusnya diikuti oleh beberapa IAIN dan satu STAIN. IAIN yang telah berubah wujud menjadi UIN itu

adalah. IAIN Syarif Hidayatullah menjadi UIN Syarif Hidayatullah. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berubah menjadi UIN Suna Kalijaga Yogyakarta, IAIN Syarif Qasim Pekanbaru berubah menjadi UIN Syarif Qasim Pekanbaru, IAIN Alauddin Makassar berubah menjadi UIN Alauddin Makassar, IAIN Sunan Gunung Jati Bandung berubah menjadi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, STAIN Malang berubah menjadi UIN Malang.

## G. PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS)

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta adalah perguruan tinggi Islam yang tertua di Indonesia. Setelah fakultas agamanya dinegerikan menjadi PTAIN tahun 1950, kemudian PTAIN digabungkan dengan ADIA menjadi IAIN, dan dari IAIN fakultas-fakultas daerahnya menjadi STAIN, fakultas-fakultas yang non-agama UII (Ekonomi, Hukum dan Pendidikan) tetap menjadi fakultas swasta. Fakultas-fakultas non-agama ini menjadi berkembang dengan tumbuhnya berbagai fakultas seperti Kedokteran, Teknik, Psikologi.

Universitas Islam yang semacam ini saat sekarang sudah tersebar luas di Indonesia, ada yang bentuknya diasuh oleh organisasi-organisasi Islam dan ada pula yang berbentuk yayasan yang tidak bernaung di bawah naungan organisasi Islam. Di antara universitas-universitas Islam tersebut adalah UISU (Universitas Islam Sumatera Utara) di Medan, Universitas Islam Bandung (UNISBA) di Bandung, Universitas Islam Jakarta (UIJ), Universitas Muslimin Indonesia (UMI) di



Makassar, Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta.

Universitas Islam di bawah asuhan langsung organisasi Islam, tercatat misalnya Universitas Muhammadiyah, Universitas Nahdatul Ulama, Universitas Alwashliyah, Universitas Islam ini baik yang diasuh oleh organisasi keislaman, maupun yang merupakan yayasan yang independen, mengasuh fakultas-fakultas keagamaan dan non-keagamaan, fakultas keagamaan itu berada di bawah pengawasan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) pada wilayah setempat. Sedangkan fakultas yang non-keagamaan berada di bawah pengawasan Kopertis (Koordinator Perguruan Tinggi Swasta).

Untuk menetapkan ciri keislaman pada universitas Islam swasta tersebut, pendidikan agama Islam pada fakultas non keagamaan tidak terbatas diberikan dua SKS saja, seperti yang dilaksanakan di universitas-universitas negeri. Ciri khas dari universitas Islam swasta adalah memberikan mata pelajaran agama Islam melebihi bobot SKS yang diberikan di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi yang bukan berbasis Islam.

## BAB 2

### IAIN DI ERA GLOBALISASI: PELUANG DAN TANTANGAN DARI SUDUT PENDIDIKAN ISLAM

#### A. PENDAHULUAN

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta, setelah menggabungkan dua lembaga pendidikan tinggi Islam di kala itu, yaitu PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) yang berkedudukan di Yogyakarta dengan ADIA (Akademik Dinias Ilmu Agama) yang berkedudukan di Jakarta. Setelah diresmikan IAIN di Yogyakarta ini, secara bertahap berkembanglah IAIN di seluruh Indonesia, yang sampai dengan tahun 1973 berjumlah 14 buah.

Didirikannya lembaga ini dengan maksud untuk memberi pengajaran dan pendidikan universitas serta menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. (Buku Tahunan: 1960: 28)

Dalam perjalanan panjang selama 52 tahun IAIN di Indonesia ini telah banyak menghasilkan lulusannya baik pada strata satu, maupun pada strata dua dan tiga. Dengan demikian kiprah para alumninya telah tersebar luas di masyarakat, yang meliputi sebagai pendidik, da'i, birokrat, politisi, pers, wiraswasta, dan lain sebagainya.



Pada beberapa dekade terdahulu, sesuai dengan tuntutan pembangunan di tanah air, alumnus IAIN telah banyak terserap sebagai pegawai negeri yang kebanyakan bertugas di lingkungan Kementerian Agama. Pada beberapa tahun belakangan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang *zero growth*, yang bermakna bahwa pengangkatan pegawai berdasarkan kepada penggantian yang meninggal dan pensiun. Keadaan yang seperti ini berdampak kepada banyaknya alumni IAIN yang tidak bisa diangkat sebagai pegawai negeri, sedangkan persiapan mereka untuk terjun ke dunia kerja tidak memungkinkan karena kemampuan yang terbatas. Kenyataan ini merupakan suatu problema yang amat serius untuk dipecahkan oleh pengambil kebijakan di lingkungan IAIN.

Selain dari persoalan pokok yang dialami oleh *output* IAIN, dari sisi *raw input* IAIN pun pada saat sekarang ini tidak pula kecil masalah yang dihadapi. Sejak dikeluarkannya UUSPN (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) UU No. 2 Tahun 1989, dan diikuti dengan peraturan pemerintah mengenai pendidikan antara lain PP Nomor 28 dan 29 Tahun 1990, yaitu mengenai pendidikan dasar dan pendidikan menengah, yang diikuti pula dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama yang mempertegas madrasah adalah sekolah yang bercirikan agama Islam. Selanjutnya lahir pula UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang juga memperkuat madrasah sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Madrasah sebagai sekolah yang bercirikan agama Islam bermakna bahwa kurikulum madrasah sama dengan kurikulum sekolah yang diberi tambahan tentang ilmu agama sebagai salah satu cirinya.

Dengan demikian, pada tingkat ibtidaiyah kurikulumnya sama dengan sekolah dasar, tingkat tsanawiyah sama dengan SMP, sedangkan tingkat Madrasah Aliyah sama dengan SMA, yang pada masing-masing tingkat diberi bobot ilmu agama yang lebih dari yang diberikan di sekolah.

Madrasah Aliyah sebagai sumber utama *raw input* IAIN memiliki kesamaan dengan SMA dari sudut kurikulum pengetahuan umum, karena itu banyak tamatan madrasah aliyah yang menjadikan tujuan utama melanjutkan studi tidak lagi ke IAIN tetapi ke perguruan tinggi umum, hal ini berpengaruh kepada terjaringnya *raw input* IAIN yang berkualitas.

## B. IAIN DAN TUNTUTAN PERKEMBANGAN ZAMAN

Sejak awal berdirinya IAIN—bahkan sejak PTAIN dan ADIA berdiri—telah mengkhususkan dirinya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mendalami ilmu agama, ciri khas tersebut tetap dipertahankan hingga sekarang, terlebih lagi setelah pemerintah mengeluarkan PP No. 30 Tahun 1990 yang kemudian disempurnakan dengan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, yang telah memberikan batasan secara eksplisit tentang pengertian institut. Pada Bab III Pasal 6 ayat 5, menjelaskan bahwa institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis. (PP No. 60 Tahun 1999).

Jiwa dari didirikannya IAIN dapat dilihat pada konse-



dran Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960 tentang Pembentukan IAIN. Hal ini terkait erat untuk memperbaiki dan memajukan pendidikan tenaga ahli agama Islam guna keperluan pemerintah dan masyarakat. Di dalam pemahaman tentang tenaga ahli agama Islam terkandung makna sosok alumni IAIN yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai problem kemasyarakatan yang berkaitan dengan masalah agama. Agar dapat melaksanakan fungsi dimaksud, IAIN mesti dibekali dengan ilmu-ilmu umum, yang sejalan dengan fakultas dan jurusan yang dipilihnya. Kesadaran tentang pentingnya ilmu-ilmu umum dipelajari pada lembaga pendidikan Islam telah tumbuh sejak awal abad ke-20 di Indonesia. Kehadiran ilmu-ilmu umum itu adalah sebagai upaya untuk mendampingi ilmu agama yang dipelajarinya di fakultas/jurusan masing-masing dan untuk memperluas cakrawala berpikir mahasiswa.

Akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terasa sekali cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi. Banyak hal dari perubahan-perubahan itu yang menuntut untuk diberikan solusi menurut pandangan agama. Karena itu, pendidikan dan pengajaran di IAIN dituntut untuk bersifat dinamik. Sejalan dengan itu, tuntutan untuk pembaruan kurikulum tidak dapat dielakkan.

Selain dari tuntutan perubahan kurikulum di IAIN juga lahir pemikiran pembaruan yang bersifat fundamental untuk menjawab tuntutan kemajuan zaman. Misalnya tuntutan dunia kerja, perubahan IAIN menjadi universitas. Tuntutan dunia kerja berawal dari semakin kecilnya kesempatan alumni IAIN untuk dapat diangkat sebagai pegawai negeri, disebabkan kebijakan pemerintah *zero growth*. Hal ini mela-

hikan pemikiran tentang pekerjaan apakah yang mungkin dilakukan oleh seorang alumni IAIN sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Untuk itu perlu dibuat semacam tabel yang berisikan sejumlah lapangan kerja yang mungkin untuk diisi oleh alumni IAIN. Sebetulnya jika diinventaris banyak *job* kerja yang dapat dilakukan oleh alumni IAIN, misalnya guru agama, dosen, konsultan hukum Islam, mubaligh, konsultan psikologi agama dan pemikiran Islam, penulis, dan wartawan. Akan tetapi karena masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap berbagai profesi di atas, sehingga berdampak kepada *income* yang tidak memadai bagi yang melaksanakan profesi tersebut, sehingga profesi pegawai negeri tetap sebagai sesuatu yang diutamakan.

Atas dasar demikian, timbul pemikiran agar kiranya alumni IAIN dibekali dengan berbagai keterampilan yang dapat digunakannya sebagai bekal hidup di masyarakat. Pemikiran untuk mengubah IAIN menjadi universitas, tentu atas dasar pertimbangan perluasan ruang gerak IAIN.

## C. BEBERAPA PROBLEMA DAN SOLUSINYA

### 1. Raw Input

*Raw input* IAIN terdiri dari tamatan Madrasah Aliyah (MA), pesantren, Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Masing-masing lembaga pendidikan tersebut memiliki spesifiknya sendiri-sendiri bila dikaitkan sebagai sumber mahasiswa. Madrasah Aliyah memiliki kekhususan sebagai sekolah yang berciri khas agama Islam. Tamatan sekolah ini akan banyak relevansinya dengan kurikulum IAIN. Pesantren lembaga yang berbasis



ilmu agama dan sangat relevan dengan kurikulum IAIN. SMA dan SMK, berbasis pengetahuan umum sedikit agama dan bahasa Arab. Tamatan ini apabila melanjutkan ke IAIN dituntut untuk menambah pengetahuan agama dan bahasa Arabnya jika ia mengambil program studi ilmu agama, sehingga tidak menemukan kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kurikulum IAIN.

## 2. Tenaga Pengajar

Sejak diberlakukan standar minimal pendidikan dosen yang mengajar di perguruan tinggi, maka IAIN telah berupaya untuk menyesuaikan tuntutan tersebut sehingga tamatan S-2 telah mendominasi pendidikan dosen IAIN, sebagian telah ada yang berpendidikan doktor dan guru besar. Kendatipun demikian, beberapa permasalahan dosen IAIN juga ditemukan di antaranya, sedikitnya hasil penelitian yang dipublikasikan pada majalah-majalah yang terakreditasi. Begitu juga riset-riset yang bersumber dari hibah bersaing kecil sekali yang memperolehnya. Tulisan-tulisan ilmiah dalam buku cetak, baru sebagian dosen IAIN yang melaksanakannya. Pemakalah-pemakalah pada seminar nasional dan internasional masih sangat terbatas jumlahnya.

## 3. Output

Permasalahan yang paling sering muncul dari output IAIN adalah tentang lapangan kerja, dan persoalan ini tidak hanya dialami oleh alumni IAIN, tetapi hampir seluruh alumni perguruan tinggi. Timbul pertanyaan, “Apa yang dapat diperbuat untuk itu?” Tentu seperti yang telah diuraikan terdahulu, bahwa sikap mental dan menggantungkan

harapan sebagai pegawai negeri semata-mata harus dikikis. Jalan keluarnya yaitu IAIN harus memberikan keterampilan berwiraswasta kepada mahasiswanya adalah suatu keharusan. Keterampilan itu dapat diberikan dalam bentuk intra kurikuler, ekstrakurikuler, ataupun pelatihan-pelatihan yang terjadwal.

Selain dari itu, pengembangan keprofesian yang dimiliki oleh alumni IAIN harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan serta dapat “dijual” di masyarakat—artinya masyarakat membutuhkannya.

## 4. Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar ini tergantung kepada dua hal pokok: *pertama*, sarana dan fasilitas; *kedua*, keterampilan tenaga mengajar. Sampai sekarang masalah *pertama* pada umumnya baru terpenuhi hal-hal yang bersifat primer. Adapun masalah keterampilan tenaga pengajar masih perlu ditingkatkan. Selain dari keterampilan mengajar, sikap mental adalah salah satu yang paling menentukan kesuksesan proses belajar mengajar.

### a. Kurikulum

Kurikulum dapat diibaratkan sebagai jalan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan. Dalam arti sempit kurikulum adalah mata pelajaran yang akan diajarkan. Adapun dalam arti luas adalah seluruh kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah, karena itulah kurikulum itu dibagi kepada intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan *hidden* kurikulum.





Permasalahan yang dirasakan pada kurikulum IAIN ini, perlu perampingan, sehingga mata kuliah yang betul-betul terarah kepada pembentukan indikator-indikator individu yang ingin diciptakan. Tumpang tindih pembahasan dalam bidang ilmu agama sering muncul, dan dapat dijadikan dalam bentuk yang utuh. Selain dari itu, perlu diprogram jenis keterampilan yang mungkin dapat diwujudkan.

#### b. Kesiapan Menghadapi Globalisasi

Secara konsepsional, pendidikan Islam itu bertujuan untuk membentuk pribadi Muslim seutuhnya mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhkan hubungan yang harmonis setiap pribadi dengan Allah, manusia dan alam semesta. Dengan demikian, pendidikan Islam itu berupaya untuk mengembangkan individu seutuhnya sekaligus pewarisan nilai-nilai Islam (Daulay, 1991: xvi).

Lebih spesifik lagi tujuan pendidikan Islam itu tergambar pada rumusan konferensi pendidikan Islam internasional yang pertama tahun 1977, yaitu:

*Education should aim at the balanced growth of the total personality of Man through the training of Man's spirit, intellect, the rational self, feelings and bodily sense. Education should therefore cater for the growth of Man and all aspects: spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic both individually and collectively and motivate all these aspects towards goodness and the attainment of perfection. The ultimate aim of Muslim education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual, the community and humanity at large. (Conference on Muslim Education: 4)*

Secara lebih khusus lagi, pendidikan Islam itu berupaya untuk membentuk khalifah Allah di Bumi sekaligus sebagai 'abd Allah (sesuai tuntunan Al-Qur'an surat *al-Baqarah* (2) ayat 30 dan surat *adz-Dzariyat* (51) ayat 56). Pakar-pakar pendidikan Islam kontemporer pun seperti: Naquib Al Attas, Hasan Langgulung, dan Ali Ashraf, juga berpendapat yang intinya adalah menempatkan pendidikan Islam itu pada proporsi yang sesungguhnya, yang pada beberapa abad sebelumnya tidak demikian.

Reformasi pendidikan Islam telah dimulai pada pengujung abad ke-19 dan awal abad ke-20. Salah satu di antaranya yang paling mendasar adalah meletakkan kedudukan ilmu dalam pandangan Islam. Telah lama terjadi di dunia Islam konsep keilmuan melenceng dari posisi yang sebenarnya. Ilmu yang berkembang pada masa sebelum reformasi itu adalah ilmu-ilmu yang terfokus kepada *hablun minallah* saja, dan mengabaikan ilmu yang berkenaan dengan *hablun minannas* dan *hablun minalalam*.

Konferensi Islam internasional tentang pendidikan telah mencoba menata kurikulum pendidikan Islam yang sesuai dengan semangat pembaruan pendidikan Islam tersebut:

*Planning of education to be based on the classification of knowledge into two categories: (a) "Perennial knowledge" derived from the Qur'an and the Sunah meaning all shari'ah-oriented knowledge relevant and related to them, and (b) "acquired knowledge" susceptible to quantitative growth and multiplication, limited variations and cross cultural borrowing as long as consistency with shari'ah as the source of values is maintained. (First World Conference on Muslim Education: 4)*



Pembagian ilmu menurut pandangan Islam yang dibagi kepada dua bagian, yaitu *perennial knowledge* dan *acquired knowledge* yang oleh konferensi internasional tentang pendidikan telah disusun mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Di dalam penyusunan subjek-subjek tersebut telah dirancang seluruh ilmu yang mesti dikuasai oleh setiap Muslim. Aplikatifnya tentu tidak lepas dari tujuan institusional dari suatu lembaga pendidikan tersebut. Dalam hal ini tentu ada lembaga pendidikan yang penekanannya kepada pendalaman ilmu yang tergolong *acquired knowledge* dan ada pula *perennial knowledge* yang masing-masingnya mesti pula menempatkan keseimbangan yang wajar sesuai dengan tujuan institusional masing-masing pula.

IAIN sejak berdirinya telah berupaya untuk merancang kedua jenis ilmu tersebut dalam program kurikulumnya secara seimbang dengan tetap mengedepankan tujuan institusionalnya, yakni untuk menyiapkan tenaga dalam bidang ilmu agama. Penyusunan kurikulum yang tergolong ilmu *acquired knowledge* disesuaikan dengan fakultas dan jurusannya.

Di dalam menyahuti perkembangan era globalisasi yang mau tidak mau akan muncul, perlu mendapat perhatian dalam beberapa hal. *Pertama*, kurikulum, permasalahan yang muncul adalah kurikulum bagaimanakah yang adaptif buat dunia global tersebut. Ilmu-ilmu *basic* tetap ilmu *perennial knowledge*, tetapi bagaimana supaya outputnya bernuansa global. *Kedua*, kualitas, sudah dimaklumi bahwa era global tersebut adalah era kompetitif, pada era ini dikedepankan adalah keunggulan. Untuk meningkatkan kualitas tersebut tidak mungkin semata-mata diserahkan kepada IAIN saja

dalam arti memadakan dan memanfaatkan fasilitas, sarana dan faktor-faktor pendidikan yang ada saja, tetapi diharapkan seluruh civitas akademika IAIN turut terlibat di dalamnya, terlebih-lebih mahasiswanya. Mahasiswa di abad global tidak hanya menggantungkan pembinaan dirinya pada berlangsungnya proses belajar dan mengajar semata-mata. Fasilitas pembelajaran yang terbuka luas bagi mahasiswa di era global harus dimanfaatkan, dengan demikian proses belajar mengajar tersebut tidak hanya tergantung dan terfokus kepada intrakurikuler saja. Dalam hal ini lembaga formal (IAIN) akan bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Dalam kaitan ini program kerja sama dengan lembaga-lembaga di luar IAIN memiliki kedudukan yang amat penting. Kualitas hasil pendidikan ditentukan oleh banyak faktor, antara lain sarana dan fasilitas, tenaga pengajar, peserta didik, lingkungan yang kondusif. Kesemuanya ini mesti berorientasi global, bila tidak, sudah dapat dibayangkan tidak mungkin dapat menyahuti tuntutan global tersebut.

Masalah yang ketiga adalah kelembagaan. Pertanyaannya, masihkah relevan di masa yang akan datang lembaga institut saja? Mengingat semakin bervariasi minat dan tuntutan masyarakat pada era global tersebut. Boleh jadi tuntutan untuk mengubah IAIN menjadi universitas di masa yang akan datang kelihatannya semakin mendapat tempat. Mengubah IAIN menjadi universitas bukanlah mudah, banyak kendala intern dan ekstern yang muncul. Akan tetapi karena ia merupakan tuntutan dan kebutuhan masa depan, kesulitan tersebut harus dicari jalan penyelesaiannya.



### C. IAIN dengan Mandat yang Diperluas

IAIN dengan mandat yang diperluas maksudnya adalah bahwa IAIN tidak hanya mengajarkan ilmu agama, akan tetapi diperkenalkan membuat disiplin ilmu lain, seperti psikologi.

### D. IAIN Menuju UIN

Wacana tentang IAIN menjadi universitas telah muncul beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada masa Tarmizi Taher menjadi Menteri Agama. Pemikiran itu juga didukung sepenuhnya oleh Prof. Dr. Harun Nasution yang ketika itu beliau menjadi Direktur Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Akhirnya wacana itu pun berkembanglah di kalangan civitas akademika IAIN di seluruh Indonesia terutama para pemimpinnya, karena itu tidak heran apabila ada pertemuan berskala nasional para pimpinan IAIN selalu saja membicarakannya, baik dalam diskusi formal maupun nonformal.

Ide dan cita-cita perubahan itu sungguh menarik, sebab IAIN yang selama ini berstatus institut, di mana pengembangan keilmuannya terbatas dalam bidang ilmu agama saja, akan berkembang kepada cakupan yang lebih luas, yakni universitas yang dimaknai dengan pengembangan keilmuan dalam berbagai rumpun pokok keilmuan.

Ditinjau dari segi pengertian universitas dan institut, terlihat bahwa universitas lebih luas jangkauan keilmuan yang dikembangkan dibanding institut, oleh karena universitas mengembangkan sejumlah disiplin ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian. Adapun institut mengembangkan sekelompok ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian

yang sejenis. Dalam PP No. 60 Tahun 1999 terlihat bahwa universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu, sedangkan institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis (PP No. 60 Tahun 1999, Pasal 6 ayat 5, 6).

Sejak dilangsungkannya konferensi sedunia pertama mengenai pendidikan Islam di Mekkah tahun 1977, maka timbullah upaya untuk mendirikan universitas Islam yang betul-betul mendasari sistem pendidikannya dengan filsafat pendidikan Islam.

Konferensi Islam Internasional tentang pendidikan Islam tersebut telah berhasil merumuskan konsep ilmu yang akan dikembangkan di lembaga pendidikan Islam termasuk universitas. Menurut hasil konferensi tersebut ilmu terbagi dua: *pertama*, ilmu-ilmu abadi (*perennial knowledge*) yang berdasar kepada wahyu, misalnya Al-Qur'an dan Sunah serta semua ilmu yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunah. *Kedua*, ilmu-ilmu peralihan (*acquired knowledge*) termasuk di dalamnya ilmu sosial dan ilmu kealaman dan aplikasinya, dan di dalam penyusunan kurikulum pendidikan Islam itu, kedua ilmu dimaksud mesti tercakup pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

Selain dari yang disebutkan di atas, universitas Islam itu juga mesti bercirikan masuknya nilai-nilai Islam ke dalam setiap disiplin ilmu yang dikembangkan mencakup ilmu sosial, humaniora, dan ilmu kealaman. Mengenai hal ini, telah banyak perbincangan para pakar tentang bagaimana upaya





yang dilakukan dalam memasukkan nilai-nilai Islami ke dalam disiplin ilmu yang diutarakan terdahulu. Almarhum Harun Nasution, telah membentangkan tentang perbedaan antara universitas Islam dan universitas lainnya. Menurut beliau, perbedaannya di perguruan tinggi umum lainnya itu yang diajarkan adalah ilmu pengetahuan Barat yang sekuler, tidak dikaitkan dengan agama, terutama tidak dikaitkan dengan Tuhan. Kalau di Universitas Islam Negeri semua ilmu-ilmu sains itu dikaitkan dengan Tuhan. Umpamanya di Universitas umum itu diajarkan yang hukum alam itu sendiri merupakan ciptaan natur atau alam itu sendiri. Universitas Islam Negeri tidak akan memakai konsep yang demikian. Konsepnya adalah apa yang Al-Qur'an sebut *Sunatullah*. *Sunatullah* itu adalah hukum alam ciptaan Tuhan.

Jadi, memang ciri yang paling prinsip dalam universitas Islam adalah konsep dasar filsafat keilmuannya. Pada universitas Islam konsep dasar keilmuan itu berdasar kepada konsep ilmu menurut Islam, seperti yang telah digambarkan di atas.

#### D. KESIMPULAN/PENUTUP

IAIN telah tumbuh dan berkembang sejak beberapa dasawarsa yang lalu, dan telah menunjukkan keberadaannya sebagai lembaga pendidikan tinggi. Hasilnya telah banyak alumninya yang berkiprah di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara. Pelayanan kehidupan beragama, seperti dai, guru agama, pegawai, pemikir, dan hakim agama adalah merupakan profesi alumni IAIN.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka

IAIN harus lebih membuka diri untuk menyahuti tuntutan masa depan. Dalam rangka untuk menyahuti perkembangan zaman ada tiga hal pokok yang harus menjadi perhatian: *pertama*, masalah kurikulum yang senantiasa dievaluasi agar sesuai dengan kemajuan zaman; *kedua*, kualitas; dan *ketiga*, pembaruan kelembagaan.

Idealnya, konsep Universitas Islam adalah mengembangkan berbagai ilmu baik yang tergolong *perennial knowledge* maupun *acquired knowledge*. Akan tetapi bukanlah sesuatu yang salah dalam konsep pendidikan Islam seandainya target ideal itu belum tercapai untuk membina suatu lembaga yang penekanannya kepada salah satu dari ilmu tersebut sepanjang tidak mengabaikan salah satu jenis ilmu lainnya. IAIN—sebelum bisa menjadi sebuah universitas—penekanannya tetap kepada ilmu yang tergolong *perennial knowledge*, dengan tidak mengabaikan mata kuliah yang tergolong kepada ilmu *acquired knowledge* yang relevan dengan fakultas dan jurusan.



## BAB 3

# PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM DI MASA DEPAN (PELUANG DAN TANTANGAN)

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak dibukanya Sekolah Tinggi Islam di Jakarta pada bulan Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka. Tahun 1946 STI ini pindah ke Yogyakarta, kemudian STI berubah menjadi UII (Universitas Islam Indonesia). Fakultas Agama UII dinegerikan menjadi PTAIN, kemudian muncul IAIN dan STAIN, dan seterusnya UIN. Selain dari itu muncul pula pendidikan tinggi Islam swasta, baik yang berbentuk universitas maupun sekolah tinggi, Seperti yang telah diuraikan terdahulu.

Kehadiran lembaga pendidikan tinggi tersebut adalah merupakan sahutan terhadap kebutuhan masyarakat untuk merealisasikan kehidupan beragama di tanah air ini. Masyarakat Indonesia yang religius meletakkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama adalah mendudukkan betapa urgennya kedudukan agama di Indonesia

Perjalanan lembaga ini yang sudah lebih dari setengah abad telah memberikan sumbangan yang amat bermakna bagi pembangunan bangsa dan negara. Produk-produknya telah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat yang tentunya merupakan aset bangsa yang amat berharga.

Dinamika perkembangan masyarakat bergulir terus tidak bisa dibendung, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan dahsyat bagi kehidupan manusia, baik cara pandang maupun gaya hidupnya. Perguruan tinggi adalah lembaga yang terkait erat dengan masyarakat, sebab input perguruan tinggi berasal dari masyarakat dan output perguruan tinggi diserap oleh masyarakat, karena itulah perguruan tinggi mesti peka terhadap perkembangan masyarakat.

Salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perguruan tinggi di masa depan adalah bagaimana perguruan tinggi tersebut dapat menjawab berbagai problema yang muncul di masyarakat akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tentunya tidak terlepas lembaga pendidikan tinggi agama Islam. Tantangan yang muncul di hadapan kita saat sekarang adalah tantangan globalisasi. Banyak dampak globalisasi yang muncul bila dikaitkan dengan perguruan tinggi. Antara lain tantangan persaingan global, tantangan relevansi pendidikan tinggi dengan kemajuan zaman, khusus buat perguruan tinggi agama tantangan tersebut dapat ditambahkan dengan tantangan kehidupan religius dan moral.

Bertolak dari tantangan-tantangan tersebut, apa yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi khususnya perguruan tinggi agama sehingga ia *survive* dalam menghadapi tantangan tersebut.





## B. PETA PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

Sebelum kita bahas peta pendidikan tinggi Islam, perlu dicari apa batasan pendidikan tinggi Islam.

1. Pendidikan tinggi Islam adalah sekolah tinggi atau institut yang konsentrasi pengembangan keilmuannya adalah ilmu-ilmu agama Islam.
2. Universitas yang di dalam statutenya menyebutkan Universitas Islam serta menyelenggarakan perkuliahan ilmu-ilmu agama Islam.

Untuk menganalisis peta pendidikan tinggi Islam di Indonesia perlu dikedepankan analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Oleh karena beragamnya perguruan tinggi Islam, maka analisis SWOT yang dikemukakan yang bersifat umum yang dimiliki oleh hampir seluruh perguruan tinggi Islam.

### 1. *Strengths*

- a. Dukungan ladsan filosofi Pancasila, Undang-Undang dasar 1945, dan keputusan-keputusan politik yang memberi peluang untuk eksisnya lembaga pendidikan tinggi Islam.
- b. Dukungan umat Islam Indonesia yang menginginkan agar adanya lembaga pendidikan tinggi Islam di Indonesia.
- c. Banyaknya lembaga pendidikan Islam tingkat dasar dan menengah yang menjadi *raw input* bagi pendidikan tinggi Islam, seperti pesantren, sekolah, dan madrasah.

### 2. *Weakness*

- a. Pendanaan yang terbatas, sehingga berdampak kepada pengembangan yang terbatas pula.
- b. Sumber daya manusia pengelolanya baik tenaga kependidikan maupun dosen masih terbatas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- c. Terbatasnya sarana dan fasilitas.
- d. Terbatasnya aset-aset yang dapat dikembangkan guna dijadikan sumber dana.

### 3. *Opportunities*

- a. Harapan masyarakat terutama umat Islam sangat besar terhadap pendidikan tinggi Islam.
- b. Semakin sadarnya masyarakat Indonesia terutama umat Islam tentang kedudukan perguruan tinggi dalam era globalisasi guna membentuk manusia unggul.
- c. Semakin banyak lembaga pendidikan tinggi Islam yang berkualitas sehingga digandrungi masyarakat.

### 4. *Threats*

- a. Masih banyak perguruan tinggi Islam yang masih dalam proses pembinaan, sehingga dikhawatirkan kalah bersaing di era persaingan sekarang.
- b. Semakin sulitnya mendapat lowongan kerja bagi lulusan pendidikan tinggi Islam terutama alumni ilmu-ilmu keagamaan.
- c. Belum berdirinya lembaga Pendidikan Menengah Keagamaan Negeri (MAK Negeri), yang merupakan lembaga pendidikan yang berdiri sendiri di sam-



ping Madrasah Aliyah. Lembaga inilah diharapkan untuk menjadi *raw input* bagi IAIN/STAIN dan UIN serta sekolah tinggi, institut, dan universitas yang mengonsentrasikan keilmuannya pada ilmu-ilmu agama Islam.

- d. Belum terumuskannya konsep Islamisasi ilmu, sehingga ciri keislamannya pada universitas Islam belum kelihatan dengan jelas.

## 1. Perguruan Tinggi Islam ke Depan

### a. Tantangan Globalisasi

Dunia tanpa batas adalah kenyataan hidup kita saat sekarang, sekat-sekat batas antarnegara telah menipis. Di dunia yang seperti ini maka arus keluar masuk, manusia, jasa, teknologi, barang ke suatu negara adalah sesuatu yang lumrah. Selain dari itu, saling pengaruh budaya pun tidak bisa dihindari. Pengaruh ini semua tidak bisa dihindari dan akan terjadi persaingan global. Pada alam kompetitif maka kualitas menjadi andalan. Karena kualitas menjadi andalan, maka peranan perguruan tinggi semakin dominan untuk membentuk manusia berkualitas tersebut. Jadi, dengan demikian perguruan tinggi masa depan itu adalah perguruan tinggi bermutu.

### b. Tantangan Perkembangan Ilmu Teknologi

Sejak keberadaan umat manusia di Bumi, secara evolusi dan gradual telah terjadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak penemuan-penemuan baru sebagai hasil dari upaya manusia mengembangkan ilmu tersebut. Di pandang dari sudut konsep keilmuan dalam Islam, ilmu itu

terbagi kepada dua macam, sesuai dengan hasil konferensi pendidikan Islam sedunia, yaitu ilmu yang tergolong *perennial knowledge* dan ilmu yang tergolong *acquired knowledge*. Ilmu *perennial knowledge* adalah ilmu yang bersumber dari wahyu, sedangkan ilmu *acquired knowledge* adalah ilmu yang bersumber dari perolehan manusia. Dalam konsep Islam kedua jenis keilmuan itu menyatu dalam satu kesatuan.

Bertolak dari konsep tersebut, maka idealnya suatu lembaga pendidikan tinggi Islam adalah mengembangkan kedua ilmu secara simultan, tanpa memisahkannya apalagi mempertentangkannya. Untuk mengembangkan kedua ilmu tersebut secara seimbang, maka perlu dirancang pengembangan kedua ilmu tersebut.

Dalam rangka perancangan tersebut, saat sekarang telah berkembang IAIN yang bercorak institut menjadi universitas. Institut hanya mengembangkan satu kelompok ilmu tertentu, sedangkan universitas mengembangkan sejumlah disiplin ilmu. Sebelum sampai ke arah pengembangan ke arah universitas, maka terlebih dahulu dikembangkan IAIN dengan mandat yang diperluas (*wider mandate*). Beberapa IAIN dan satu STAIN telah berubah wujud menjadi UIN saat sekarang ini.

### c. Tantangan Moral

Salah satu dampak negatif dari kemajuan ilmu dan teknologi serta globalisasi adalah munculnya semangat *hedonism*. *Hedonism* ini adalah pandangan bahwa tujuan kehidupan adalah usaha mencapai segala kenikmatan fisik tertinggi mungkin, sesering mungkin dan dengan cara apa pun tanpa memerhatikan konsekuensi yang mungkin dialami.





(Team Penulis Rosda, 1995: 135).

Falsafah hidup hedonisme ini telah berkembang pesat di berbagai negara ditandai dengan berbagai indikasi, yakni semakin meluaskan kebebasan seks dengan segala perangkannya, narkoba dan segala jenisnya merupakan indikasi betapa merosotnya moral. Berkenaan dengan itu maka pendidikan tinggi Islam mesti memiliki peranan yang sungguh-sungguh untuk menjadi pionir dalam menegakkan moral, termasuk memperkuat moral akademik.

## PENUTUP

Di ujung tulisan ini perlu disampaikan kesimpulan pokoknya, bahwa perguruan tinggi Islam di masa yang akan datang sangat berperan dan turut serta menyumbangkan darma baktinya bagi pembangunan bangsa. Untuk lebih mengefektifkan peranannya di masa depan, maka beberapa problema yang dikemukakan di atas mesti disahuti, diberikan respons dan konsep-konsep guna menjawab beberapa tantangan tersebut, yakni tantangan globalisasi, ilmu pengetahuan, dan moral.

# Bagian 4

## PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM

- Integrasi Ilmu dalam Pandangan Islam
- Dinamika Pendidikan Islam Di Era Global (Tinjauan Inovasi kurikulum, Pendidikan dan Lembaga Pendidikan)
- Membangun Karakter Bangsa Melalui Pemberdayaan Pendidikan Agama



## BAB 1

### INTEGRASI ILMU DALAM PANDANGAN ISLAM

#### A. PENDAHULUAN

Salah satu ciri pada era kemunduran umat Islam adalah berkembangnya paham dikotomis keilmuan. Ilmu menjadi terpilah dua. *Pertama*, ilmu keagamaan; dan *kedua*, ilmu sains atau ilmu pengetahuan umum. Kedua ilmu itu memang secara epistemologi berbeda.

Konferensi internasional tentang pendidikan menggambarkan bahwa telah berlangsung lama pemikiran dikotomis tersebut di kalangan umat Islam. Ilmu-ilmu agama orientasinya keakhirian dan ilmu-ilmu umum keduniaan. Pada ketika itu timbul pula pemikiran di sebagian umat Islam bahwa ilmu yang perlu dipelajari oleh umat Islam itu hanyalah ilmu-ilmu agama, sedangkan pengetahuan umum tidak diperlukan.

*And that there exists at present a regrettable dichotomy in education the Muslim World, one system, namely, religious education being completely divorced from the secular sciences and secular education being equally divorced from religion, although such compartmentalization was contrary to the true Islamic concept of education and made it impossible for the products of either system to represent Islam as a comprehensive and integrated vision of life.*

Keadaan yang seperti ini membuat umat Islam semakin mundur dan tidak bisa menguasai dunia lagi seperti abad-abad kemajuan sebelumnya.

Keadaan ini mulai berubah ketika ide-ide pembaruan memasuki kehidupan kaum Muslimin. Salah satu tuntutan dari masuknya ide-ide pembaruan tersebut adalah pengintegrasian pengetahuan agama dan pengetahuan umum. Tahap awal dimasukkan kedua ilmu itu di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Bermunculanlah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengintegrasikan antara pengetahuan agama dan umum.

Di Indonesia pada awal abad ke-20 berdirilah madrasah. Sebagian dari madrasah itu menggabungkan pengetahuan agama dan umum dalam kurikulum mereka. Selanjutnya berdiri pula pesantren modern, diawali dengan berdirinya pesantren modern Darussalam Gontor Ponorogo lalu kemudian diikuti oleh pesantren lain, saat sekarang sudah banyak tumbuh pesantren sejenis. Kemudian pada tahun 1970-an muncullah pemikiran islamisasi ilmu oleh Ismail Al Faruqi. Hal ini berkenaan tentang konsep bagaimana mengislamkan sains. Sejak itu tumbuh dengan pesatnya semangat pengintegrasian ilmu agama dan sains di kalangan umat Islam. Dilanjutkan pula semangat itu dengan menggelar beberapa kali seminar internasional pendidikan Islam, yang intinya juga adalah mengintegrasikan ilmu *perennial knowledge* dengan *acquired knowledge*. Tindak lanjut dari konferensi internasional tentang pendidikan Islam itu lahirlah berbagai Universitas Islam Internasional, salah satunya terletak di Gombak Kuala Lumpur Malaysia, International Islamic University (IIU). Se-





mangat yang serupa juga muncul di Indonesia dengan lahir Universitas Islam Negeri (UIN) yang sekarang telah berjumlah enam buah.

Apabila ditinjau dengan sesungguhnya konsep ilmu dalam Islam, maka akan ditemukanlah bahwa ilmu itu tidak pilah tetapi berada pada satu kesatuan. Uraian berikut ini akan mencoba membahas tentang integrasi ilmu menurut pandangan Islam.

## B. PENGERTIAN ILMU

Mendefinisikan ilmu saat sekarang terasa sulit, oleh karena dahulu ilmu merupakan bagian dari filsafat. Definisi tentang ilmu bergantung kepada sistem filsafat yang dianut. Saat sekarang ini ilmu telah lepas dari filsafat, maka definisi tidak lagi berdasar filsafat akan tetapi berdasar kepada apa yang dilaksanakan ilmu dengan melihat metodenya (Peurssen, 1985: 1).

Walaupun sulit mendefinisikan ilmu bukan berarti tidak ada yang mencoba untuk mendefinisikannya: ada yang mengatakan bahwa ilmu adalah semua pengetahuan yang diperoleh sebagai hasil rentetan daur-daur penyimpulrampan (induksi), penyimpulrampan (deduksi) dan penyayahan (verifikasi/validasi) yang terus-menerus tak kunjung usai (Suriasumantri, 1982: 237).

Muh. Hatta berpendapat, ilmu adalah pengetahuan yang didapati lewat keterangan (Hatta, 1970: 6). Ada juga yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan. Kalau ilmu diperoleh lewat hipotetis deduktif-verifikatif, sedangkan pengetahuan tidak diperoleh dengan cara demikian.

Menurut Koento Wibisono, pengetahuan (*knowledge*), dibagi kepada tiga macam:

- a. Pengetahuan non-ilmiah.
- b. Pengetahuan pra-ilmiah.
- c. Pengetahuan ilmiah.

Pengetahuan non-ilmiah pengetahuan yang diperoleh tanpa berdasarkan teori, misalnya Gedung Unimed dan IAIN Sumatera Utara terletak di jalan Willem Iskandar Pasar V Medan.

Pengetahuan pra-ilmiah dilakukan dengan pengalaman sendiri atau pengalaman orang lain, air akan mendidih bila mencapai panas 100 derajat celcius. Pengetahuan ilmiah diperoleh dengan cara metode ilmiah. Sebetulnya masih ada lagi jenis pengetahuan lain yakni pengetahuan kewahyuan dan pengetahuan supra-ilmiah, yakni pengetahuan yang diperoleh seseorang bukan lewat prosedur ilmiah. Pengetahuan semacam ini akan dibicarakan tersendiri.

### 1. Sumber Ilmu Pengetahuan

- a. Rasionalisme

Aliran ini berpendapat bahwa sumber pengetahuan adalah rasio (akal). Menurut aliran ini akal yang paling utama memperoleh ilmu pengetahuan. Peletak pertama dari aliran ini adalah Rene Descartes (1596-1650).

- b. Empirisme

Aliran ini berpendapat bahwa pengalaman (empiris) yang menjadi sumber pengetahuan. Menurut aliran ini akal bukanlah sumber pengetahuan melainkan akal menda-



pat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Pelopornya adalah John Locke.

c. Kritisisme

Dipelopori oleh Immanuel Kant (1724-1804). Aliran ini mencari jalan tengah antara rasionalisme dan empirisme. Jadi, pengetahuan bukanlah bersumber dari akal dan empiris semata-mata.

d. Positivisme

Tokohnya adalah August Comte (1798-1857). Aliran ini untuk menggabungkan antara rasionalisme dan empirisme. Aliran ini mengkritik aliran metafisika atau abstrak. Menurut beliau tahap perkembangan manusia itu adalah teologis, metafisis, dan positivis.

e. Fenomenologis

Tokoh utama dari aliran ini adalah Husserl (1859-1938). Aliran ini adalah yang membicarakan fenomena atau segala yang menampakkan diri. Fenomenologis ini adalah aliran yang membebaskan diri dari tradisi berfikir yang telah ada dari prasangka subyektif

f. Intuisi dan wahyu

Intuisi adalah pengetahuan yang didapat tanpa melalui pengalaman tertentu. Misalnya, seseorang yang sedang terpusat pikirannya terhadap suatu masalah tiba-tiba menemukan jawabannya, tanpa melalui proses berpikir yang berliku-liku. Satu masalah yang sedang kita pikirkan, yang kemudian kita tunda karena menemukan jalan buntu, tiba-tiba saja muncul di dalam pikiran kita jawabannya (Dikbud, 1984: 8).

Wahyu adalah bentuk pengetahuan yang disampaikan Allah kepada para Rasulnya, dan Rasul tersebut menyampai-  
kannya kepada manusia. Wahyu bukan saja berbicara tentang kehidupan sekarang tetapi juga tentang kehidupan yang akan datang, berbicara tentang hal yang bersifat transendental di luar pengalaman manusia.

## Prosedur Ilmiah

Ilmu yang ilmiah seperti yang telah diuraikan terdahulu adalah ilmu yang diperoleh lewat prosedur ilmiah. Prosedur ilmiah itu adalah gabungan di antara berfikir deduktif dengan berpikir induktif. Gabungan di antara berpikir rasional dan empiris. Koherensi dan korespondensi. Teori koherensi berasumsi suatu pernyataan dikatakan benar apabila sesuai dan tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Kebenaran korespondensi suatu pernyataan dikatakan benar bila pernyataan itu menunjuk kepada fakta atau realita sebenarnya (Sujana, 1989:1-2) Langkah-langkah yang ditempuh itu adalah:

- a. Perumusan masalah.
- b. Perumusan kerangka berpikir.
- c. Perumusan hipotesis.
- d. Pengujian hipotesis.
- e. Penarikan kesimpulan.

## 2. Falsafah, ilmu, dan agama

### a. Filsafat

Inti dari filsafat itu adalah berpikir secara mendalam tentang hakikat sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Jadi,





di sini titik tolaknya adalah berpikir secara mendalam, dengan beberapa ciri:

1. *Reflective Thinking*.
2. *Speculative*.
3. Bersifat umum tidak menyangkut soal-soal khusus.
4. Bersangkutan dengan nilai-nilai.
5. Bersifat kritis.
6. Implikatif.
7. Radikal, sampai ke akar-akarnya.
8. Koherensi.
9. Konsisten.
10. Sistematis.
11. Komprehensif.

Dengan demikian hakikat dari filsafat itu adalah berpikir murni dengan beberapa ciri yang diutarakan terdahulu.

#### b. Ilmu

Secara garis besar telah diungkapkan terdahulu, yang intinya adalah suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan (*any systematic body of knowledge*) atau disebut juga (*all knowledge collected by means of the scientific method*).

Yang inti di sini adalah ilmu itu diperoleh lewat metode ilmiah, gabungan antara rasional dan empiris. Karena itu objek yang dijadikan telaahan ilmu adalah seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh pancaindra, dengan demikian objeknya adalah objek-objek empiris, misalnya mempelajari gejala alam, manusia baik sebagai makhluk biologis maupun sosial.

#### c. Agama

Hakikat agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang berkuasa, yang dipatuhi oleh hamba-Nya. Tuhan menyampaikan ajarannya lewat wahyu-Nya kepada manusia. Lapangan wahyu bukanlah lapangan empiris. Karena itu, agama melampaui berpikir logis dan empiris. Ada hal-hal yang dibicarakan dalam yang menyentuh akal dan pengalaman manusia, tetapi ada yang berada di luar itu, bisa berbentuk suprarasional.

### 3. Umat Islam dan Ilmu Pengetahuan

Umat Islam bersentuhan dengan ilmu pengetahuan pada awal sekali adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari wahyu. Rasulullah pada saat-saat tertentu menerima wahyu dari Allah lewat jibril, selanjutnya wahyu itu disampaikan kepada para sahabat. Informasi yang disampaikan kepada para sahabat itu menjadi ilmu bagi mereka. Ada di antara mereka itu yang menulisnya dan kebanyakan di antara mereka menghafalnya. Wahyu yang disampaikan itulah yang disebut dengan Al-Qur'an, selain dari itu para sahabat juga menerima wejangan dari Rasul tentang beberapa hal di luar Al-Qur'an, dan wejangan itulah yang disebut dengan Hadis atau Sunah. Dengan demikian, pada tahap awal umat Islam mengenal dua sumber ilmu pengetahuan, yaitu Qur'an dan Sunah.

Semangat keilmuan telah ditumbuhkan Rasul sejak dini, baik lewat ucapan, praktik, maupun dorongan beliau. Misalnya saja Rasulullah membebaskan tawanan yang mampu mengajari umat Islam membaca dan menulis sebagai tebusan. Al-Qur'an pun sangat banyak berbicara tentang ilmu.





Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang berisikan tentang ilmu dan mendorong untuk berilmu.

Umat Islam berkenalan dengan ilmu pengetahuan *naqliyah*, ketika mereka menaklukkan daerah-daerah di belahan utara seperti Syria, Irak, Persi yang kaya dengan ilmu pengetahuan *naqliyah* dan filsafat Yunani, seperti Syiria, Irak, Iran. Hasil kontak itulah menumbuhkan semangat ilmiah bagi kalangan Muslim, yang diawali dengan masa penerjemahan selanjutnya masa memproduksi ilmu dan penyebar ilmu *'aqliyah*.

#### 4. Kontak Pertama Umat Islam dengan Ilmu Pengetahuan

Pada 331 SM, Alexander yang Agung, Raja Macedonia menaklukkan Parsi. Alexander datang ke dunia Timur tidak hanya membawa pasukan tetapi juga membawa peradaban Yunani, dan berupaya menyatukan peradaban Yunani dan Parsi.

Setelah Alexander meninggal, peradaban dan kebudayaan Yunani meninggalkan bekas-bekas di daerah ini. Alexanderia, Antioch, dan Bacta menjadi pusat-pusat ilmu pengetahuan dan falsafah Yunani pada abad ke-3 Masehi, pusat ilmu pengetahuan dan peradaban Yunani bertambah dengan kota Jundishapur (Nasution, 1992; 10-11).

Dengan demikian, sebelum Islam muncul pada abad ke-7 Masehi di beberapa wilayah di bagian utara Jazirah Arab telah muncul pusat-pusat ilmu pengetahuan *naqliyah*, dan ketika umat Islam menaklukkan daerah ini pada abad ke-7 Masehi pada masa pemerintahan *khulafurrasyidin*, mulailah terjadi kontak antara umat Islam dan peradaban Yunani dan ilmu pengetahuan. Kendatipun terdapat perbedaan episte-

mologi antara kedua ilmu ini, namun kenyataan sejarah menyatakan bahwa umat Islam tidak mempertentangkan antara kedua ilmu tersebut, mereka dapat menerimanya sebagai bagian dari ilmu-ilmu keislaman.

Selanjutnya, di zaman Bani Umaiyah dan awal Abbasiyah mulai muncul zaman penerjemahan. Falsafah Yunani dan ilmu pengetahuan *'aqliyah* diterjemahkan ke bahasa Arab. Dari hasil terjemahan itu banyaklah umat Islam yang mengenal falsafah Yunani dan ilmu pengetahuan, yang akhirnya muncullah di kalangan umat Islam para filsuf dan ilmuwan, dan muncullah tokoh-tokoh ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam. seperti Alkindi, Al Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Maskawaihi dalam bidang filsafat, Ibn Haysam, Ibn Hayyan, Al Khwarizme, al Mas'udi, dan al Razi dalam bidang ilmu pengetahuan.

#### 5. Sumber Pengetahuan Menurut Islam

- a. Insting (*gharizah*), manusia sejak lahir telah dibekali dengan pengetahuan bawaan yang disebut insting. Pengetahuan ini tidak perlu didikan atau diajarkan, setiap orang secara instingtif telah memilikinya. Misalnya, menyatakan lapar dan haus dan kondisi tidak enak lainnya dengan menangis. bagaimana cara menelan makanan dan minuman, dan lain-lain bentuknya.
- b. Indra, lewat indra manusia, penglihatan, penciuman, perabaan merupakan bagian dari sumber pengetahuan. Al-Qur'an menyuruh manusia untuk menggunakan indranya.
- c. Akal (rasional), menggunakan akal pikiran, melahirkan pikiran rasional, bisa digunakan metode induktif, deduk-



tif, komperatif, analitik dan seterusnya, berpikir ini dapat dipakai kaidah-kaidah berpikir rasional. Menggunakan ilmu logika atau *manthiq*. Al-Qur'an juga banyak mendorong berpikir ini seperti tertera pada Surat *Ali 'Imran* (3) ayat 191. Filsuf menggunakan akal setinggi-tingginya, sehingga sampai ke tingkat akal *mustafad*. Tingkat akal *mustafad* adalah tingkatan akal yang tertinggi dimiliki oleh manusia setelah tingkatan akal potensial dan akal aktual.

- d. Pengalaman (*empiris*), Al-Qur'an mengajak manusia untuk menggunakan pengalaman, baik pengalamannya sendiri maupun pengalaman orang lain sebagai sumber ilmu pengetahuan. Manusia disuruh untuk mengembara di muka bumi untuk melihat apa yang telah dialami oleh orang lain yang bisa menjadi *I'tibar*.
- e. Intuitif, salah satu jenis sumber pengetahuannya yang sifatnya non-analitik. Jadi, intuitif adalah pengetahuan yang diperoleh tanpa penalaran. Jujun menggambarkan seseorang yang sedang terpusat pemikirannya pada suatu masalah tiba-tiba saja menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, tanpa melalui proses berpikir yang berliku-liku tiba-tiba saja dia sudah sampai di situ (Suriasumantri, 1982: 53).
- f. Qalbu, qalbu juga adalah sumber pengetahuan dalam Islam, titik tolaknya adalah rasa. Para sufi menggunakan qalbu ini sebagai sarannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Metodenya adalah dengan membersihkan kalbu sebersih-bersihnya dari segala macam penyakit hati dan mengisinya dengan segala macam sifat terpuji.

Qalbu yang bersih ibarat kaca yang bersih yang dapat digunakan untuk berkaca. Qalbu yang kotor ibarat kaca yang kotor dan berdebu tidak bisa digunakan untuk berkaca.

- g. Wahyu, Pemberitaan yang diberikan Allah kepada Rasul atau Nabi, sehingga yang diberitahukan paham dan mengerti apa yang disampaikan kepadanya. Wahyu khusus untuk para Rasul atau nabi. Di dalamnya terkandung berbagai informasi, baik informasi perintah, larangan, penjelasan, tamsilan, dan lain sebagainya. Ambillah contoh Al-Qur'an, Allah menyampaikannya kepada Rasulullah Muhammad SAW lewat Jibril setelah itu Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat, dan mereka menghafalnya dan sebagian kecil menuliskannya. Selanjutnya dikumpulkan di zaman Abu Bakar dan dibukukan di zaman Usman bin Affan. Dari generasi ke generasi diwariskanlah Al-Qur'an tersebut baik lewat hafalan maupun lewat tulisan. Dari Al-Qur'an inilah para mujtahid berijtihad tentang berbagai ilmu pengetahuan keagamaan, seperti ilmu fikih, kalam, tasawuf, bahasa, qiraah dan lain sebagainya. Kaitannya dengan ilmu pengetahuan non-keagamaan Al-Qur'an ada yang secara langsung mengeksplisitkannya tetapi kebanyakan mengimplisitkannya.
- h. Mimpi yang benar. Ada mimpi yang merupakan sumber ilmu pengetahuan, bahkan bagi sebagian Rasul mimpi adalah wahyu, seperti Nabi Ibrahim menerima perintah untuk mengorbankan anaknya. Selain dari Rasul bagi orang-orang tertentu ada yang disebut dengan *ArRu'ya*



As Sadiqah (mimpi yang benar).

- i. Anugerah Ilahi, yaitu ilmu yang diberikan Allah secara langsung kepada seseorang, misalnya Nabi Yusuf mampu menabirkan mimpi, kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa yang dijelaskan Allah pada surat *Al-Kahfi* (18) ayat 71- 82. Dalam ayat itu dijelaskan kemampuan Nabi Khidir untuk menjelaskan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Menjelaskan mengapa ia merusak perahu, mengapa ia membunuh anak kecil, dan mengapa pula ia menegakkan dinding rumah yang hampir roboh. Dan contoh-contoh yang seperti ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an.

## 6. Pembagian Ilmu

Konferensi internasional tentang pendidikan yang diselenggarakan tahun 1977 di Mekkah, tahun 1980 di Islambad, 1981 di Dhakha, 1982 di Jakarta. Hasil rumusan dari konferensi itu adalah menetapkan pembagian ilmu itu kepada dua, yakni ilmu-ilmu abadi, (*perennial knowledge*) yang berdasar kepada wahyu Al-Qur'an, Sunah. Kedua ilmu perolehan (*acquired knowledge*) termasuk di dalamnya ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kealaman dan aplikasinya (*First World Conference on Muslim Education*, tt: 4).

### a. Perennial Knowledge

- a. Al-Qur'an:
  1. Qiraah, hafalan, dan tafsir.
  2. Sunah.
- b. Sejarah hidup Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau serta pengikut-pengikut mereka.

- c. Tauhid.
- d. Ushul fikih/fikih.
- e. Bahasa Arab.

Mata kuliah tambahan

- a. Metafisika Islam.
  - b. Perbandingan agama.
  - c. Peradaban Islam.
- b. Acquired Knowledge
- a. Imajinatif, seni Islam, arsitektur, bahasa, sastra.
  - b. *Science* intelektual, sosial, filsafat, pendidikan, ekonomi, politik, sejarah, peradaban.
  - c. Ilmu-ilmu kealaman, matematika, statistik, politik, ekonomi.
  - d. *Science* terapan.
  - e. Ilmu-ilmu praktis, perdagangan, ilmu administrasi, ruang angkasa, dan lain-lain.

Di dalam menyusun kurikulum pendidikan Islam, kedua jenis ilmu di atas mesti tercakup dalam semua jenis, jalur dan tingkatan pendidikan.

Epistemologi dari kedua jenis ilmu itu berbeda, kelompok ilmu *perennial knowledge*, prosedur keilmuannya dimulai dari wahyu yang diterima oleh Rasul, Rasul menyampaikan wahyu tersebut kepada sahabat, selanjutnya para sahabat dan generasi sesudahnya menginterpretasikan wahyu tersebut sesuai dengan kemampuan akal manusia. Dan dari interpretasi lahirlah berbagai ilmu seperti: ilmu tauhid, fikih, tafsir, Hadis, ushul fikih, ilmu Hadis, ilmu tafsir, dan tasawwuf.



Adapun ilmu *acquired knowledge* bersumber dari pemikiran deduktif dan induktif atau gabungan di antara rasio dan empiris. Dimulai dari adanya permasalahan—perumusan masalah—landasan teoretis-hipotesis—uji hipotesis, kesimpulan (apabila hipotesis diterima) maka melahirkan khazanah ilmu pengetahuan.

Kendatipun kedua ilmu itu berbeda prosedur keilmuannya, namun keduanya sama-sama bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran, kelompok pertama mengemukakan kebenaran wahyu dan kelompok kedua kebenaran ilmiah. Masing-masing memiliki kavelingnya sendiri yang tidak akan ada paradok di antara keduanya apabila diletakkan pada proporsi yang sebenarnya.

Upaya untuk mengintegrasikan kedua ilmu itu telah diupayakan oleh beberapa pakar pemikir Islam di antaranya Al Faruqi dari Temple University, akan tetapi sebelum usaha besarnya ini berhasil, beliau telah berpulang ke rahmatullah. Beliau sebut usaha itu dengan islamisasi ilmu.

Di Indonesia istilah islamisasi ini kurang populer, tetapi bukan berarti tidak adanya upaya untuk mengintegrasikan kedua ilmu itu, banyak pemikir Islam di Indonesia telah mengajukan pemikirannya tentang ini.

Berkenaan dengan itu, penulis lebih cenderung untuk memakai istilah ilmu yang berwawasan Islam. Untuk mengkonstruksi pemikiran tentang ini, perlu diperhatikan beberapa hal berkenaan dengan landasan filosofis dan metodologis yang telah penulis singgung di dalam beberapa tulisan.

## 7. Membangun Ilmu Pengetahuan yang Berwawasan Islam

### a. Landasan filosofis

Pada landasan filosofis ini akan diuraikan tentang landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pada landasan ontologis perlu dikemukakan bahwa keberadaan sesuatu itu bukan hanya materi tetapi juga immateri. Pendekatan terhadap immateri ini tidak sama dengan pendekatan materi. Jadi dengan demikian ada dua hakikat keberadaan, yaitu keberadaan yang bersifat materi dan juga immateri. Filsafat Barat hanya mengakui keberadaan materi, sedangkan filsafat keilmuan dalam Islam mengakui adanya hakikat ilmu yang bersifat materi dan juga immateri.

Landasan epistemologi adalah mengemukakan bahwa upaya pencapaian dan dari mana ilmu itu diperoleh tidak hanya berlandaskan kepada filsafat positivistik dan rasionalistik. Di samping itu keberadaan yang hendak diungkapkan tidak hanya kebenaran sensual dan rasional, tetapi lebih dalam dari itu lagi, yaitu kebenaran etik dan kebenaran transendental. Oleh karena kebenaran yang ingin diraih tidak hanya kebenaran sensual dan rasional, tetapi juga mencakup kebenaran etik dan transendental, maka diperlukan landasan epistemologi yang dapat mengungkapkan beraneka ragam kebenaran tersebut.

Landasan aksiologi, pada landasan ini tentu terulang pertanyaan apakah ilmu itu bebas nilai atau terikat nilai. Jika ilmu bebas nilai, maka ilmu akan bergerak ke arah yang tidak bisa terkendali, dan dampaknya akan dapat menghancurkan manusia dan membuat dehumanisasi. Landasan filsafat



Barat tentunya melihat ilmu itu tidak terkait dengan nilai. Adapun ilmu menurut pandangan Islam tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitannya dengan nilai. Oleh karena itulah dalam landasan aksiologi, Iptek itu mesti berwawasan nilai-nilai dalam hal ini harus ditimbulkan pertanyaan. Untuk apa? Bagaimana? dan akan ke mana Iptek itu digunakan. Bila penggunaan itu berakibat kepada penghancuran manusia dan alam semesta serta hubungannya dengan dehumanisasi, maka jelas tidak diperkenankan oleh Islam.

Dengan ungkapan ringkas di atas dapatlah dipahami bahwa pada peringkat landasan filosofis ini wawasan filsafat keilmuan telah diberikan wawasan islami, baik pada landasan ontologisnya, epistemologisnya maupun pada landasan aksiologisnya.

#### b. Landasan Metodologis

Hingga saat sekarang ini kita akui bahwa masih langka sekali pemikiran yang diungkapkan melalui landasan metodologis ini. Pertanyaan yang prinsip timbul adalah metodologi yang bagaimana yang bakal digunakan untuk mengintegrasikan antara Iptek dan Islam. Atau bila kita meminjam istilah yang dikemukakan oleh hasil konferensi Islam internasional tentang pendidikan dalam hal pembagian ilmu, yaitu bagaimana mengintegrasikan antara ilmu yang tergolong *perennial knowledge* dan ilmu *acquired knowledge*. Selama ini banyak usaha yang dilakukan baru pada tingkat *justification*, membenaran-pembenaran dari ayat atau hadis tentang suatu penemuan baru dalam ilmu pengetahuan, misalnya betapa ramainya kaum Muslim dahulu mengutip ayat Al-Qur'an surat *ar-Rahman* (55) ayat 33 yang menjelas-

kan bahwa manusia dan jin pun bisa sampai ke angkasa apabila memiliki kemampuan untuk itu. Ayat ini ramai dikutip oleh para mubaligh dan ilmuwan, ketika astronot Amerika buat pertama kali sampai ke bulan. Pemikiran ini tidak salah dan tidak ada jeleknya, hanya menurut hemat penulis belum menyelesaikan masalah sedangkan yang kita cari bagaimana menyelesaikan masalah pengintegrasian yang utuh antara ilmu yang bersumber dari wahyu dan ilmu yang bersumber dari perolehan manusia.

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya untuk direnungkan oleh kita semua, bahwa sering dijadikan ayat Al-Qur'an dan Hadis sebagai premis mayor. Kita melihat keadaan di lapangan, kemudian kita cari keabsahannya atau kritiknya dari Al-Qur'an atau Sunah, cara seperti ini pun tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena yang akan timbul hanyalah pembenahan-pembenahan. Adapun yang di kehendaki bukan hanya sekadar pembenahan-pembenahan, melainkan ingin menemukan yang baru. Dengan jalan menjadikan Al-Qur'an dan Hadis sebagai premis mayor kita tidak akan menemukan yang baru, kita hanya sibuk membenahi saja.

Dalam kerangka inilah penulis mencoba menawarkan bagaimana metodologi yang dapat kita lakukan dalam rangka membentuk Iptek yang berwawasan Islam.

Dari berbagai pendapat yang muncul tentang ini, penulis ingin mengemukakan pendapat Noeng Muhadjir, guru besar Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau berpendapat bahwa mengkonstruksi bangunan Iptek dalam perspektif Islam diperlukan tiga langkah.



Langkah pertama, mengkonstruksi suatu bangunan ilmu tertentu atau mensistematisasikan suatu tema besar berdasar konsep Iptek yang valid, sekaligus menampilkan problematikanya, setelah itu baru dilanjutkan pada tahap kedua, yaitu menghimpun-menyusun-menelaah ayat Al-Qur'an dan Hadis yang relevan. Pada tahap kedua ini perlu diperhatikan adalah meninggalkan metode parsial yang hanya mengambil tema kecil. Teknik, *nash* tersebut dapat dihim-pun pertama-tama berdasar problematik yang teridentifikasi di tahap pertama; tetapi perlu dilanjutkan dengan pencarian *nash* lainnya, sehingga diduga dapat menjadi lebih integratif. Selanjutnya, pada tahap ketiga berupaya merekonstruksi bangunan teori iptek atau mensistematisasikan kembali tema besar (ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain) berdasarkan dari *nash* Qur'an dan Hadis yang kita maknakan dalam integrasi besarnya. Hasilnya kita harapkan muncul teori atau konsep dasar tentang ekonomi, kebudayaan, hak milik berprespektif Islam. (Muhadjir, 1989: 191-192)

Untuk mengkonstruksi ilmu yang berwawasan Islam diperlukan dua landasan pokok. *Pertama*, landasan filosofis, yang mencakup ontologis, epistemologis, dan aksiologis. *Kedua*, landasan metodologis, yaitu langkah-langkah yang digunakan untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan yang berwawasan Islam, berkenaan dengan ini diperlukan tiga langkah seperti yang telah penulis uraikan terdahulu.

## PENUTUP

Ada dua jenis ilmu yang dikembangkan di kalangan umat Islam sejak awal pertumbuhan Islam. *Pertama*, ilmu-ilmu yang tergolong *perennial knowledge* dan *acquired knowledge*. *Kedua*, ilmu itu memiliki landasan epistemologi yang berbeda. Yang pertama berdasar kepada wahyu dan yang kedua berdasar kepada upaya manusia untuk memperolehnya. Pertanyaan mendasar, dapatkah kedua ilmu itu diintegrasikan? Beberapa pakar falsafah keilmuan dalam Islam berpendapat bahwa kedua jenis ilmu tersebut dapat disatukan (diintegrasikan). Berkenaan dengan ini, mereka kemukakan-lah beberapa pemikiran di seputar hal ini.

Untuk mengkonstruksi ilmu yang berwawasan Islam diperlukan dua landasan pokok. *Pertama*, landasan filosofis, yang mencakup ontologis, epistemologis dan aksiologis. *Kedua*, landasan metodologis, yaitu langkah-langkah yang digunakan untuk mengkonstruksi ilmu pengetahuan yang berwawasan Islam berkenaan dengan ini diperlukan tiga langkah seperti yang telah penulis uraikan terdahulu.





## BAB 2

# DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBAL (TINJAUAN INOVASI KURIKULUM, PENDIDIK, DAN LEMBAGA PENDIDIKAN)

### A. PENDAHULUAN

Salah satu dari rumusan tujuan negara Republik Indonesia yang dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, karena itu negara sangat bertanggung jawab terhadap terlaksananya upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut. Berbagai upaya telah dirintis sejak awal Indonesia merdeka.

Upaya pertama, dibentuklah Kementerian Pendidikan dan Pengajaran, seterusnya pada tahun 1946 membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran, dan pada tahun 1947 mengadakan kongres pendidikan pertama di Solo, tahun 1947 kongres pendidikan kedua di Yogyakarta, dan pada tahun 1950 lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dengan nama Undang-Undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran (UUPP), tahun 1954 lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya UU No. 4 Tahun 1950, tahun 1961 lahir UU No. 22 Tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi, dan barulah pada tahun 1989 lahir Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian di-

iringi dengan seperangkat peraturan pemerintah tentang itu. Dan pada tahun 2003 lahir Undang-Undang Pendidikan yang terbaru, UU No. 20 Tahun 2003 dengan seperangkat peraturan pemerintah pula. Pada tahun 2005 lahir Undang-Undang No. 14 Tahun 2005, UU tentang Guru dan Dosen, diikuti pula dengan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan.

Kronologis ini perlu dicantumkan agar kita memahami bahwa kesungguhan pemerintah dalam menangani pendidikan telah tercermin sejak awal Indonesia merdeka.

Kendatipun sudah banyak kemajuan yang dicapai sejak Indonesia merdeka dalam dunia pendidikan, akan tetapi dalam banyak hal masih perlu dibenahi secara serius. Di antaranya kualitas pendidikan, keterkaitan pendidikan dengan dunia kerja (*link and match*), dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.

Dunia kita yang semakin mengglobal semakin menipiskan batas antarbangsa dan budaya, di saat itu akan tidak bisa dielakkan akan terjadi kompetisi. Pada saat dunia kompetitif telah digelar dalam kehidupan ini, mau tidak mau maka kualitas sumber daya manusia menjadi andalan utama. Karena kualitas sumber daya manusia menjadi andalan maka pendidikan semestinya menjadi prioritas utama.

Setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad perjalanan bangsa ini, dirasakan bahwa pendidikan belum merupakan prioritas utama sehingga akibatnya dirasakan beberapa kesenjangan dalam kualitas manusia Indonesia. Pada zaman Presiden Soekarno berkuasa, prioritas utama tampaknya yang dipikirkan adalah masalah-masalah yang berkenaan dengan politik, mulai dari perang fisik dan





diplomasi menghadapi Belanda, kemudian jatuh bangunnya kabinet, pemilihan umum pertama dan sidang-sidang konstituante yang selalu *deadlock*, selanjutnya muncul era konfrontasi dengan Malaysia serta tumbuhnya kekuatan komunis di Indonesia yang puncaknya melahirkan G-30-S/PKI. Di era ini dunia pendidikan belum terpikirkan secara serius dan sungguh-sungguh.

Di era pemerintahan Orde Baru, pada zaman Presiden Soeharto berkuasa, prioritas utama adalah pembangunan ekonomi, dengan titik tumpunya adalah pertumbuhan ekonomi. Dampak negatifnya menimbulkan berbagai hal yang berbau KKN, yang mengantarkan bangsa ini kepada krisis ekonomi dan moneter.

Di era Reformasi di saat bangsa dan negara Indonesia telah memasuki abad ke-21 yang ditandai dengan munculnya era globalisasi, maka tidak boleh tidak handalan utama adalah kualitas manusia, karena itu menurut hemat penulis era ini sebaiknya adalah era pendidikan. Yang bermakna seluruh potensi bangsa diarahkan kepada sektor pendidikan.

## B. URGENSI PENDIDIKAN DALAM MEMBENTUK MANUSIA SEUTUHNYA

Pendidikan seperti yang banyak didefinisikan oleh para pakar, yang apabila diambil intinya adalah upaya sadar yang diberikan oleh si pendidik dalam rangka membawa si terdidik kepada manusia ideal yang dicita-citakan. Bentuk manusia ideal yang dicita-citakan itu dirumuskan sendiri oleh suatu bangsa atau suatu komunitas.

Di dalam memperbincangkan pendidikan, ada dua pemaknaan yang selalu didengungkan oleh para pakar. *Pertama*, pendidikan adalah memanusiakan manusia, dan pendidikan adalah transfer budaya. Dipandang dari sudut pendidikan sebagai alat untuk memanusiakan manusia pada dasarnya berupaya untuk mengembangkan potensi manusia semaksimal mungkin, sehingga pada suatu saat ia tumbuh sebagai manusia seutuhnya.

Pertanyaan mendasar, dapatkah manusia itu berkembang dan tumbuh dengan sempurna tanpa pendidikan? Dari berbagai analisis dikaitkan dengan hakikat manusia itu sendiri jelaslah bahwa manusia tidak mungkin tumbuh dan berkembang tanpa melalui pendidikan. Karena itulah sejak manusia lahir dia telah membutuhkan pertolongan orang lain untuk mengembangkan dirinya, baik pertolongan pengembangan fisik maupun nonfisik.

Dipandang dari sudut potensi manusia, baik jasmani maupun rohani tidak boleh tidak, harus memperoleh pendidikan agar potensi yang ada itu tumbuh dan berkembang. Potensi jasmani adalah seluruh potensi manusia berwujud nyata meliputi indra manusia dan lainnya. Adapun potensi rohani manusia adalah seluruh perlengkapan manusia yang tidak berwujud nyata yang berbentuk spiritual.

Potensi-potensi manusia ini semuanya tidak mungkin berkembang tanpa lewat proses pendidikan. Perkataan *education* pada dasarnya berasal dari *educare*, yang intinya adalah mengarahkan kepada perkembangan potensi manusia. *Tarbiyah* (bahasa Arab) mengandung makna pertumbuhan, perawatan, pemeliharaan. Di sini diperlukan adanya suatu proses berkesinambungan yang terus-menerus tanpa ber-



henti untuk mengembangkan potensi manusia tersebut. Potensi akal manusia misalnya, yang merupakan salah satu sarana untuk mencerdaskan tidak mungkin berkembang dengan sempurna tanpa lewat pendidikan.

Tentang urgensi pendidikan dalam rangka memanusiakan manusia, dapat diambil kisah klasik yang telah dikemukakan oleh para pakar tentang betapa urgennya pendidikan tersebut dalam rangka memanusiakan manusia, yakni kisah ditemukannya anak manusia yang dipelihara oleh serigala. Anak manusia itu tidak bisa hidup dengan wajar sebagai manusia, dia hidup sebagaimana layaknya serigala mulai dari cara makannya, berjalannya, dan kebiasaan hidup lainnya.

Mengenai peran pendidikan sebagai transfer budaya adalah berkenaan dengan manusia sebagai pencipta budaya yang secara akumulatif telah berproses sejak ribuan tahun yang lalu, setidaknya sejak manusia memasuki abad peradaban. Akumulasi budaya itu secara berkesinambungan diwariskan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Peradaban modern di mana manusia hidup saat sekarang bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan ia merupakan rentetan yang merupakan mata rantai dari sebelumnya. Jadi, dengan demikian kendatipun manusia yang hidup, sekarang ini menikmati berbagai kemudahan dan kenyamanan hidup, disebabkan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sumbangan peradaban masa lampau juga tidak kurang maknanya untuk mengantarkan manusia kepada peradaban masa kini. Dalam proses transformasi budaya inilah peranan pendidikan amat menentukan.

Sekarang kita bicara tentang manusia Indonesia yang ingin dibentuk ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia. Manusia Indonesia yang ingin dibentuk tergambar dalam tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, yakni:

1. Menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berakhlak mulia.
3. Sehat.
4. Berilmu.
5. Kreatif.
6. Mandiri.
7. Menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Kriteria tersebut merupakan tipe manusia ideal yang ingin dibentuk oleh masyarakat Indonesia lewat jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah. Kriteria manusia Indonesia yang ingin diciptakan itu mencakup: *Pertama*, manusia religius, manusia yang patuh dan taat menjalankan perintah agama. *Kedua*, manusia bermoral, berakhlak mulia, memiliki komitmen yang kuat terhadap kehidupan beretika. *Ketiga*, manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, manusia pencari, penggali, pengamal ilmu pengetahuan, dan pencinta ilmu. *Keempat*, manusia yang sehat kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.



## C. TANTANGAN PENDIDIKAN DI ERA GLOBAL

Tantangan globalisasi ini menuntut kepada perhatian yang sungguh-sungguh dari semua lapisan masyarakat untuk menghadapi dampak negatifnya. Tantangan pertama bagi dunia pendidikan adalah tentang kualitas. Di era globalisasi pada dasarnya muncul era kompetisi. Berbicara kompetisi adalah berbicara keunggulan. Menurut Tilaar hanya manusia unggul manusia yang akan *survive* di dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan, karena itu salah satu persoalan yang muncul bagaimana upaya untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Membentuk manusia unggul partisipatoris, yaitu manusia yang ikut serta secara aktif dalam persaingan yang sehat untuk mencari yang terbaik (Tilaar, 1999: 56). Keunggulan partisipatoris itu dengan sendirinya adalah berkewajiban untuk menggali dan mengembangkan seluruh potensi manusia yang akan digunakan dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan yang semakin hari semakin tajam (Tilaar, 1999: 56).

Tilaar menjelaskan pula bahwa di dalam pengembangan “manusia unggul partisipatoris” diperlukan pengembangan sifat-sifat sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mengembangkan jaringan kerja sama (*network*). *Networking* ini diperlukan karena manusia tidak lagi hidup terpisah-pisah tetapi telah berhubungan satu dengan lain.
2. Kerja sama (*team work*). Setiap orang di dalam masyarakat abad 21 mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keunggulan spesifiknya. Individu-individu yang telah mengembangkan kemampuan spesifiknya

itu membangun *team work* yang pada gilirannya dapat menghasilkan produk-produk yang tinggi mutunya.

3. Cinta kepada kualitas tinggi. Manusia unggul adalah manusia yang terus-menerus meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga dia akan mencapai kualitas tinggi. Kualitas yang dicapai hari ini akan ditingkatkan esok harinya (Tilaar, 1999: 56-57).

Dalam kehidupan sehari-hari, Tilaar juga mengemukakan konsep keunggulan yang diambilnya dari Martha Tilaar, yaitu:

1. Dedikasi dan disiplin, memiliki rasa mengabdikan kepada tugas, orang yang telah memiliki sifat tersebut akan diiringi dengan tumbuhnya sikap disiplin.
2. Jujur, kejujuran yang dikembangkan itu adalah kejujuran terhadap orang lain maupun kejujuran terhadap diri sendiri. Inti kejujuran terhadap orang lain adalah manusia yang bisa bekerja sama dengan orang lain dan dasar kerja sama itu adalah saling memercayai. Jujur terhadap dirinya sendiri adalah manusia yang mengetahui kemampuannya, yang dengan demikian dikembangkannya keprofesionalannya.
3. Tekun, manusia unggul adalah manusia yang dapat memfokuskan perhatiannya kepada tugas yang telah dipercayakan kepadanya.
4. Inovatif, manusia unggul adalah manusia yang terus mencari yang baru, tidak puas dengan *status quo*.
5. Ulet, manusia unggul adalah manusia yang tidak mudah putus asa, dia akan terus mencari dan mencari (Tilaar, 1999: 57-59).



Dengan membentangkan pembicaraan tentang pentingnya membentuk manusia unggul di abad globalisasi yang tidak boleh tidak, upaya pembentukannya itu terpuang kepada pendidikan. Corak pendidikan yang bagaimana yang akan diberikan kepada peserta didik. Berbagai kriteria manusia unggul yang dibentangkan di atas banyak menyangkut tentang soal mental, karenanya pendidikan mental itu merupakan prioritas utama yang akan dilaksanakan saat sekarang ini. Tantangan dunia pendidikan Indonesia saat sekarang ini serba kompleks.

#### **D. INOVASI PENDIDIKAN DALAM MEMBERDAYAKAN PENDIDIKAN DI ERA GLOBALISAI**

Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Dengan demikian, inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat), baik berupa hasil invensi atau *discover* yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan (Ibrahim, 1988: 51).

Kehidupan manusia yang dinamis akibat perubahan yang terjadi. Hidup itu pada hakikatnya adalah perubahan, oleh karena itu perubahan yang terjadi di masyarakat (perubahan sosial) adalah sesuatu yang lumrah terjadi. Bahkan sebetulnya disebabkan kemajuan ilmu pengetahuan perubahan itu semakin cepat. Disebabkan karena terjadi perubahan sosial, maka hal itu berdampak kepada berbagai aspek kehidupan

manusia termasuk di dalamnya pendidikan. Disebabkan pendidikan itu sendiri adalah perwujudan dari kebutuhan manusia pada sesuatu dan saat tertentu, maka otomatis pula pendidikan itu senantiasa menyahuti perubahan-perubahan yang terjadi.

Arus globalisasi saat sekarang ini menimbulkan banyak sekali perubahan di tengah-tengah masyarakat. Perubahan sosial terjadi tidak bisa dihindari karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ketika terjadi revolusi industri. *Pertama*, tenaga manusia diganti dengan tenaga mesin, tentu hal ini berdampak besar, antara lain terhadap tenaga kerja, tentang perlunya tenaga profesional, perlunya pendidikan untuk mengoperasikan mesin, serta tenaga yang akan merawat mesin dan berbagai tuntutan-tuntutan lainnya. Seterusnya terjadinya perubahan yang lebih dahsyat lagi pada masa revolusi industri. *Kedua*, yakni menggantikan otak manusia dengan alat-alat elektronik, misalnya dalam bentuk apa yang kita kenal sekarang ini dengan komputer. Dengan komputer banyak pekerjaan yang dahulunya dikerjakan oleh manusia diganti dengan alat mulai dari kegiatan di rumah tangga, toko, kantor, sekolah, dan berbagai bentuk lainnya (Ibrahim, 1988: 7).

Dari contoh di atas mau tidak mau akan terjadi perubahan sosial, yang pada gilirannya pula terjadinya perubahan dalam pendidikan, isi pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan, dan lain sebagainya.

Bertolak dari kenyataan tersebut, diakibatkan perubahan yang terjadi di masyarakat di era global ini, maka diperlukan adanya inovasi dalam dunia pendidikan yang setidaknya meliputi:





## 1. Kurikulum

Kurikulum dalam pengertian luas tidak hanya terbatas kepada subjek pelajaran, tetapi mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah seperti yang diungkapkan oleh Saylor dan Alexander, "... *School curriculum is the total effort of the school to bring about desired outcome's in school and in out of school situation. In short the curriculum is the school's program for learners*" (Saylor, 1960: 4).

Romaine Staphen mengemukakan definisi yang senada, "*Curriculum is interpered to mean all of the organized courses, activities and experiences which pupils have under the direction of the school, whether in the class room or not*" (Staphen, 1954: 14).

Lebih luas lagi pengertian apa yang dikemukakan oleh Alice Meil dalam bukunya *Changing the Curriculum a Social/ Process*, ia mengemukakan bahwa kurikulum itu meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, dan sikap orang yang meladeni dan diladeni sekolah, yakni anak didik, masyarakat, para pendidik, dan personalia (Alice Meil, 1946: 46).

Dari berbagai definisi tersebut dapat dimaklumi sebenarnya kurikulum itu mengandung makna yang sangat luas, sehingga dapat dikatakan seluruh apa saja yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan disebut dengan kurikulum.

Sekaitan dengan pembahasan saat sekarang, ada beberapa hal yang sering mendapat perhatian tentang masalah kurikulum di Indonesia.

### a. Sentralistik

Sistem sentralistik ini terkait erat dengan birokrasi atas bawah, yang sifatnya otoriter yang terkesan pihak "bawah" harus melaksanakan seluruh keinginan pihak "atas". Dalam sistem yang seperti ini, inovasi dan pembaruan tidak akan muncul. Dalam bidang kurikulum sistem sentralistik ini juga memengaruhi output pendidikan kita. Tilaar menyebutkan kurikulum yang terpusat, penyelenggaraan sistem manajemen yang dikendalikan dari atas telah menghasilkan output pendidikan kita manusia robot tanpa inisiatif (Tilaar, 1999: 87).

Keseragaman kurikulum di seluruh Indonesia adalah sesuatu yang kurang tepat, karena wilayahnya begitu luas dan memiliki ciri budaya serta alam lingkungan yang berbeda pula. Setiap daerah memiliki budaya sendiri, yang mana peserta didik telah hidup menyatu dengan budaya sejak dia lahir, yang perlu dikembangkan dalam membentuk kepribadiannya. Demikian juga dia hidup di lingkungan alam yang peserta didik perlu diberdayakan untuk mengelola, memanfaatkan, serta melestarikan alam lingkungan itu.

Selain dari itu, alam demokratisasi yang semakin berkembang dalam kehidupan manusia tidaklah sesuai dengan sistem pendidikan sentralistik, karenanya dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999, maka salah satu di antara aspek yang perlu mendapat perhatian untuk memperoleh hak desentralisasinya adalah pendidikan. Sentralisasi bukanlah berarti menghilangkan unsur-unsur nasional dan menimbulkan fanatisme daerah, melainkan diberi perimbangan yang proporsional antara kurikulum nasional dan daerah (lokal).



## b. Link and Match

Peristilahan *link and match* dipopulerkan pada zaman Wardiman menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Intinya adalah bagaimana pendidikan itu *link* (keterkaitan) outputnya dengan kebutuhan masyarakat. Di dunia yang terus berkembang seperti yang telah diuraikan terdahulu, secara otomatis akan terjadi perubahan di masyarakat (*social change*). Perubahan itu dengan serta-merta pula akan berdampak kepada perubahan gaya hidup serta kebutuhan hidup masyarakat. Karena terjadinya perubahan sekolah dalam hal ini dunia pendidikan, mestilah dapat menghasilkan manusia ilmu dan teknologi, maka terkait pekerjaan di lapangan yang membutuhkan tenaga yang terkait langsung dengan ilmu tersebut. Dalam hal inilah apakah dunia pendidikan kita telah mampu menyahutinya?

Untuk menjawab itu mari kita lihat gambaran global tentang pendidikan kita. Jalur pendidikan yang telah diatur di tingkat menengah adanya bentuk satuan pendidikan kejuruan yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tersebut. Adapun di dunia perguruan tinggi adanya jalur profesional. Jalur akademik untuk kepentingan keilmuan, sedangkan jalur profesional untuk kesiapan penerapan keahlian tertentu.

Munculnya prinsip *link and match*, karena dilihat terdapatnya kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan pembangunan akan tenaga terampil. Dalam hal ini tentu tidak dimaknai bahwa pendidikan kita semata-mata diarahkan kepada menghasilkan tenaga kerja terampil. Praktik pendidikan di Indonesia tidak dilihat sebagai parsial, me-

mandangnya dari segi kebutuhan tenaga kerja saja, tetapi juga harus dipandang dari sudut pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Dipandang dari sudut pembagian pendidikan atas beberapa jalur, formal, nonformal, dan informal haruslah meletakkan kajian tersebut secara holistik. Jadi, dengan demikian arah kurikulum pendidikan Indonesia platformnya tetap berprinsip menciptakan manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan terdahulu, namun harus juga dipertimbangkan penempatannya sesuai dengan jalur pendidikan yang telah diatur.

## c. Beban Kurikulum

Banyak juga kritikan yang dilemparkan kepada praktik pendidikan nasional berkaitan dengan saratnya kurikulum, sehingga seolah-olah kurikulum itu kelebihan muatan. Hal ini memengaruhi juga kualitas pendidikan. Anak-anak terlalu banyak dibebani oleh mata pelajaran. Dari satu sisi bisa saja kritikan itu benar, tetapi dari sisi lain tentu juga ada alasannya untuk menyusun kurikulum sedemikian rupa. Jika beranjak dari tujuan pendidikan nasional, maka tidak boleh tidak program mata pelajaran mestilah sinkron dengan tujuan pendidikan nasional. Barangkali yang penting diatur di sini adalah soal pemahaman kita tentang kurikulum. Betul, jika pemahaman tentang kurikulum itu adalah subjek mata pelajaran yang diberikan di sekolah saja maka otomatislah terasa beban kurikulum itu berat, tetapi apabila diintensifkan praktik kurikulum dalam pengertian yang disebutkan terdahulu maka tinggal membaginya kepada beberapa bagian dalam operasionalnya.





Pengoperasian kurikulum itu dapat disinkronisasikan secara proporsional antara intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Intrakurikuler, yakni apa yang diberikan di depan kelas oleh pendidik kepada si terdidik. Kokurikuler, yakni apa yang diberikan kepada si terdidik sebagai kelanjutan dari intrakurikuler. Selain dari pada itu yang sering dilupakan adalah upaya pembentukan suasana dan iklim yang kondusif bagi terwujudnya tujuan pendidikan.

Dengan demikian subjek-subjek pelajaran tersebut dapat dibagi kepada beberapa bentuk kurikulum di atas, sehingga beban kurikulum itu tidak hanya tertumpu pada intrakurikuler.

## 2. Pendidik

Pendidik adalah elemen yang amat penting dalam pendidikan, sebab pendidik berfungsi sebagai sentral dari seluruh aktivitas pendidikan khususnya proses belajar mengajar. Hampir semua faktor pendidikan yang disebut dalam teori pendidikan terpulang operasionalnya di tangan pendidik, misalnya, metode, bahan (materi) pelajaran, alat pendidikan dalam operasionalnya banyak tergantung kepada pendidik.

Karena itu, di antara sekian faktor penentu tentang kualitas pendidikan, faktor utamanya adalah pendidik. Di tangan pendidik kurikulum akan hidup dan bermakna, sehingga menjadi “makanan” yang mendatangkan selera untuk disantap oleh peserta didik. Di tangan pendidik pula metode penyajian menjadi hidup dan menarik bagi peserta didik. Alat pendidikan akan bermanfaat di tangan pendidik yang cekatan. Alat yang berbentuk materi dapat diberdayakan oleh pendidik yang profesional sederhana apa pun alat tersebut.

Alat pendidikan yang nonmateri akan digunakan oleh pendidik sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Kapan misalnya peserta didik diberi hukuman, larangan, pujian, hadiah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan itulah makanya pendidik memegang kunci yang penting dalam memberdayakan pendidikan menghadapi dunia yang penuh dengan kompetitif. Berkenaan dengan itu bagaimana kualifikasi pendidik dalam menghadapi pasar bebas yang akan datang ini. Mengenai ini harus ada beberapa hal yang menjadi agenda peningkatan kualifikasi guru. Tenaga guru yang sudah diangkat perlu dievaluasi berdasarkan kualifikasi ini, bagi yang belum supaya diarahkan ke tingkat kualifikasi tersebut. Bagi calon pendidik harus dipersiapkan ke arah kualifikasi dimaksud.

- a. Keilmuan. Pendidik betul-betul memiliki kualifikasi ilmu sesuai dengan bidang yang diajarkannya berdasarkan jenjang pendidikan yang diajarkannya.
- b. Metodologis. Seorang guru mesti memiliki ilmu terapan yang akan digunakan dalam rangka mengomunikasikan ilmu tersebut kepada peserta didik. Memiliki keterampilan mengajar, keterampilan membuat persiapan mengajar, mengevaluasi, metode mengajar, manajemen pendidikan, kepemimpinan guru, dan lain sebagainya.
- c. Akhlak. Seorang pendidik mestilah memiliki komitmen moral yang tangguh, konsisten, dan konsekuen menjalankan etika profesinya sebagai pendidik. Pendidik mesti menjadi contoh, karena dia tempat bercermin anak didiknya.
- d. Loyalitas. Kecintaan kepada profesinya menimbulkan



kecintaan kepada tugas yang diembannya. Karena itu profesi kependidikan bagi seorang pendidik bukanlah pekerjaan sambilan yang ditangani setengah hati.

### 3. Lembaga Pendidikan

Berkaitan dengan semakin meningkatnya tuntutan kualitas pendidikan, maka pemaknaan pendidikan tidak cukup hanya meletakkannya dalam pengertian *schooling* tetapi lebih dari pada itu lagi, tuntutan kualitas tidak memungkinkan peserta didik melakukan kegiatan pendidikan formal saja, tetapi mesti serentak dan bersamaan dengan perlunya kebersamaan antara pendidikan formal, nonformal, dan informal. Karenanya, memberdayakan semua lembaga pendidikan ini serta mengaturnya menjadi satu kesatuan merupakan suatu upaya untuk lebih memberdayakan pendidikan di era globalisasi.

Demikian juga halnya dengan menyinkronkan antara berbagai bentuk kurikulum yang telah disebutkan di atas menjadi satu kesatuan, juga bagian yang relevan dengan pemberdayaan lembaga pendidikan sekarang ini.

### E. DINAMIKA PENDIDIKAN DALAM MENYAHUTI ERA KOMPETITIF

Globalisasi hakikatnya adalah kompetisi. Kompetisi hakikatnya adalah keunggulan dan di sini akan berlaku teori Darwin *the survival of the fittest*. Seleksi alam akan muncul bahwa yang unggul yang akan bertahan. Oleh karena itu, arah pendidikan kita di abad ini adalah pembentukan generasi yang unggul akan mampu bersaing. Dapatkah itu kita

lakukan? Melihat kondisi pendidikan kita sekarang yang juga ikut terpuruk dengan keterpurukan ekonomi Indonesia. Anggaran pendidikan yang bisa dialokasikan haruslah 20% dari APBN dan APBD, sesuai tuntutan Undang-Undang Pendidikan. (Pasal 49 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003).

Sebetulnya, jauh sebelum multi krisis melanda Indonesia, perhatian yang serius dengan arti kata memprimadonakan pendidikan belum pernah dilakukan di Indonesia. Zaman Bung Karno, arahan yang dominan adalah masalah politik, zaman Presiden Soeharto, arahnya ekonomi. Arahan kepada mengutamakan pendidikan belum. Karena itu kita tidak heran jika di kawasan ASEAN saja pendidikan kita masih tertinggal.

Angka partisipasi pendidikan masih rendah, mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, demikian juga tingginya angka *dropout*. Angkatan kerja kita kebanyakan masih tamatan sekolah dasar yang kualitasnya masih tergolong rendah. Rendahnya SDM Indonesia seperti yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga internasional.

Gambaran beginilah peta pendidikan sekarang, untuk mengatasi itu pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia harus bekerja keras dalam membenahi dunia pendidikannya dalam menghadapi kompetitif di masa yang akan datang.

### E. KESIMPULAN/PENUTUP

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengubah seluruh tatanan kehidupan manusia secara drastis, karenanya perubahan masyarakat sesuatu yang alami sifatnya sebagai suatu bagian dari proses dan dinamika perkembangan





masyarakat. Sejak manusia berada di planet bumi ini telah terjadi banyak perubahan. Alvin Toffler pun telah membagi gelombang kehidupan manusia itu kepada tiga gelombang, gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga sebagai abad informasi. Masing-masing gelombang menunjukkan tingkatan peradaban manusia.

Di era informasi dan komunikasi ini, manusia akan berada di bawah naungan dunia atau peradaban global. Peradaban global ini mau tidak mau akan membawa manusia kepada kompetisi. Di abad kompetisi akan berlaku hukum kompetitif yang pernah diungkapkan Darwin *the survival of the fittest*. Intinya adalah terjadinya pertarungan keunggulan, secara alami akan terjadi seleksi alam siapa yang unggul yang akan bertahan hidup.

Pertanyaan mendasar, bagaimanakah membentuk manusia unggul tersebut? Jawabnya tidak lain adalah lewat pendidikan. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan pendidikan dan jelas sekali bahwa manusia tidak akan berdaya tanpa pendidikan. Potensi yang terpendam pada diri manusia tidak mungkin diwujudkan tanpa lewat pendidikan. Di sinilah letaknya hakikat memanusiakan manusia. Di sisi lain, manusia sejak keberadaannya di muka Bumi secara evolutif telah membangun budaya dan peradabannya. Peradaban yang dibangun oleh manusia itu secara berkesinambungan dari generasi ke generasi telah diwariskan kepada manusia. Budaya dan peradaban manusia itu akan diwariskan lewat pendidikan.

Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang berkembang yang saat sekarang sedang diterpa oleh aneka macam

krisis yang merupakan problema internnya, sedangkan problema eksternnya dia akan menghadapi dunia global yang tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan kompetitif dengan bangsa-bangsa lain, apalagi dalam waktu dekat akan terbuka pasar bebas kawasan ASEAN dan Asia Pasific. Dalam kondisi demikian, bagaimana bangsa Indonesia mempersiapkan dirinya sebagai suatu bangsa di era kompetitif tersebut.

Berkaitan dengan hal itu tidak boleh tidak seluruh kekuatan bangsa, pemerintah dan masyarakat harus menyamakan visi dalam menghadapi dunia global dimaksud, kesamaan visi itu adalah harus memberdayakan pendidikan sebagai suatu alternatif untuk menjawab berbagai kemelut intern dan masalah ekstern yang akan dihadapi. Era ini menurut penulis sudah masanya “mempanglimakan” pendidikan.



## BAB 3

# MEMBANGUN KARAKTER BANGSA MELALUI PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN AGAMA

## A. PENDAHULUAN

Membangun manusia seutuhnya adalah tujuan ideal pendidikan di Indonesia. Untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya itu, diawali dengan melihat bahwa manusia itu memiliki dua aspek, yakni fisik dan psikis (jiwa). Di dalam aspek psikis (jiwa) inilah duduknya pendidikan karakter. Lahirnya sebuah sikap dan perilaku itu adalah dimotori penggerakannya dari dalam jiwa seseorang. Seseorang melakukan tindakan kebajikan tentulah diawali dengan sebuah niat atau motivasi dalam diri seseorang begitu juga tindakan kejahatan. Karena itulah membangun manusia seutuhnya itu mestilah berawal dari pembangunan jiwa manusia.

Berbincang soal karakter, ini adalah bagian dari membangun jiwa manusia, karakter yang baik tidak akan muncul tanpa diawali dengan penjiwaan terhadap karakter tersebut. Dari penjiwaan terhadap karakter itulah munculnya perilaku baik, perilaku baik tidak akan muncul dengan tiba-tiba tanpa melalui proses pendidikan. Seseorang bersikap diawali dari mengenal yang baik, kemudian membiasakannya dan melatihnya terus-menerus sehingga menjadi kepribadiannya.

Ketika itu telah menjadi bagian dari pribadinya maka ia telah berbentuk karakter.

Saat sekarang di Tanah Air kita ini sedang marak sekali perbincangan mengenai pendidikan karakter, hal ini tentu karena dirasakan sekali di masyarakat betapa kemerosotan bangsa ini dalam bidang karakter. Bahkan sebetulnya pada saat Soekarno menjadi presiden beliau sering mengungkapkan perkataan *Nation and Character Building*, ketika itu beliau telah melihat bahwa salah satu yang amat penting dibangun pada masyarakat Indonesia adalah karakternya.

Perbincangan tentang pendidikan karakter telah banyak diungkap dalam berbagai seminar, namun perbincangan itu perlu lebih dispesifikan agar pendidikan karakter itu disorot dari hal-hal bersifat mikro, sehingga lebih mengkhususkan pembahasan dan lebih dapat mengisi bagian-bagian yang terkait dengan karakter. Untuk saat sekarang ini, pendidikan karakter itu harus dilihat dari segala aspek kehidupan manusia, di mana berbagai aspek kehidupan manusia dikaitkan dengan pendidikan karakter, misalnya kaitan pendidikan olah raga, seni, dan ilmu pengetahuan dengan karakter. Sejatinya karena persoalan karakter bangsa ini sudah begitu serius, maka upaya penanggulangannya mesti serius pula untuk itulah pendidikan karakter perlu dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan manusia. Seiringan dengan itu maka pendidikan karakter perlu dilaksanakan di lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pada pendidikan formal misalnya, seluruh mata pelajaran yang diajarkan oleh guru perlu dikaitkan dengan nilai (*value*). Seorang guru yang berdiri di depan kelas tidak hanya mentransformasikan *know-*



*ledge* (ilmu pengetahuan) kepada peserta didik, tetapi dia harus mengimplisitkan nilai (*value*) yang terkandung dalam bahan ajaran yang disampaikan itu. Banyak nilai-nilai kebajikan yang bisa disampaikan dalam setiap bahan ajaran yang dapat membentuk karakter anak didik. Lewat pendidikan olahraga, bisa di kedepankan pendidikan sportivitas, disiplin, semangat kejuangan. Jangan semata-mata terfokus kepada olahraganya saja, tetapi ambillah nilai (*value*). Boleh jadi pendidikan kita selama ini lebih banyak terfokus kepada hal-hal bersifat pencerdasan akal (IQ) dalam bentuk mengasah kognitif, kita abaikan tentang hal yang berisikan nilai (*value*) dan mengisi afektif mereka.

Salah satu di antara bentuk pendidikan yang amat terkait erat dengan pendidikan karakter yaitu pendidikan agama. Pendidikan agama berisikan tentang kepercayaan (iman), pengabdian kepada Allah (ibadah), dan akhlak al karimah. Pada pendidikan akhlak inilah terkait erat dengan pendidikan karakter. Bahkan pada aspek pendidikan iman dan ibadah juga dapat dikaitkan pendidikan karakter.

Pendidikan agama telah dilaksanakan di Indonesia sejak awal kemerdekaan, bagaimana sekarang tingkat keberhasilan pendidikan agama itu, agaknya ini perlu penelitian, namun karena saratnya penyimpangan karakter ini, maka pendidikan agama dikhawatirkan tidak akan berdaya menghadapi berbagai hal yang terjadi saat sekarang bila tidak diberdayakan. Berkaitan dengan itu, bagaimana memberdayakan pendidikan agama itu agar ia bisa menjadi salah satu pilar penting dari pendidikan karakter. Sehubungan dengan itu penulis akan mencoba mengkaji hal tersebut.

## B. PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pada tahun 1946 BPKNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Pusat) mengusulkan kepada pemerintah agar pendidikan agama dilaksanakan di sekolah, usul tersebut disambut baik oleh pemerintah, ditindaklanjuti oleh Menteri PP&K di kala itu Mr. Soewandi (2 Oktober 1946–27 Juni 1947) dengan membentuk Panitia Penyelidik Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hajar Dewantara, hasil dari panitia itu dilaksanakanlah pendidikan agama di sekolah-sekolah. Untuk melaksanakan pendidikan agama di sekolah-sekolah tersebut dibuatlah beberapa peraturan bersama antara Menteri Agama dan Menteri PP&K.

Apa sebabnya pendidikan agama itu perlu diajarkan di sekolah-sekolah, padahal pada zaman kolonial Belanda tidak diajarkan di sekolah pemerintah seperti HIS, MULO, dan AMS. Ada beberapa argumentasi untuk itu, yaitu:

*Pertama*, falsafah Pancasila di mana Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertamanya. Sila ini bukanlah sesuatu yang pasif tetapi aktif, yang dimaknai apabila setiap warga negara Indonesia memiliki falsafah hidup berketuhanan, maka itu artinya bahwa setiap bangsa Indonesia mestilah mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan Yang maha Esa. Untuk bisa mengimani dan mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan Yang Maha Esa, maka diperlukanlah pendidikan agama.

*Kedua*, landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk





memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Asas ini bermakna bahwa untuk bisa mengimani Tuhan Yang Maha Esa dan untuk bisa beribadah kepada-Nya perlu dilaksanakan pendidikan agama.

*Ketiga*, landasan Undang-Undang Pendidikan. Undang-Undang Pendidikan yang pertama sekali dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1950, pada Pasal 20 menjelaskan bahwa:

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama; orangtua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara pengajaran agama di sekolah sekolah diatur oleh peraturan, dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.

Selanjutnya, pendidikan agama diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada undang-undang ini disebutkan pada Bab IX Pasal 39 ayat 2, tentang isi kurikulum. Isi kurikulum setiap jalur dan jenjang pendidikan memuat: a) pendidikan Pancasila; b) pendidikan agama; dan c) pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, undang-undang tentang sistem pendidikan nasional yang terbaru dijelaskan tentang pendidikan agama pada Pasal 12 ayat (1): Setiap peserta didik dalam setiap satuan pendidikan berhak: a. memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

*Keempat*, landasan sosial religius yang dimaknai bahwa sesungguhnya bangsa Indonesia sedari dahulu kala adalah bangsa beragama, sejak kepercayaan nenek moyang dalam bentuk *animisme*, *dinamisme*, kemudian diikuti dengan masuknya agama Hindu, Budha, Islam, dan Kristen, jadi-lah masyarakat Indonesia masyarakat religius. Karena masyarakat Indonesia ini masyarakat religius, maka tidaklah mungkin untuk tidak melaksanakan pendidikan agama bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Beberapa landasan argumentatif di atas menjelaskan, betapa sesungguhnya pendidikan agama itu mempunyai kedudukan yang amat kuat di Indonesia yang mencakup landasan filosofis, konstitusi, yuridis, serta landasan sosial kemasyarakatan.

Bertolak dari visi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama tentang visi pendidikan agama adalah “Terbentuknya sosok anak didik yang memiliki karakter watak dan kepribadian dengan landasan iman dan ketakwaan serta nilai-nilai akhlak atau budi pekerti yang kukuh yang tercermin dalam keseluruhan sikap dan perilaku sehari-hari, untuk selanjutnya memberi corak bagi pembentukan watak bangsa” (Departemen Agama RI, 2001: 4). Visi ini akan diaplikasikan dalam tiga mata pembelajaran pokok: keimanan (akidah), ibadah, dan akhlak. Ketiga aspek ini berbeda konten (isi), tetapi menyatu dalam pembentukan karakter dan watak peserta didik akan berujung kepada pembentukan karakter, ibadah juga begitu tentu terlebih-lebih akhlak. Dengan demikian, pendidikan agama yang dirancang dengan baik dilaksanakan dengan baik pula akan dapat membentuk karakter bangsa.



Selain dari pendidikan agama di lembaga formal yang terdapat di pesantren, sekolah, dan madrasah juga dilaksanakan lembaga pendidikan agama nonformal yang dilaksanakan di masyarakat, seperti, lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim. Adapun pendidikan agama di lembaga informal dilaksanakan di lingkungan keluarga.

Dari tujuan pendidikan nasional dapat dilihat betapa pentingnya pendidikan agama, karena salah satu unsur yang ditekankan pada tujuan pendidikan nasional yang disebut dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab (UU No. 20 Tahun 2003 Bab II, Pasal 3). Untuk mencapai itu perlu dipadukan pendidikan agama di lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Pendidikan karakter adalah proses yang dilaksanakan oleh penanggung jawab pendidikan untuk membentuk kepribadian peserta didik yang berkarakter. Karakter dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* menyebutkan sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat; watak. Dalam *Kamus Psikologi* disebutkan bahwa karakter adalah *Character a consisten and enduring properti or quality by means of which of person, object, or events can be identified* (Chaplin, 1973: 79). Suatu kualitas atau sifat yang tetap terus-menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasi, seorang pribadi, suatu objek atau kepribadian.

Simon Philips (2008) menyebutkan karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada satu sistem yang melandasi pemikiran sikap dan perilaku yang ditampilkan. Doni Koesuma (2007) menyebutkan bahwa karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik, atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber bentukan-bentukan yang diterimanya dari lingkungannya.

Kutipan-kutipan terdahulu dikemukakan di sini untuk lebih mendekatkan pemahaman terhadap apa yang disebut karakter itu yang apabila disimpulkan bahwa karakter tersebut adalah nilai-nilai kepribadian seseorang yang telah melekat kepada dirinya sebagai hasil dari pendidikan. Nilai-nilai tersebut diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tiga domain pendidikan yakni pembentukan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kognitif dibentuk lewat transfer ilmu pengetahuan, afektif dibentuk melalui transfer nilai-nilai (*value*), sedangkan keterampilan (psikomotor) dibentuk melalui transfer *skill*. Di antara tiga hal ini yang paling terkait dengan karakter adalah transfer nilai (*value*), tanpa mengabaikan bahwa keterkaitan pembentukan karakter ada hubungannya dengan pembentukan kognitif dan psikomotor.

### C. PROBLEMA DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIKAN AGAMA

Ada dua problema utama pendidikan agama yang terdapat di lembaga pendidikan formal: *pertama*, problema intern; dan *kedua*, problema ekstern. Problema intern menyangkut tentang peserta didik, pendidik, kurikulum, sarana fasilitas, metode, serta manajemen pembelajaran.



Peserta didik, masalahnya adalah keberagaman tingkat pengetahuan, pengalaman, serta penghayatan agama peserta didik. Peserta didik berasal dari latar belakang keluarga dan lingkungan yang berbeda, maka sekaligus berdampak pula terhadap pengetahuan, pengalaman, serta penghayatan agamanya.

Pendidik, berkenaan dengan kompetensi pendidik dalam Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan kompetensi dasar pendidik itu ada empat: kompetensi, profesional, individual, dan sosial. Kompetensi Paedagogi seorang pendidik mestilah memahamai tentang teori dan praktik pendidikan. Kompetensi profesional, pendidik memiliki pengetahuan yang cukup terhadap mata pelajar yang diajarkannya. Kompetensi kepribadian adalah terkait erat dengan akhlak pendidik, dan kompetensi sosial adalah kaitan antara pendidik dan lingkungan masyarakatnya. Apakah pendidik agama saat sekarang telah memiliki kompetensi tersebut secara utuh? Melihat kepada tingkat pendidikan guru agama masih banyak yang belum mencapai standar yang disaratakan, yakni berpendidikan S-1 serta tersertifikasi pula, maka kualitas pendidik agama masih sangat perlu ditingkatkan terus-menerus.

Kurikulum, sehari-hari kurikulum diartikan sebagai apa yang diajarkan, pengertian itu tidak salah, akan tetapi pengertian yang luas tidak hanya menyangkut apa yang diajarkan akan tetapi seluruh aktivitas yang dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Bagaimana keadaan kurikulum pendidikan agama saat sekarang ini? Bila bertolak dari pengertian kurikulum dalam arti luas di atas, maka kuriku-

lum pendidikan agama itu masih terbatas pada pengajaran di dalam kelas, sedikit atau hampir tidak ada pelajaran di luar kelas, terkonsentrasi dalam mengisi kognitif peserta didik, sangat sedikit menyentuh afektif. Diperlukan penerapan kurikulum yang tidak hanya intrakurikuler, akan tetapi juga kokurikuler, ekstrakurikuler, dan *hidden* kurikulum.

Sarana dan fasilitas pembelajaran, sarana dan fasilitas juga sangat kurang, sehingga pembelajaran hanya mengandalkan kegiatan verbal, ceramah, diskusi, tanya jawab antar pendidik dengan peserta didik. Sudah sepantasnya pula pendidikan agama disajikan tidak hanya dalam bentuk sedemikian rupa, perlu dirangsang pendengaran, penglihatan, dan hati peserta didik dalam menghayati pembelajaran agama. Untuk itu diperlukan laboratorium pendidikan agama. Di laboratorium pendidikan agama itu terdapat berbagai media pembelajaran yang dapat merangsang pendengaran, penglihatan, pengetahuan, dan hati peserta didik.

Metode, memberikan pelajaran menarik, kreatif, dan menyenangkan banyak ditentukan oleh metode yang dipakai pendidik. Jika metode monoton dalam bentuk ceramah pasti membosankan, bahkan bukan hanya itu tidak banyak memberikan kesan dan pengaruh kepada peserta didik, sebab Confusius berkata: "Apa yang saya dengar saya lupa, apa yang saya dengar, saya lihat saya mengerti sedikit, dan apa yang saya dengar saya lihat dan saya praktikkan saya pahami". Metode ceramah ini telah mulai ditinggalkan dalam penyajian pembelajaran sekarang ini. Karena itu, telah banyak dipraktikkan metode *active learning*. Adapun problema ekstern, adalah tantangan dan pengaruh faktor negatif dari kemajuan zaman dan globalisasi.



## D. MANAJEMEN PEMBELAJARAN DAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN

Manajemen pembelajaran adalah bagaimana seseorang pendidik memanajemen pembelajaran dengan baik, sejak dari persiapan (sebelum mengajar), sedang mengajar (proses pembelajaran), pasca-pembelajaran (evaluasi). Pertanyaannya, apakah setiap pendidik telah mengorganisasi hal tersebut dengan baik. Manajemen kelembagaan, yakni terkait erat dengan bagaimana lembaga pendidikan tersebut mengelola pendidikan agama dengan baik. Pendidikan agama di sebuah lembaga pendidikan bukanlah tugas seorang pendidik agama semata-mata, ia adalah tugas kolektif, pimpinan sekolah mempunyai tanggung jawab untuk memanajemen pendidikan agama di institusinya. Pendidik bidang studi lainnya juga bertanggung jawab untuk keberhasilan pendidikan agama. Ada dua tugas pokok mereka: *Pertama*, menyampaikan nilai (*value*) yang terdapat dalam mata pelajaran yang mereka ajarkan kepada peserta didik terhadap mata pelajaran. Setiap mata pelajaran punya nilai-nilai positif untuk disampaikan, dan itu adalah bagian dari pembelajaran agama. *Kedua*, memberikan contoh teladan.

Setelah diuraikan beberapa problema pendidikan agama, lalu timbul pertanyaan bagaimana memberdayakannya? Untuk itu akan dikemukakan berapa hal: *pertama*, pemberdayaan pendidik; *kedua*, kebijakan pendidikan agama; *ketiga*, manajemen.

Pendidik, dari sekian banyak faktor pendidikan yang paling menentukan adalah faktor pendidik. Di tangan pendidik yang cekatan dan profesional, kekurangan sarana dan

fasilitas pembelajaran dapat ditutupi, sebaliknya di tangan pendidik yang tidak profesional, sarana dan fasilitas pembelajaran yang canggih seolah-olah tak ada gunanya. Pendidik yang cekatan dan profesional akan dapat mengubah kelas yang pasif menjadi aktif, murid yang malas menjadi rajin, dan lain sebagainya. Karena itulah, jika ingin memperbaiki pendidikan maka yang pertama dan mula-mula sekali diperbaiki adalah pendidiknya. Apa yang perlu diperbaiki dari pendidik? *Pertama*, kompetensi, setidaknya memiliki empat kompetensi yang telah dikemukakan terdahulu. *Kedua*, pendidik haruslah dilandasi oleh rasa cinta, cinta kepada profesinya, cinta kepada tugasnya, dan cinta kepada peserta didiknya. Cintalah yang menggerakkan untuk berbuat.

Kebijakan pendidikan agama, menyangkut tentang bagaimana pengaturan dan peraturan serta upaya-upaya yang dilaksanakan untuk memberdayakan pendidikan agama. Hal ini dimulai dari bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidik agama, dana yang mencukupi, kurikulum yang memungkinkan untuk mencapai tujuan pendidikan agama, posisi dan kedudukan pendidikan agama mesti diletakkan pada posisi sentral bukan pada posisi marginal. Manajemen pendidikan agama, tanggung jawab pendidikan agama di lembaga pendidikan formal tidak hanya berada di tangan Kementerian Agama tetapi juga di tangan Kementerian Pendidikan, hal ini juga termasuk bahwa pendidikan agama di lembaga pendidikan formal (sekolah dan perguruan tinggi umum) tidak hanya terletak di bahu pendidik agama, tetapi juga di tangan pimpinan perguruan. Pendidikan agama juga tidak hanya diberikan oleh pendidik agama akan tetapi juga oleh pendidik mata pelajaran lainnya lewat penarapan nilai



(*value*). Nilai-nilai agama apa yang terdapat pada mata pelajaran tersebut.

## E. KAITAN ANTARA PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KARAKTER

Seperti yang telah diuraikan terdahulu tentang apa hakikat pendidikan agama dan pendidikan karakter, kedua hal ini memiliki titik singgung yang sangat erat sekali bahkan pada hakikatnya menyatu dan tidak terpisahkan. Domain pokok dari pendidikan agama ada tiga: pendidikan keimanan (akidah), pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak. Dalam konsep Islam domain akidah dan ibadah terkait erat dengan akhlak. Akidah membuat orang menjadi berakhlak sebab selalu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya, pada ketika seseorang memiliki sikap yang sedemikian itu maka dia akan terhindar dari perbuatan tidak terpuji.

Kata *akhlak* bentuk jamak dari *al khuluq* atau *alkhulq* yang secara etimologi berarti:

1. tabiat, budi pekerti;
2. kebiasaan atau adat;
3. keperwiraan, kesatriaan, kejantanan;
4. agama;
5. kemarahan (*gadab*) (*Ensiklopedi Islam*, Jilid 1, 1993: 102).

Imam Al Ghazali mendefinisikan akhlak: sifat yang tertanam pada jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan (Al Ghazali, 1989: 58).

Jika perbuatan itu perbuatan baik dan terpuji menurut pandangan akal dan syariat Islam, disebut dengan akhlak

terpuji, tetapi jika perbuatan itu bukan perbuatan baik disebut dengan akhlak tercela.

Rasulullah menegaskan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. (HR. Ahmad). "Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya (HR. Timizi). Hadis Nabi juga menjelaskan bahwa masuk surga atau neraka seseorang terkait erat dengan akhlaknya. Digambarkan Beliau bahwa seorang yang taat beribadah, tetapi tidak berakhlak mulia ditempatkan di neraka, sedangkan seorang yang ibadahnya biasa-biasa saja sekadar yang diwajibkan kepadanya yang dikerjakannya tetapi memiliki akhlak yang baik, maka dia akan di surga.

Akhlak itu sesungguhnya adalah perpaduan antara lahir dan batin. Seseorang dikatakan berakhlak apabila seirama antara perilaku lahirnya dan batinnya. Karena akhlak itu juga terkait dengan hati, maka penyucian hati adalah salah satu jalan untuk mencapai akhlak mulia. Dalam pandangan Islam hati yang kotor akan menghalangi seseorang mencapai akhlak mulia, boleh jadi dia melakukan kebajikan tetapi kebajikan yang dia lakukan itu bukanlah tergolong akhlak mulia, karena tidak dilandasi oleh hati yang mulia pula. Al Ghazali menyebutkan ada tiga yang mendorong manusia untuk melakukan perbuatan: *'aql*, *ghadhab*, dan *syahwat*.

'*Aql* dorongan berpikir, dorongan berpikir ini akan melahirkan akhlak mulia apabila dia berpikir dengan *hikmah*. '*Aql* haruslah melahirkan *hikmah*. Berpikir berlandaskan *hikmah* adalah berpikir yang benar. *Ghadhab* dorongan marah, dorongan marah ini akan menjadi akhlak mulia kalau melahirkan *saja'ah*, *syahwat*, yang benar adalah kalau melahirkan '*iffah*, yaitu keinginan yang tidak diperturutkan



untuk mengumbar hawa nafsu dan juga tidak membunuhnya, akan tetapi berjalan pada jalan tengah yang wajar dan semestinya. Karena itulah pendidikan akhlak dalam Islam terkait erat dengan pendidikan hati (kalbu). Dalam pandangan Islam pendidikan akhlak tidak bisa hanya sekadar mendidik perilaku, tetapi juga harus dididik dari mana sumber perilaku itu. Karena itulah orang-orang yang ingin memperbaiki akhlaknya terus-menerus dia harus melakukan pembersihan hati secara terus-menerus dari sifat-sifat tercela, kegiatan inilah yang disebut dengan *takhalli*. Setelah hati bersih baru diisi dengan sifat-sifat terpuji, kegiatan ini disebut dengan *tahalli*. Setelah keduanya dilakukan, maka memasuki estafet ketiga *tajalli*.

Pendidikan karakter adalah mendidik seseorang untuk memiliki perilaku yang baik, sehingga perilaku itu menjadi ciri khasnya yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya dan kehidupannya. Karakter yang baik itu telah menjadi bagian dari dirinya. Dalam hal ini miriplah seperti apa yang digambarkan Imam Al Ghazali di atas, bahwa akhlak itu adalah sesuatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian.

Berdasarkan ungkapan yang telah diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak mempunyai kaitan erat dengan pendidikan karakter, bahkan objek-objek pembahasan dalam kajian karakter itu adalah juga menjadi objek bahasan dalam akhlak begitu juga sebaliknya. Dengan mendidikan akhlak secara utuh, *kaffah* telah tercakup di dalamnya sekaligus pendidikan karakter, karena itu salah

satu bagian yang harus diperkuat di Indonesia saat sekarang ini adalah pendidikan akhlak yang menjadi bagian dari pendidikan agama. Sehubungan dengan itu, maka pemberdayaan pendidikan agama adalah salah satu upaya untuk memberdayakan pendidikan karakter bangsa.

## F. PENUTUP/KESIMPULAN

Bangsa Indonesia sebagai bangsa religius, seharusnya memiliki karakter yang baik, sebab salah satu poin penting yang diajarkan dan harus diamalkan oleh siapa saja yang menganut agama adalah akhlak mulia. Akan tetapi ternyata bahwa saat sekarang bangsa Indonesia sedang mengalami krisis akhlak. Tentu ada permasalahan. Kemungkinan besar permasalahan itu adalah masih kurang efektifnya pendidikan akhlak atau pendidikan karakter.

Untuk itu perlu dilakukan kajian terus-menerus, sehingga ditemukan pendidikan karakter yang efektif dan efisien melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Banyak cara yang dapat diterapkan dalam pendidikan karakter. Salah satu di antaranya adalah dengan mengefektifkan dan memberdayakan pendidikan agama yang dilaksanakan di lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal. Memberdayakan pendidikan agama bermakna akan melahirkan orang yang beriman, beribadah, dan berakhlak. Ketiga domain menuju kepada terbentuknya karakter yang baik, terutama pendidikan akhlak. Melalui pengefektifkan dan pemberdayaan pendidikan agama bermakna akan melahirkan manusia yang berakhlak mulia yang sejalan dengan manusia yang berkarakter.





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ân al-Karîm

Abu Hâmid Muhammad Al Ghâzali. 1989. *Ihya 'Ulumuddin*.  
Bairut: Dar al-Fikri.

Al-Attas, Syed Muhammad, al-Naquib. 1979. *Aims and Objectives of Islami Education*. Jedah: King Abd. Azis University.

Al-Abrâsyî, Muhammad Athiyah. 1964. *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah*. Mesir: Isa Bâb al-Halabi.

\_\_\_\_\_. *At-Tarbiyyah Islâmiyyah wa Falsafatuha*. 1975.  
Mesir: Isa Bâb Al-Halabi.

Al-Ahwâni, Ahmâd Fuâd. *At-Tarbiyyah fî al-Islâm*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif.

Al-'Ainainî, Abû Khalîl Âli. 1980. *Falsafah At-Tarbiyyah al-Islâmiyyah fî Al-Qur'ân al-Karîm*. Kairo: Dâr al-Fikri al Arabi.

Anis, Ibrâhim dkk. 1972. *Al Mu'jam Al Wasît*. Kairo: Dar al-Ma'ârif.

Ashraf, Syed Ali. 1985. *New Horizon in Muslim Education*.  
Cambridge, Hodder and Stoughton: the Islamic Academy.

Asy-Syaibânî, 'Umar Muhammad At-Toumý. 1975. *Falsafah at-Tarbiyyah al-Islâmiyyah*. Trabulus, Asy-Syirhab al ammah.

Barnadib. Sutari Imam. 1986. *Ilmu Pendidikan Sistematis*.  
Yogyakarta: FIP, IKIP.

Burhanuddin Salam. 2000. *Etika Individual*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Balai Pustaka. 1990. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta.
- Chaplin, J.P. 1973. *Dictionary of Psychology*. New York: Dell Publishing Co. Inc.
- Daradjat, Zakiah. 1984. *Pembinaan Dimensi Rohaniah Manusia dalam Pandangan Islam*. Makalah Seminar IAIN Sumatera Utara Medan.
- Daulay, Haidar Putra. 2002. *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grop.
- Departemen Agama RI. 2001. *Langkah-Langkah Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum*. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1983/84. *Materi Dasar Akta Mengajar V*. Jakarta.
- Dhofier, Zamakhsyari. 1984. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES,
- Dusuki, H. 1975. *Ikhtisar Perkembangan Islam*. Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia.
- Ensiklopedi Islam*. 1997. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Ensiklopedi Indonesia* 4. 1983. Jakarta: Ikhtisar Baru.
- First World Conference on Muslim Education*. Jakarta: Inter Islamic University Cooperation of Indonesia.
- Gibb, HAR, and Kramers, J.H. 1961. *Shorter Encyclopedy of Islam* Leiden: EJ Brill.
- Hatta, Muhammad. 1970. *Pengantar ke Jalan Ilmu dan Pengetahuan*. Jakarta: Pembangunan.
- Hidayat, Kamaruddin. 1991. *Masyarakat Agama dan Agenda Masyarakat Madani*. Jakarta.
- Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta. 1962. *Buku Tahunan Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Hukumiyyah 1960-1962*. IAIN Yogyakarta.
- Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga. 1960. *Buku Tahunan Institut Agama Islam Negeri Al Jamiah Al Islamiah Al Hukumiah 1960-1962*. Yogyakarta.
- Ibrahim. *Inovasi Pendidikan*. 1988. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Yunus, Mahmud. 1979. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Hidayakarya Agung.
- Langgulung, Hasan. 1986. *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Langkah-langkah Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Islam pada Sekolah Umum*. 2001. Departemen Agama RI, Jakarta.
- Kaber, Achasias. 1988. *Pengembangan Kurikulum*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Koesoema, Doni. 2007. *Pendidikan Karakter*. Jakarta: KOMPAS.
- Kompilasi Perundangan Bidang Pendidikan*. 2009. Jakarta: Pustaka Yustusia.
- Madjid, Nurcholish. 1985. *Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren*. Dalam Dawam Rahardjo, M., Ed. *Pergolakan Dunia Pesantren*. Jakarta: P3 M.
- Madjid, Nurcholish. 1999. *Cita-cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.



- Mastuhu. 1989. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*. Bogor: Fakultas pascasarjana IPB.
- Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas. 2003. Departemen Agama RI, Jakarta.
- Muhadjir, Noeng. 1987. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Pendidikan*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- , *Penelitian Kualitatif*. 1989. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Mulyanto, Sumardi. 1978. *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945-1975*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Munawir, Ahmad Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pesantren Al Munawwir
- Nasution, Harun. 1992. *Pembaharuan dalam Islam*. (Sejarah Pemikiran dan Gerakan) Jakarta: Balai Pustaka.
- Natsir, M. 1973. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Noer, Deliar. 1980. *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Porbakawatja, Soegarda. 1970. *Pendidikan pada Alam Indonesia Merdeka*. Jakarta: Gunung Agung.
- , 1976. *Ensiklopedi Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Prasodjo, Sudjoko, dkk. 1982. *Profil Pesantren Laporan Hasil Penelitian Pesantren Darul Falak dan Delapan Pesantren lain di Bogor*. Jakarta: LP3ES.
- Roetiyah, N.K. 1989. *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Saefuddin, A.M. 1987. *Dsekularisasi Islam*. Bandung: Mizan.
- Saridjo, Marwan, dkk. 1980. *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*. Jakarta: Dharma Bhakti.
- Saylor, Galen, J. and Alexander M. William. 1960. *Curriculum Planning for Better Teaching and Learning*. New York: Holt, Rinchat.
- Second World Conference on Muslim Education*. 1980. Recommendation.
- Steenbrink, Karel. 1986. *Pesantren Madrasah Sekolah*, Jakarta: LP3ES.
- Suriasumantri, Jujun, S. 1982. *Falsafah Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Staphen. Romine. 1954. *Building The high School Curriculum*. New York: The Ronald Press Company.
- Syalaby, Ahmad. 1976. *Sejarah Pendidikan Islam*. Terjemahan Mukhtar Yahya dan Sanusi Latheif, Singapura: Pustaka Nasional.
- Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional*. 1989. Semarang: Tugu Muda.
- Team Penulis. *Kamus Filsafat*. 1995. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Thomas Gordon. 1990. *Guru yang Efektif*. Jakarta: RajaWali,
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad ke-21*. Magelang: Tera Indonesia.
- Zarkasyi, Imam dan Ahmad Sahal. *Wasiat, Pesan, dan Harapan Pendiri Pondok Modern Gontor*. t.th.
- Ziemek, Manfred. 1973. *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. Butche B. Soendjono, Penerjemah. Jakarta: LP3M.



## TENTANG PENULIS

**Prof. Dr. H. Haidar Putra Daulay, M.A.** adalah Guru Besar Sejarah Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Lahir di Singkuang Mandailing Natal pada tanggal 6 September 1949. Alumni S-2 Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1988), dalam bidang Pendidikan Islam. Gelar doktor dalam bidang pendidikan Islam juga diraihnya dari tempat yang sama (1991). Pada tahun 1996, memperoleh kesempatan mengikuti kursus manajemen di Universitas McGill Canada. Dikukuhkan sebagai guru besar dalam sejarah pendidikan Islam pada tahun 1996.

Buku-buku karya beliau antara lain: *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah, dan Madrasah*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001. *Pendidikan Islam dan Tantangan Masa Depan*, Cita Pustaka Media, Bandung, 2002. *Mau'zah*, Medan, Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2002. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia*, Cita Pustaka Media, Bandung, 2004. *Renungan Haji*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006. *Upaya Meraih Ketenteraman Jiwa*, Medan, Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2007. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta, Prenada, 2004, 2007. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta Prenada, 2007, 2009. *Qalbun Salim*, Jakarta, Rineka Cipta 2009. *Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara*, Rineka Cipta 2009, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Rineka

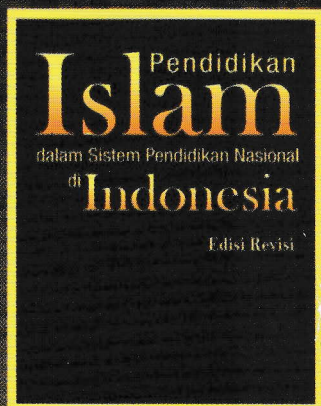


Cipta, 2009. Adapun dalam proses pencetakan *Pendidikan Islam & Mencerdaskan Bangsa*, Capita Selektia *Pendidikan Islam di Indonesia*.

Dari tahun 1992–1997 menjabat sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara di Padang Sidempuan, tahun 1997–2001 Pembantu Rektor II IAIN Sumatera Utara Medan, dan dari tahun 2001–2005 sebagai Pembantu Rektor I IAIN Sumatera Utara. Tahun akademi 2009/2010, menjadi Guru Besar Tamu (*Visiting Professor*) pada Akademi Pengajian Islam Universitas Malaya Kuala Lumpur. Aktif sebagai Pengurus Dewan Pendidikan Sumatera Utara Periode 2006–2012.







kali digunakan untuk menyampaikan pesan Islam ke seluruh lapisan masyarakat.

Persentuhan yang bersifat mutualis tersebut menjadikan pendidikan Islam berkembang dalam berbagai bentuk mulai dari pengajian informal di surau, pengajaran semi formal oleh para kiai besar, hingga ke bentuk formal berupa pembentukan dan pendirian pondok pesantren dengan aktivitas ajar mengajar yang lebih terstruktur. Dan, fleksibilitas tersebut kembali ditunjukkan dunia pendidikan Islam ketika bersentuhan sistem pendidikan modern pasca-kemerdekaan dengan bermetamorfosis menjadi bentuk baru. Contohnya, madrasah yang merupakan penggabungan nilai pesantren tradisional dan sekolah modern; demikian pula dengan pesantren yang saat ini lebih membuka diri terhadap pelbagai perkembangan ilmu pendidikan modern dalam proses ajar mengajar. Dengan demikian, perannya sebagai agen perubahan bagi masyarakat sekitar masih terus terpelihara sampai kini.

Rangkaian potret perjalanan sejarah tersebut yang kemudian menjadi tema utama buku ini. Ditambah dengan analisis kritis berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pendidikan Islam di Indonesia seperti: profesionalisme guru madrasah, tantangan perguruan tinggi Indonesia, inovasi pendidikan Islam, serta kontribusi pendidikan Islam dalam membangun karakter bangsa. Buku ini menjadi referensi yang sangat berharga bagi mereka yang tertarik kepada bidang pendidikan Islam sekaligus bagi para pendidik yang sudah bergelut di dalamnya.



**KENCANA**  
PRENADA MEDIA GROUP  
E-mail: pmg@prenadamedia.com  
<http://www.prenadamedia.com>

ISBN: 978-602-9413-33-5